

THE REAL PRESIDENT



Rp75.000,-

MASYARAKAT
SUMSEL BELUM
SIAP DIPIMPIN
PEREMPUAN

APBD HABIS
DIPAKE RAPAT
BUKAN BUAT
RAKYAT

KEPALA
DAERAH
DIPILIH
DPRD

BERDAYAKAN
MASYARAKAT LEWAT
KAMPUNG NELAYAN
SEJAHTERA

DESA CERDAS
UNTUK
KAWAL DANA
DESA

PPN 12 PERSEN,
KENAIKAN PAJAK
BERBALAS
INSENTIF



info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INOVASI UNTUK NEGERI



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781

Email : redaksi@infoindonesia.id



www.infoindonesia.id

facebook @infoindonesia.id

twitter : @infoindonesia

Instagram @info_indonesia.id

YouTube : infoindonesiatv



LAPOR MAS WAPRES

PENGADUAN:

LANGSUNG DATANG KE ISTANA WAPRES 📍
SENIN - JUMAT, JAM 08.00 - 14.00 WIB

KONTAK KE WHATSAPP 📱

08111 704 2207

ALAMAT 📍

ISTANA WAKIL PRESIDEN RI,
JLN. KEBON SIRIH NO. 14, JAKARTA PUSAT

EDISI
BULAN
DESEMBER
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Babak baru segera tiba seiring pergantian tahun. Perjalanan Indonesia sebagai negara memasuki usia ke-80 pada 2025 serangkaian dengan tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kisi-kisinya?



22

COVER STORY

Gibran Rakabuming Raka mulai membangun branding dalam karir politiknya setelah dilantik sebagai Wakil Presiden 2024-2029. Dua bulan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, putra sulung Joko Widodo ini sudah dua kali menggantikan posisi Kepala Negara yang melawat ke luar negeri.



28

INFO SUMSEL

Sumatera Selatan optimistis mempertahankan swasembada pangan. Melalui Optimalisasi Lahan Sawah (Opla) dan Cetak Sawah 2024-2025, Sumsel siap mendukung peningkatan swasembada dan lumbung pangan nasional. Apalagi, saat ini Sumsel masuk daerah penghasil pangan terbesar kelima di Indonesia.



38

INFO PROFIL

Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah resmi mengumumkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen meraih suara terbanyak di Pilkada 2024.



62

INFO PILKADA DKI

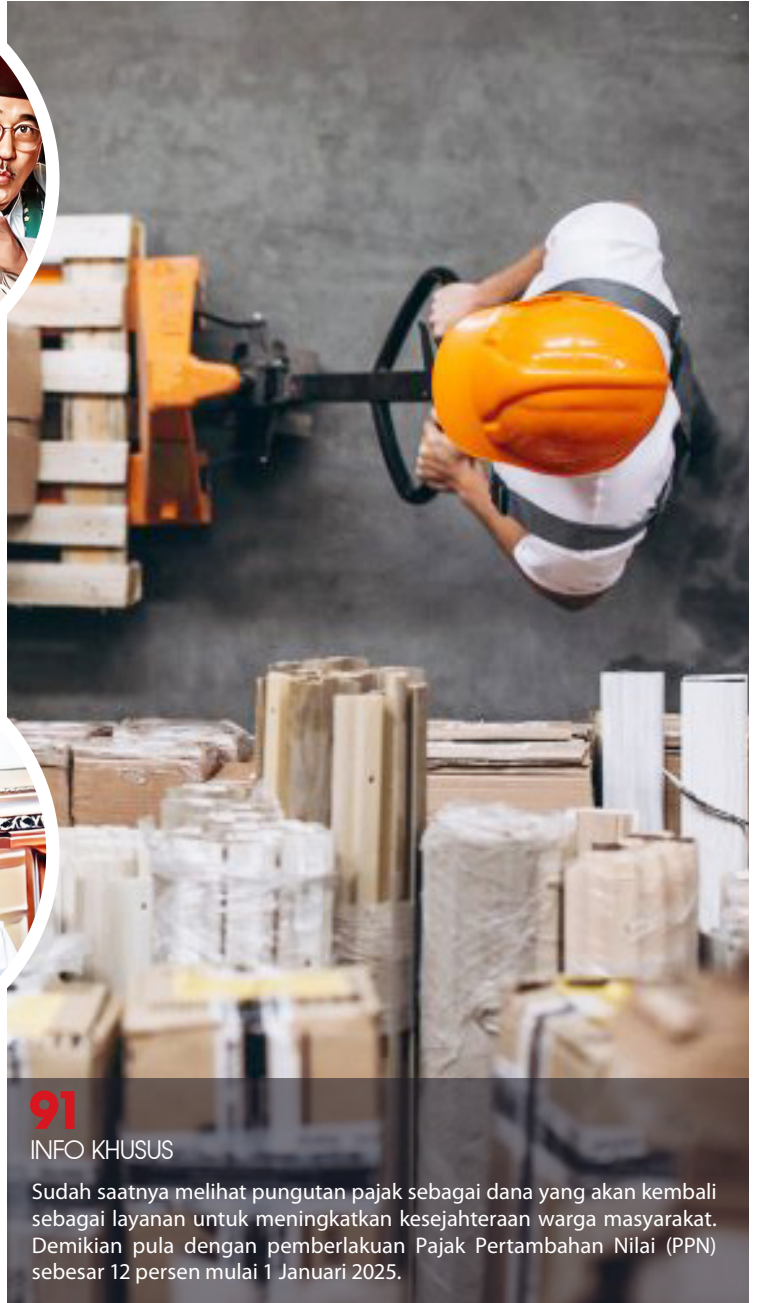
Pramono Anung dan Rano Karno resmi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Dua kader PDIP ini mampu mengalahkan kandidat yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus serta di-endorse langsung Prabowo Subianto dan Joko Widodo.



74

INFO NASIONAL

Kementerian Transmigrasi akan menjalankan visi besar dan paradigma baru transmigrasi yang diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya sebagai salah satu instrumen vital dalam pembangunan perekonomian nasional.



91

INFO KHUSUS

Sudah saatnya melihat pungutan pajak sebagai dana yang akan kembali sebagai layanan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Demikian pula dengan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

70 INFO PILKADA SUMSEL

82 INFO EKONOMI

86 INFO ISTANA

90 KAJI

58

INFO PROFIL

Hidup harus dinikmati. Salah satu caranya dengan banyak berbuat baik dan tidak pilih-pilih teman. Setiap teman ada rezekinya, meski ada juga yang membawa keburukan. Namun hal itulah yang membuat seseorang diuji tingkat ketulusannya.

TRANSISI

Menjelang 2024 berakhir kemudian beralih ke 2025, kita semua sebagai bagian dari bangsa ini sedang berada dalam masa transisi pemerintahan. Transisi dari bahasa Inggris transition berarti peralihan. Dalam hal ini peralihan masa atau periode pemerintahan.

Peralihan itu sudah berlangsung sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 mendapat pengakuan (legitimasi) resmi atas hasil-hasilnya. Berlanjut dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif di berbagai dewan (chamber, kamar) dan tingkatan wilayah (pusat, provinsi, hingga kabupaten-kota). Selanjutnya berlangsung pula Pemilihan Kepala Daerah serentak di semua wilayah. Alhasil, awal 2025 adalah periode baru perjalanan kenegaraan kita semua: Indonesia dengan penduduk yang berjumlah lebih dari 280 juta jiwa pada akhir 2024 dan akan terus bertambah.

Sisi kependudukan sudah jelas merupakan faktor yang memerlukan perhatian serius. Bagaimana mengelola penduduk sebanyak itu. Plus aneka keragaman yang menyertainya: Mulai dari kelompok usianya, siklus hidupnya, nafkah atau belanjanya, dengan aneka unsur bawaan suku, agama, ras, serta hubungan antar-golongannya (SARA) yang beragam pula.

Memang, kita bukan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Masih ada China, India, Amerika Serikat, yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia. Toh lebih banyak lagi negara dengan jumlah penduduk lebih sedikit dari Indonesia. Yang perlu menjadi perhatian, negara-negara itu sesungguhnya saling bersaing secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga kesinambungan eksistensinya.

Jadi, dengan persaingan itu kita bisa membandingkan kondisi masing-masing negara. Dengan mudah kita dapat menelusuri perbandingan-perbandingan itu melalui bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Mulai dari daftar jumlah penduduk setiap negara, penghasilan per kepala warganya, bahkan tingkat kebahagiaannya. Bukankah kita sudah kerap menyimak istilah keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) sejak abad XX lalu?

Dalam ranah ekonomi dan bisnis, keunggulan komparatif adalah kelebihan atau keunggulan satu entitas yang melekat dengan kondisinya. Misalnya, keunggulan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia sehingga sanggup menjaga kesinambungan eksistensinya. Sedangkan keunggulan kompetitif adalah kemampuan untuk menghasilkan produk maupun jasa yang lebih berkualitas dari pesaingnya.

Begitulah, di awal periode pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, kita perlu memahami benar keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif bangsa ini untuk melanjutkan perjalanan bersama sebagai bangsa. Lebih dari itu, pemahaman tadi memerlukan kebijakan politik yang berlanjut dengan tindakan nyata untuk meraih sarannya. Bukankah kita sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, beserta pengakuan atas beberapa kebijakan di masa lalu yang meleset dari target.

Sekarang Indonesia segera memulai periode baru perjalanan kebangsaannya. Kita berharap kebijakan politik pemerintahan pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya akan memacu kemajuan yang bukan sekadar slogan. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadh, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



ANCANG-ANCANG TAHUN PERTAMA

Babak baru segera tiba seiring pergantian tahun. Perjalanan Indonesia sebagai negara memasuki usia ke-80 pada 2025 serangkai dengan tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kisi-kisinya?



Di ranah wisata, kisi-kisi perjalanan disebut itinerary. Tapi, perjalanan entitas bangsa tentu lebih kompleks. Toh tetap ada kisi-kisi perjalanan di tingkat kebangsaan: Antara lain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disusun secara tahunan.

Nah, setelah melalui proses politik yang melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara usai Pemilihan Presiden

yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan. Anggaran pendapatan negara yang dimaksud, terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Berdasarkan lampiran dalam Perpres 201 Tahun 2024 itu, disebutkan rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2025, di antaranya pendapatan pajak dalam negeri sebanyak Rp2.433 triliun, PPh 21 sebanyak

Toh rincian-rincian Perpes itu masih membuka kemungkinan perubahan. Pergeseran rincian pembiayaan anggaran dan penggunaannya kelak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi, memang pas menyebutnya kisi-kisi.

Sedangkan perubahan apapun pada rincian APBN oleh lembaga eksekutif pemerintahan akan pula melibatkan lembaga legislatif tempat berhim-



2024, tersusunlah APBN 2025 beserta rinciannya. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang mengatur tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, sebagai dasar pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Perpres itu berisi rincian anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran,

Rp313 triliun, hingga pendapatan PPN dalam negeri sebanyak Rp609,04 triliun. Sementara anggaran belanja negara yang dimaksud dalam Perpres tersebut terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah.

Perpres itu ditetapkan Presiden di Jakarta, tanggal 30 November 2024, dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal yang sama. Perpres mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

punya para wakil rakyat. Sejak awal penyusunannya, penyelenggaraan negara yang menganut pembagian kekuasaan sudah lazim demikian.

Untuk APBN 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Ang-

garan 2025 di Jakarta pada Kamis, 19 September 2024.

Kala itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. "Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai

reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan.

Tata kelola PNBP, sambungnya, ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi. "PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ujar

(TKD) sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain. "Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, pengu-



dan menembus di atas Rp3.000 triliun," kata Bu Menkeu.

Bu Menkeu mengungkapkan target penerimaan perpajakan pada 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global. Sedangkan upaya meraih PNBP, sambungnya, prosesnya mencakup

Menkeu Ani.

Bu Menkeu mengungkapkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun. "Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlintas, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender," ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Transfer ke Daerah

tan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah," kata Menkeu.

Sementara, total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun.

"Tingkat defisit ini adalah moderat

dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN," ujar Menkeu.

Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2025, disepakati yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali

saan kesehatan gratis. "Diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56," kata Bu Menkeu.

Selain itu, program prioritas ketahanan pangan, seperti program pemberdayaan petani dan nelayan, diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025.

Menkeu Ani menambahkan, APBN 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional. "APBN 2025

terencana dengan baik," kata Presiden Prabowo Subianto pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Presiden mengingatkan bahwa kondisi geopolitik dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, serta diwarnai oleh ketegangan akibat peperangan dan persaingan ketat antarnegara besar. Menurut Presiden, kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar.

Kepala Negara menekankan bahwa kondisi negara Indonesia yang berada dalam perdamaian dan stabilitas merupakan hal yang wajar dan biasa. Justru, keadaan tersebut, kata Presiden, merupakan hal yang tidak biasa. "Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang," kata Prabowo.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar belanja pemerintah dalam APBN Tahun 2025 harus dimanfaatkan dengan efisiensi atau penghematan di seluruh bidang. Kepada pimpinan daerah, Presiden meminta upaya serius memerangi kebocoran anggaran, dan menempatkan anggaran negara hanya untuk kepentingan rakyat.

"Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif," kata Prabowo.

Ia juga mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial atau peresmian, mengurangi kegiatan bersifat kajian atau seminar, dan lebih fokus untuk mengatasi masalah secara langsung. Terlebih lagi, porsi belanja dalam APBN 2025 lebih ke sektor pendidikan.

Presiden Prabowo menyebutkan, alokasi terbesar dalam struktur APBN Tahun 2025 ditujukan untuk sektor



sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per US Dolar, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen, Indonesian Crude Oil Price (ICP) sebesar US\$82/Barel, dan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus turun ke kisaran 7,0-8,0 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem terus dijaga pada tingkat 0 persen, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,5-5,0 persen, dan tingkat ketimpangan atau gini ratio turun ke kisaran 0,379-0,382.

Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas Presiden Terpilih yang didukung APBN 2025 antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah, pemerik-

dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia," ujarnya.

Nah, setelah Perpres rincian APBN terbit, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, terutama dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian. "Karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan

pendidikan, bukan bidang pertahanan, seperti negara lainnya, yakni Amerika Serikat dan India. "Banyak negara alokasi terbesarnya dalam APBN adalah pertahanan, demikian Amerika Serikat, demikian India, alokasi terbesarnya adalah pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan," kata Presiden pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Berbeda dengan itu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengalokasikan porsi terbesar pada APBN Tahun 2025 pada sektor pendidikan.

dalam sejarah. "Kalau saudara perhatikan, alokasi (anggaran) yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah ini alokasi terbesar dalam sejarah kita," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci bahwa belanja pemerintah pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Dari total belanja itu, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. "Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita," kata Sri Mulyani.

Beberapa hari sebelum menandatangani Perpres Rincian APBN 2025, su-

versitas Negeri Jakarta, Rawamangun Jakarta Timur, Kamis, 28 November 2024.

Presiden menegaskan bahwa pemerintahan saat ini, yang berada di bawah Koalisi Merah Putih, mengambil langkah berbeda dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas nomor satu. "Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia," ujarnya.

Sebagai gambaran, sektor pendidikan memperoleh porsi Rp724,3 triliun



Presiden meyakini bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi jalan keluar dari kemiskinan.

Kepala Negara menilai bahwa perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat hanya strategi maupun langkah perantara menuju kebangkitan ekonomi. "Di ujungnya, pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan," kata Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dalam struktur APBN Tahun Anggaran 2025 ini menjadi yang terbesar

dah mengemukakan pendidikan adalah prioritas utama dalam alokasi APBN 2025 di Kabinet Merah Putih. Kebijakan ini, menurut Presiden, merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kebangkitan bangsa Indonesia.

"Karena kesadaran saya, bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa Indonesia dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan, kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin," katanya di Velodrom Uni-

dari target pendapatan negara pada RAPBN 2025 Rp3.005,1 triliun. Sedangkan dana pendidikan melampaui alokasi perlindungan sosial Rp504,7 triliun, infrastruktur Rp400,3 triliun, kesehatan Rp197,8 triliun, ketahanan pangan Rp139,4 triliun, serta hukum dan hankam Rp375,9 triliun.

Begitulah kisi-kisi perjalanan tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan catatan, tetap terbuka akan perubahan mengingat kondisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi global memang ditandai peningkatan ketidakpastian. ●

TEKANAN LUAR DAN DALAM

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat segera fokus untuk memenuhi janji-janji kampanye di 2025 melalui berbagai program yang telah direncanakan.

Kebijakan Prabowo pada 2025 diyakini akan jadi penentu pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun-tahun mendatang. Salah satu kebijakan yang diperlukan adalah percepatan sektor industrialisasi di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan, 2025 merupakan tahun penentu atas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan di periode itu, punya dampak besar bagi performa ekonomi untuk periode berikutnya.

"Artinya kalau hanya dengan bisnis as usual, nggak mungkin tercapai, makanya kami bilang harus diubah jadi tahun depan. Di outlook kemarin judulnya adalah tahun 2025 itu adalah tahun penentu," kata Faisal saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember 2024.

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, target pertumbuhan ekonomi di awal pemerintahan Prabowo Subianto 5,6-6,1 persen. Maka, untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun



mendatang, diperlukan percepatan industrialisasi, terutama di sektor manufaktur.

Per 2024, kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru menyentuh 19 persen. Adapun dalam RPJMN kontribusi bidang manufaktur rata-rata 21,9 persen terhadap PDB Indonesia. Tak hanya itu, CORE memandang percepatan industrialisasi

juga membutuhkan energi bersih sebagai modal utama.

"Kalau ingin mendorong percepatan ekonomi, mempercepat, memperbanyak, memperluas industri, industrialisasi, konsekuensinya kita butuh energi. Energi itu sebagai modalnya. Nggak mungkin kita mempercepat ekonomi, melakukan industrialisasi tanpa tambahan energi," kata dia.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus didukung oleh sektor pertanian. Pertumbuhannya minimal mencapai 5,8 persen per tahun.

Peneliti Utama BRIN, Erizal Jamal, mengatakan, langkah-langkah strategis ini harus juga didukung pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi serta transformasi sektor pangan dan pertanian secara menyeluruh.

"Pertumbuhan sebesar ini hanya bisa dicapai jika kita memaksimalkan potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan," ujarnya, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurut Erizal, sektor peternakan memiliki potensi pertumbuhan hingga 4,8 persen per tahun, sementara sektor perikanan dapat tumbuh sekitar 6,6 persen per tahun. Selain itu, pengembangan sektor jasa atau tersier, yang juga berpotensi tumbuh tinggi, membutuhkan dukungan kebijakan yang memberikan kepastian usaha.

"Dukungan kelembagaan yang kuat diperlukan agar transformasi ekonomi berjalan sesuai rencana," kata dia.

Erizal menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi pangan dan pertanian untuk mendukung proses reindustrialisasi di berbagai wilayah Indonesia. Strategi ini tidak hanya akan menciptakan nilai tambah yang tinggi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan.

Dia juga menjelaskan, target swasembada pangan harus menjadi prioritas utama. Sebab, swasembada dapat dimulai dari komoditas beras sebagai pangan pokok, lalu dilanjutkan dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya yang memiliki prospek industrialisasi dan pengolahan lanjutan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Sementara, peningkatan Total Factor Productivity (TFP) menjadi kunci untuk mencapai target tersebut. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi dan inovasi secara masif, peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan (R&D), serta penguatan kapasitas peneliti dan sistem diseminasi teknologi yang memadai.

Selain itu, Erizal menggarisbawahi pentingnya upaya pemerintah untuk menarik investasi, baik asing maupun domestik. "Efisiensi dan efektivitas investasi perlu ditingkatkan untuk menurunkan nilai Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) ke tingkat ideal," katanya.

Tidak hanya itu, Erizal mengatakan, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harus diiringi dengan konsistensi kebijakan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui adopsi teknologi dan digitalisasi menjadi langkah penting.

hensif yang dilakukan oleh tim Foresight and Metrics to Accelerate Food, Land, and Water System Transformation, yang melibatkan BRIN, IPB University, dan Bappenas, serta didukung oleh IFPRI dan Alliance Bioversity International and CIAT.

"Kajian kami menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025-2029 dapat mencapai rentang 5,4 hingga 8,2 persen per tahun, dengan catatan bahwa ada dukungan kebijakan yang konsisten, terutama dalam pengembangan inovasi dan teknologi di sektor-sektor strategis," ujarnya.



"Hal ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya mendorong konsumsi rumah tangga dan tabungan," ujar Erizal.

Erizal menambahkan, ekonomi Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh hingga 8,2 persen per tahun pada periode 2025-2029. Potensi pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan kajian kompre-

Kajian ini mengintegrasikan pendekatan Dynamic Economy-Wide Model for Indonesia (DEWI) berbasis Computable General Equilibrium (CGE) untuk memproyeksikan potensi pertumbuhan ekonomi. Fokus kajian mencakup intensifikasi, ekstensifikasi, serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Indonesia, kata Erizal, pernah men-

catat pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen pada beberapa periode, seperti 1973, 1977, 1980, dan 1995. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai faktor, termasuk booming harga minyak bumi pada 1970-an dan peningkatan produktivitas sektor industri serta pertanian pada dekade berikutnya.

Namun, Erizal menegaskan, saat ini Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain, seperti China dan Vietnam, yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi melalui peningkatan Total Factor Productivity (TFP).

"China, misalnya, mencatat pertumbuhan TFP pertanian hingga 4-5 persen per tahun pada 1998-2007, sementara Indonesia hanya di angka 1-2 persen. Kita perlu fokus pada inovasi dan efisiensi, terutama di sektor pertanian," ujarnya.

Erizal juga menyoroti pentingnya efisiensi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. "China memiliki ICOR di bawah 5, sedangkan ICOR Indonesia berada di angka 6,2. Ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas investasi," kata dia.

Dengan langkah strategis yang terintegrasi, Indonesia diharapkan mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Kami optimistis dengan kebijakan yang tepat, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat tercapai," kata Erizal.

Pertumbuhan Stagnan

Di tengah pelemahan daya beli kelas menengah dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak pada kinerja dunia usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh stagnan pada 2025. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meramal, ekonomi RI hanya akan tumbuh di kisaran 4,9 persen sampai 5,2 persen.

Proyeksi ekonomi itu tertuang dalam laporan "Outlook Ekonomi dan Bisnis Apindo 2025" yang dirilis Apindo pada Kamis, 19 Desember 2024, di Jakarta. Dalam laporan itu, kalangan pengusaha mengingatkan adanya potensi ekonomi Indonesia bergerak stagnan di kisaran 5 persen, bahkan bisa merosot di bawah itu.

Laporan tersebut menggarisbawahi, gejala stagnasi ekonomi di Indonesia semakin terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2024 yang hanya mampu tumbuh 4,95 persen secara tahunan (year on year).

"Prediksi kami, tahun depan juga tetap tidak akan ada lompatan yang terlalu tinggi, sehingga

perkiraan kami ekonomi Indonesia pada 2025 akan tumbuh sekitar 4,9-5,2 persen, cenderung lebih ke kisaran 5,1-5,2 persen," kata Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Shinta menilai, stagnasi ekonomi itu disebabkan oleh tekanan dari dalam dan luar. Secara eksternal, tekanan geopolitik mulai dari fragmentasi geopolitik, landainya harga komoditas unggulan, berlanjutnya pelemahan rupiah terhadap dollar AS, serta dinamika di Amerika Serikat pasca-terpilihnya Presiden Donald Trump akan berdampak pada ekonomi RI.



Dukungan kelembagaan yang kuat diperlukan agar transformasi ekonomi berjalan sesuai rencana.

Sementara secara internal, ada tekanan yang kuat pula dari sisi pelemahan daya beli kelas menengah di Indonesia. Kondisi itu berpotensi semakin buruk dengan adanya tekanan tambahan akibat keputusan pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025.

Prediksi dunia usaha itu tak jauh berbeda dari berbagai lembaga ekonomi internasional yang juga meramal ekonomi RI akan bergerak stagnan di kisaran 5 persen tahun depan. Prediksi itu antara lain proyeksi pertumbuhan 5 persen oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) serta 5,1 persen oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Dari sisi dunia usaha, tekanan tambahan juga muncul akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang belum diimbangi dengan produktivitas, sehingga berpotensi mendorong efisiensi usaha hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan di sektor padat karya.

"Isu utama yang memengaruhi dari domestik jelas adalah pelemahan kelas



menengah sebagai penopang konsumsi dalam negeri yang sangat penting. Apalagi, dengan tekanan PPN 12 persen ini sudah ke mana-mana hingga bisa mendorong potensi PHK. Ini salah satu tantangan utama yang menurut kami perlu jadi perhatian pemerintah,” kata Shinta.

Tak cukup memadai

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat dan dunia usaha melalui Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan. Total ada 15 insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan untuk kalangan masyarakat

enam bulan (Januari-Juni 2025).

Akan tetapi, berbagai paket stimulus itu dinilai tidak cukup untuk menggerakkan ekonomi. “Kami menilai niat pemerintah sudah baik, paling tidak memberikan (insentif). Namun, targetnya belum memadai,” ucap Shinta.

Beberapa stimulus dinilai tidak akan signifikan untuk meringankan beban biaya dunia usaha, misalnya diskon 50 persen untuk iuran JKK. Menurut Shinta, pengusaha sebenarnya berharap pemberian diskon itu bisa diberikan untuk program jaminan ketenagakerjaan lainnya, bukan hanya kecelakaan kerja.

“Waktu itu memang kami bilang, ka-

“Sebab, kalau mesin itu, kan, kita perlu perencanaan dan pengadaan dulu. Sementara yang kita butuh, kan, stimulus yang bisa dipakai segera. Ini insentif yang bagus, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan cepat dan jumlahnya pun tidak begitu signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, meyakini, pemberian paket stimulus dari pemerintah akan cukup bisa menggerakkan ekonomi di awal tahun.

Berdasarkan pemetaan Kemenko Perekonomian, inflasi cenderung akan



miskin dan rentan, kelas menengah, industri padat karya, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Beberapa insentif yang berkaitan dengan dunia usaha adalah dukungan pembiayaan untuk revitalisasi mesin industri dalam bentuk kredit investasi dengan subsidi bunga. Sementara pelaku UMKM diberi perpanjangan diskon tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen.

Ada pula potongan Pajak Penghasilan (PPh 21) khusus pekerja sektor padat karya dengan gaji sampai Rp 10 juta per bulan serta diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama

lau keputusan (menaikkan PPN) tidak bisa diganggu gugat, bagaimana dengan membantu subsidi untuk BPJS Ketenagakerjaan? Namun, ternyata yang diberikan pemerintah sekarang hanya untuk kecelakaan kerja. Ini sangat kecil sekali, berbeda jauh dengan konsep (subsidi) BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya kami tawarkan,” tuturnya.

Stimulus lain yang disoroti adalah bantuan pembiayaan untuk modernisasi mesin industri. Meski revitalisasi mesin dibutuhkan oleh sebagian sektor padat karya, Shinta menilai, stimulus itu tidak akan efektif menggerakkan ekonomi dalam waktu singkat.

lebih tinggi pada triwulan I (Januari-Maret) sehingga menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, sebagian insentif sengaja digulirkan pemerintah pada awal tahun, seperti diskon listrik, diskon iuran JKK, dan bantuan pangan, yang diberikan selama dua bulan pada Januari-Februari.

“Harapannya, saat inflasi tinggi, ada bantuan pangan dan diskon listrik. Ini semoga bisa menjaga inflasi dan menciptakan daya beli. Itu kita harapkan menjadi leverage (posisi tawar) untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan I, yang merupakan momen kritis dalam ekonomi sepanjang tahun,” kata Ferry. •



OPTIMISME INDONESIA LEBIH BAIK

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan sentimen positif dari publik dan diyakini akan mampu membawa Indonesia lebih baik lagi.

Mengutip hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Presiden Prabowo dinilai mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya. Dalam survey ini, sebanyak 63,1 persen responden menilai cukup yakin dan 16,5 persen menilai sangat yakin.

Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan, menjelaskan, sentimen positif yang dibaca sebagai optimisme merupakan harapan besar publik terhadap upaya pemerintah untuk dapat merealisasikan Astacita dan visi besar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam melanjutkan perjalanan menuju Indonesia emas di 2045.

"Berdasarkan suara responden, 76,4 persen mengaku positif memandang Kabinet Merah Putih, sedangkan 18,8 persen responden mengaku netral saja dan hanya 4,8 persen yang menjawab negatif," jelas Ali, Sabtu, 21 Desember 2024.

Ali menuturkan, jawaban responden pada pertanyaan tersebut berbanding lurus dengan pertanyaan terkait performa Kabinet Merah Putih di bulan-bulan pertama masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Sebanyak 40,32 persen responden menjawab lebih baik dan 27,76 persen menyatakan jauh lebih baik. Hanya 8,17 persen yang mengungkapkan tidak ada perubahan dan 10,25 persen mengatakan lebih buruk," beber Ali.

Sebagai informasi, periode survei



dilakukan pada 12 Desember 2024 dan berakhir pada 19 Desember 2024. Survei bermaksud mengumpulkan pandangan kelas menengah intelektual tentang evaluasi Kabinet Merah Putih akhir tahun 2024 dan Proyeksi 2025.

Kelas menengah intelektual dimaksud dalam survei ini adalah kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama tahun 2024.

Sebelumnya, sebelum dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran punya dua modal sosial yang penting bagi pemerintahan barunya, yakni citra dan tingkat keyakinan publik. Berdasarkan survei Kompas September 2024, citra positif Prabowo tergolong tinggi, yakni 84,1 persen.

Citra positif terhadap Prabowo ini merata diungkapkan baik oleh responden laki-laki maupun perempuan, serta responden dengan latar belakang ekonomi bawah, menengah, dan atas. Demikian pula dengan mereka yang

berpendidikan rendah hingga tinggi. Senada dengan Prabowo, mayoritas publik juga menilai positif citra Gibran. Tujuh dari 10 responden menilai positif citra Gibran.

Penilaian positif terhadap sosok Prabowo dan Gibran ini juga diikuti tingkat keyakinan terhadap pemerintahan menda-tang dalam mengatasi sejumlah persoalan bangsa. Di bidang politik dan keamanan, misalnya, 76,4 persen responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran akan mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Dalam bidang hukum, sebagian besar responden (74,5 persen) juga yakin pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 2024 ini akan mampu menegakkan hukum. Tingkat keyakinan senada juga dinilai dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (73,1 persen) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

(72,6 persen).

Besarnya citra dan keyakinan publik ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, Prabowo-Gibran memiliki modal sosial berupa dukungan masyarakat pada Pilpres 2024 sebesar 58,59 persen pemilih.

Faktor lain yang membuat keyakinan publik tumbuh terhadap pemerintahan baru ialah adanya keyakinan akan dilaksanakannya program-program yang ditawarkan Prabowo-Gibran dalam kampanye lalu. Program unggulan makan bergizi gratis, misalnya, telah diuji coba di sejumlah sekolah, seperti di Surakarta (Jawa Tengah), Tangerang (Banten), Bogor (Jawa Barat), dan Jakarta Selatan.

Kepastian berjalannya program unggulan Prabowo-Gibran ini juga dinilai sebagai bentuk komitmen tinggi pemerintahan baru dalam mewujudkan janji-janji kampanye yang lain, seperti pembangunan 3 juta rumah per



tahun.

Satuan Tugas Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang, menjelaskan, program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

rumah bakal diwujudkan lewat skema gotong royong. Di mana, sebanyak 2 juta rumah yang dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir bakal dibangun oleh kontraktor UMKM yang ada di desa. Saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

"Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Peru-

kemiskinan diproyeksi bakal ditekan hingga 1,8 persen, maka jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,22 juta bakal berkurang sebanyak 453.960 juta orang pada 2025.

"Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program



"Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun," kata Bonny saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8 persen pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20 persen, Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Adapun nantinya, program 3 juta

mahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan," tegas Bonny.

Dengan demikian, efek program 3 juta rumah nantinya diharapkan tak hanya mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, melainkan juga mampu menstimulus perbaikan ekonomi bagi rakyat sekitar.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Dengan demikian, apabila angka

3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," ujarnya.

Berdayakan Desa

Di sisi lain, pemerintah siap melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Dalam proses uji coba selama beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menemukan format ideal dalam proses pelaksanaan program. Pemerintah juga telah mulai penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, sampai pengelolaan limbah.

"Makan Bergizi Gratis adalah

salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, Presiden ingin mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, dan membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di masa depan. Kami ingin memastikan kesiapan SPPG untuk memulai program ini secara serentak pada 2 Januari 2025," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, Rabu, 11 Desember 2024.

Hariqo mengatakan, Presiden ingin

tar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Prabowo mengatakan puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah karena adanya program makan bergizi gratis. Ia memberikan contoh dari semula Rp1 miliar kini mencapai Rp8 miliar uang yang berputar di desa per tahunnya.

"Puluhan triliun akan beredar di

berkeadilan.

"Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia, waktu saya hadir di G20 itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan, karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah-langkah agar subsidi dapat meningkat dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran



anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tapi juga mampu memberdayakan ekonomi pedesaan.

"(Program) makan bergizi juga hal strategis, kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi," kata Prabowo dalam acara penyerahan Daf-

daerah-daerah, sebagai contoh yang sederhana, dengan Dana Desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun, dengan makan bergizi melalui uang makan untuk anak-anak beredar kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun. Kita akan balikkan uang tersedot ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa, ke daerah-daerah," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang bukan hanya menjadi fokus pemerintah, tapi juga menjadi agenda dunia. Ke depan, Prabowo juga akan memperbaiki pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dan

kementerian lembaga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan subsidi.

"Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah agar semua subsidi bisa dirasakan golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara sekalian dalam rangka meningkatkan efisiensi tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah dari kementerian / lembaga kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita di saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara canangkan," ujarnya. •

KENEGARAWANAN DALAM PILKADA

Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir, mewariskan legasi kenegarawanan dalam berpolitik. Persaingan dan perbedaan politik tidak seharusnya mengorbankan persatuan nasional.

Dalam dinamika politik awal kemerdekaan, perbedaan ideologi yang diwarnai perdebatan sengit tetap dalam bingkai merajut masa depan bangsa. Hatta memilih mundur sebagai wakil presiden pada 1956 karena perbedaan pandangan dengan Soekarno, tetapi ia tetap menjaga hubungan baik dan tidak menggunakan posisinya untuk menyerang pemerintah. Kekalahan politik bukan alasan untuk memecah belah, tetapi momentum untuk memperkuat demokrasi.

Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), berbagai gagasan tentang bentuk negara, dasar negara, dan sistem pemerintahan diperdebatkan secara tajam. Meskipun ada pihak yang tidak puas dan kalah suara, para pendiri bangsa tetap bersedia menempuh jalur kompromi. Kekalahan politik tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk merusak kohesi dan tatanan berbangsa, tetapi justru mengajarkan kedewasaan berdemokrasi.

Para pendiri bangsa memahami bahwa politik adalah alat untuk mengabdikan, bukan semata soal meraih atau mempertahankan kekuasaan. Sutan Sjahrir, misalnya, yang pernah menjadi perdana menteri, tetap berkontribusi melalui tulisan dan gagasan meskipun posisinya terpinggirkan secara politik. Kekalahan bukan akhir dari kontribusi, tetapi kesempatan untuk melayani dalam bentuk lain.

Memetik legasi

Legasi nilai-nilai kenegarawanan para pendiri bangsa tersebut mengajarkan bahwa kekalahan kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sebagai kegagalan pribadi. Seorang pemimpin yang kalah tetap bisa menjadi negarawan jika mampu mengedepankan persatuan nasional, menerima kekalahan dengan jiwa besar, dan melanjutkan kontribusi melalui cara-cara lain.

Karena itu, ketegangan yang meruncing antarkubu dalam pilkada hendaknya disudahi dengan aksi damai. Kandidat yang menang mengedepankan sikap persatuan dengan merangkul semua pihak, termasuk pendukung lawan, untuk membangun pemerintahan daerah yang inklusif. Deklarasi damai yang melibatkan kandidat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan penting untuk meredakan tensi politik yang tinggi sejak genderang pesta demokrasi ditabuh.

Dalam konteks demokrasi, pemilihan langsung sering kali memicu rivalitas yang tajam, terutama di daerah dengan bu-

Oleh:

Achmad Fauzi

**Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia**

daya patronase yang kuat. Di Sampang, konflik politik bisa merembet ke konflik horizontal karena kentalnya keterikatan emosional antara kandidat dan pendukungnya.

Tragedi carok di Sampang beberapa

waktu lalu yang merenggut nyawa merupakan bentuk ketegangan politik lokal yang tak boleh terjadi lagi. Peristiwa berdarah itu menjadi cermin kegagalan pelaksanaan demokrasi yang belum sepenuhnya menghasilkan tatanan masyarakat yang damai dan inklusif.

Legasi nilai-nilai kenegarawanan para pendiri bangsa tersebut mengajarkan bahwa kekalahan kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah harus dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Tragedi carok menunjukkan bahwa demokrasi tidak bisa hanya diukur dari pelaksanaan pilkada, tetapi juga dari bagaimana sistem dan kenegarawanan tokoh politik mampu membangun harmoni sosial. Demokrasi yang berkualitas harus mampu mengakomodasi budaya lokal, sekaligus mengurangi praktik-praktik destruktif, seperti carok, melalui pendekatan struktural dan kultural.

Jika terdapat keberatan terhadap proses dan hasil pilkada, misalnya, penyelesaian sengketa bisa ditempuh melalui jalur hukum, bukan melalui cara-cara yang tuna-adab. Para kandidat dan pendukungnya wajib mematuhi aturan main atau mekanisme hukum dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia.

Konflik berdarah tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem yang mampu menghadirkan keadilan dan solusi damai. Polarisasi sosial yang tajam dan persaingan politik yang runcing, ditambah dengan budaya kekerasan, semakin memperburuk polarisasi sosial di tingkat lokal. Carok menunjukkan bahwa demokrasi belum mampu menggeser budaya kekerasan menjadi budaya dialog seperti yang dicontohkan para pendiri bangsa.

Ruang dialog

Demokrasi yang berkualitas semestinya menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi bagi masyarakat. Ketidakhadiran mekanisme dialog membuat konflik tradisional seperti carok menjadi jalan penyelesaian.

Maka itu, secara kultural pemerintah dan tokoh masyarakat perlu mendorong pendidikan politik yang inklusif serta memperkenalkan alternatif damai dalam menyelesaikan konflik. Reformasi institusi demokrasi lokal dengan memperkuat kelembagaan, seperti hukum adat atau mediasi lokal, menjadi alternatif dalam membendung konflik seusa pilkada.

Pemberdayaan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat patut dilibatkan sebagai agen rekonsiliasi kultural untuk mencegah konflik horizontal. Tokoh lokal bisa menjadi

mediator untuk meredakan ketegangan di masyarakat, mendorong rekonsiliasi, dan menjaga persatuan.

Investasi dalam pendidikan, keadilan sosial, dan penguatan kelembagaan sangat penting agar demokrasi di Indonesia benar-benar dapat memberikan manfaat yang merata, termasuk di wilayah-wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks. Edukasi politik kepada masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang pentingnya menerima hasil pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi. Segala bentuk hoaks dan provokasi harus dicegah dengan aktif melawan penyebaran berita palsu yang dapat memanaskan situasi.

Secara struktural, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada juga harus dilakukan secara adil dan berkepas-

cenderung meragukan hasil pilkada. Tuduhan manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau intervensi politik bisa menciptakan ketegangan sosial.

Integritas penyelenggara pilkada sangat menentukan keberhasilan proses demokrasi dan stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa pilkada dijalankan secara adil dan transparan, potensi konflik sosial dapat dibendung.

Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus profesional, menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari penghitungan suara hingga pengumuman hasil. Penyelenggara harus melaksanakan tugas secara independen tanpa campur tangan dari partai politik atau pihak tertentu. Publikasi hasil penghi-



tian hukum. Aparat keamanan perlu memetakan potensi konflik, mengambil langkah preventif, mendeteksi potensi konflik sejak dini, dan bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan, terlepas dari latar belakang politik mereka.

Integritas penyelenggara

Salah satu isu yang menjadi aspek pemicu terjadinya konflik dalam pilkada ialah integritas penyelenggara. Jika penyelenggara pilkada dianggap berpihak atau tidak netral, masyarakat

tungan suara disampaikan secara real time dan penyampaian informasi bersifat terbuka terkait proses pilkada.

Akhirnya, setelah pesta demokrasi serentak itu usai, masyarakat diharapkan dapat kembali bersatu tanpa adanya dendam permusuhan. Masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan pilihan adalah bagian dari proses demokrasi, bukan alasan untuk berkonflik. Pemimpin daerah yang terpilih juga dituntut menunaikan janji kampanye dengan mengutamakan kepentingan rakyat. ●



Gibran Rakabuming Raka mulai membangun branding dalam karir politiknya setelah dilantik sebagai Wakil Presiden 2024-2029. Dua bulan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, putra sulung Joko Widodo ini sudah dua kali menggantikan posisi Kepala Negara yang melawat ke luar negeri.

GIBRAN THE REAL PRESIDENT



Pada 16 Desember lalu, Presiden Prabowo Subianto kembali menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2024 mengenai pendelegasian tugas-tugas kepresidenan di dalam negeri kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, selama ia melawat ke Mesir dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 17-19 Desember 2024.

Presiden Prabowo, dalam bagian per-

pelaksana tugas presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden. Selain itu, berdasarkan Keppres tersebut, setelah presiden kembali ke Indonesia, penugasan berakhir dan wapres segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden.

Sebelumnya, Gibran juga ditunjuk oleh Prabowo sebagai kepala pemerintahan sementara selama lawatan ke luar negeri pada 8 November 2024. Pen-

Oktober 2024, Gibran terlihat sangat aktif melakukan blusukan dan turun langsung bertemu rakyat. Pada Senin sore, 21 Oktober 2024, Gibran menuju Monas tempat proyek MRT fase 2 dikerjakan.

Didampingi Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Gibran meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin yang menjadi bagian dari MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran



timbangan keppres, menjelaskan penugasan kepada Wapres Gibran bertujuan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Dasar penerbitan Keppres tersebut berlandaskan pada Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Keppres tersebut, jika dalam jangka waktu penugasan tersebut perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka wapres sebagai

gangkatan Gibran sebagai Plt Presiden ditetapkan melalui Keppres 31/2024. Pada Keppres tersebut disebutkan Gibran wajib berkonsultasi dengan Prabowo saat ingin memberlakukan kebijakan baru dalam melaksanakan tugas presiden. Gibran juga harus mendapatkan persetujuan saat mengambil keputusan dan melaporkan tugas ke Prabowo.

Memang, sejak pelantikan pada 20

HI - Kota).

Dengan berjalan kaki, Wapres beserta pendamping dan rombongan terbatas menelusuri terowongan dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin sepanjang kurang lebih 350 meter yang saat ini pekerjaan sipilnya telah mencapai 82 persen.

Salah satu yang menjadi penekanan Wapres dalam peninjauan ini adalah pentingnya ketepatan waktu pelaksan-

aan proyek dan penghijauan kembali pasca penyelesaian proyek.

Kegiatan lain yang rajin dilakukan Gibran adalah meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bogor, Semarang, dan lainnya. Usai melakukan banyak uji coba, Gibran mengklaim ibu-ibu menjadi kelompok yang paling mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Gibran mengatakan ibu-ibu sangat antusias ketika menjalankan simulasi program makan bergizi gratis di sejumlah

Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Di sisi lain, Gibran mengklaim program makan bergizi gratis mampu meningkatkan perputaran uang di desa secara signifikan. Gibran mengaku mengetahui hal tersebut berdasarkan arahan yang disampaikan Prabowo saat menyampaikan daftar isian pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis.

"Beliau menyampaikan bahwa yang namanya makan bergizi gratis ini sangat strategis karena meningkatkan perputaran uang mencapai Rp8 miliar per desa per tahun. Jadi luar biasa sekali," ujarnya.



lah sekolah.

"Ini tanggapannya luar biasa sekali, dan yang paling mendukung, paling support program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya," kata Gibran dalam pembukaan Konferensi Besar (Konbes) 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Aryaduta,

Tak hanya itu, Gibran kemudian curhat sempat diujani pertanyaan oleh masyarakat terkait waktu pelaksanaan makan bergizi gratis bahkan sebelum dilantik.

"Ini kapan mas makan siang gratisnya? (padahal) belum dilantik. Tapi tahun depan Insya Allah ini akan berjalan," ujar

dia.

Adapun besaran biaya makan bergizi gratis sempat mencapai Rp15 ribu per porsi. Namun, setelah beberapa kali uji coba, Presiden Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.

Meski begitu, Gibran juga tak luput dari sorotan publik dari banyaknya kegiatan yang dilakukan sebagai orang nomor dua di RI.

Sebagai contoh, pemberian bantuan sosial yang disalurkan oleh Gibran di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada 28 November 2024, menarik perhatian publik karena ada tas berlogo Istana Wakil Presiden yang bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran".

Bantuan yang disalurkan tersebut berupa sembako, termasuk beras, teh, gula, biskuit, minyak, dan susu untuk balita. Salah seorang warga pengungsi mengungkapkan bahwa selain sembako, Gibran juga membagikan susu kepada anak-anak dan balita yang berada di pengungsian.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan pemberian bansos bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran". Dia menekankan bahwa yang terpenting adalah manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Gus Ipul, siapa pun yang memberikan bansos tidak masalah karena itu adalah bantuan yang berasal dari pemerintah.

"Ya menurut saya tidak ada masalah ya. Semua tahu lah program pemerintah atau dari pihak swasta kan semua tahu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang penting manfaatnya itu yang utama. Untuk masyarakat yang penting," ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa bansos dapat diberikan oleh siapa saja, baik oleh kementerian maupun pihak lainnya, selama itu berasal dari anggaran pemerintah. "Ya bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja, itu kan bansosnya pemerintah. Gitu saja. Dari Kemensos (Kementerian Sosial) juga ada, dari kementerian yang lain juga ada," katanya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, penjelasan, tidak ada masalah dengan bantuan yang disalurkan oleh Gibran karena menggunakan

anggaran operasional wapres yang memang diperuntukkan untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat. "Bantuan Mas Wapres kan enggak apa-apa. Wakil Presiden kan punya biaya operasional. Beliau bisa gunakan itu untuk bantuan kesejahteraan," kata Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Hasan menegaskan, anggaran operasional yang dimiliki Wapres dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan tugasnya dalam mendukung kesejahteraan rakyat. "Beliau punya biaya operasional. Biaya operasional itu bisa beliau gunakan untuk bantuan masyarakat," ujar Hasan.

The Next President

Pada 14 Juni 2024, publik sempat dibuat heboh dengan peluncuran buku berjudul "Gibran The Next President" di Solo. Peluncuran buku karya Ahmad Bahar itu berlangsung di sebuah kafe Anak Panah Kopi Bizz, Banjarsari, Solo.

Peluncuran buku ini dihadiri belasan orang. Mereka juga meneriakkan yel-yel Gibran The Next Presiden oleh belasan orang tersebut. Mereka yang datang memuji-muji prestasi Gibran selama memimpin Kota Solo.

Sang pengarang buku, Bahar, membantah buku tersebut bermuatan politik. Menurutnya, buku itu menyoroti Gibran sebagai fenomena budaya.

"Prinsipnya kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa buku yang kami tulis sebenarnya buku yang terkait dengan budaya," kata Bahar kepada wartawan.

Bahar mengaku tidak ada tendensi politik dalam memilih judul "Gibran The Next President". Judul tersebut dipilih sekadar menarik minat pembaca bukan bernuansa politik.

"Judul buku memang harus genit. Kalau nggak genit susah lakunya. Tapi sekali lagi kita cuma bicara budaya. Saya bukan orang politik. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tidak dibayar siapa-siapa," ucapnya.

Bahar mengaku banyak menulis tentang tokoh nasional. Banyak bukunya yang meramalkan siapa Presiden RI berikutnya.

"Hampir lima presiden saya prediksi,

dan Alhamdulillah semua benar," ujarnya.

Politik Luar Negeri Prabowo

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto tak kalah gesit dengan langsung tancap gas. Belum sebulan dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo langsung melakukan lawatan ke luar negeri secara maraton selama 16 hari di awal November 2024.

Seolah berburu kepentingan bilateral di empat negara—China, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab (UEA)—

gat berbeda dari presiden sebelumnya bagi lensa dan perspektif politik China," kata Guru Besar Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito.

Jika Jokowi, di masa jabatan pertama, amat jelas bagian dari barisan Soekarnoisme yang sangat dihormati di China, maka China perlu lensa superskeptik untuk memahami model kepemimpinan Prabowo, sebagai salah satu tokoh Orde Baru yang sangat anti-China.

Kenyataannya, di semua jamuan kenegaraan di China, Prabowo mampu



sekaligus urusan multilateral di KTT APEC (Peru) dan KTT G20 (Brasil). Bukan suatu kebetulan jika urutan negara yang dikunjungi dimulai dari China. Selain karena dekat secara geografis, China juga memang negara yang belakangan (di era Presiden Joko Widodo) merupakan "tulang punggung" pembangunan di Indonesia.

"Walau demikian, profil Prabowo san-

mengorkestrasi semua peluang hingga memperoleh kesepakatan investasi di berbagai bidang senilai sekitar Rp160 triliun.

Kepribadian yang "semringah" didukung kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin memadai membuat semua peluang seolah mudah dikunyah. Maklum, Prabowo pernah mengenyam pendidikan SD di Hong Kong sekitar dua

tahun selama ikut orangtuanya hidup di pelarian di era Orde Lama.

Di sisi lain, keceriaan Prabowo dalam bermandarin-ria rupanya dimanfaatkan pihak China untuk “menyelipkan” beberapa kosakata dalam pernyataan bersama (joint statement) yang belakangan menjadi bahan sorotan berbagai pihak.

Pada satu pasal dalam pernyataan itu tersurat bahwa RI bersepakat akan melakukan kolaborasi joint development di wilayah yang tumpang tindih antara RRC dan RI. Secara tersirat, China ingin mendapatkan legitimasi RI terkait sebagian wilayah yang mereka klaim dengan sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan (kini menjadi 10 garis putus-putus).

“Padahal, menurut kita, dari perspektif

Tafsir kalimat tersurat boleh dan bisa “dilipat sedemikian rupa” sesuai kepentingan yang memaknainya. Dalam konteks ini rupanya Prabowo ingin mere-definisi prinsip politik luar negeri RI yang bebas aktif. Dari yang semula dimaknai sebagai eksklusif, dianggap harus menjauhi dua karang; disesuaikan ke arah inklusif, menjadi melangkah di antara dua karang.

“Apa pun pemikiran kita terhadap China, kita perlu berlaku kolaboratif, apalagi dengan komitmen investasi Rp160 triliun dan kesepakatan bantuan untuk penyediaan makan siang gratis selama lima tahun ke depan,” terangnya.

Walau diplomasi merupakan pangung “bersilat lidah”, setiap diplomat tahu dan menyadari indikasi sifat ini.



mana pun wilayah klaim tumpang tindih itu tidak ada. Persoalannya, China sudah mengantongi pernyataan resmi walau Presiden Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa untuk yang berurusan dengan kedaulatan tak ada kompromi.”

Maksudnya, kedaulatan negara harus menjadi prioritas. Kesepakatan bersama itu poin utamanya adalah kesepakatan bekerja sama (bukan bersaing, apalagi berkonfrontasi).

Sejauh ini belum ada klarifikasi memuaskan dari Kementerian Luar Negeri terkait overlapping claim ini. Bagi diplomat, dalam hal lawatan luar negeri ini, Presiden Prabowo adalah diplomat. Bahkan, beberapa kalangan melihat di lawatan kali ini Prabowo tak hanya berperan sebagai presiden, tetapi juga sebagai menlu.

Pragmatisme Indonesia pada lawatan ke China ini wajar dan masuk akal bagi kepentingan Indonesia, tetapi tidak demikian dengan kacamata AS sebagai negara tujuan berikutnya dari lawatan besar ini.

Apalagi, sebentar lagi AS dipimpin kembali oleh Trump yang proteksionis. Rupanya, Prabowo menyadari, penampilannya di China cenderung membuat kecemburuan pada AS. Maklum, AS dan China dalam kondisi perang dagang. Yang dilakukan oleh Prabowo adalah lebih dulu menelepon Trump (sebelum bertemu Joe Biden), menyampaikan selamat atas terpilihnya kembali sebagai presiden AS.

“Dan, yang paling penting adalah kesempatan untuk menyampaikan bahwa dirinya merupakan presiden terpilih RI

didikan Amerika. Maklum, Prabowo salah satu tokoh penting di zaman Orde Baru ketika Indonesia menjadi tulang punggung AS di Asia Tenggara dalam politik luar negeri (containment policy) melawan komunis di Asia,” kata dia.

Reputasi militer Prabowo mereknya adalah Amerika, bukan China, bukan juga Rusia. Dalam hal ini, ia seperti ingin menyatakan bahwa China is OK, apalagi Amerika. Itulah sebabnya, AS bahkan menyepakati investasi senilai Rp318 triliun, hampir dua kali lipat dari jumlah yang didapat dari China.

Seolah-olah AS lupa atas kekecewaannya lantaran dua minggu sebelumnya Menlu Sugiono menghadiri KTT BRICS dan menyatakan RI ingin menjadi negara mitra BRICS yang anti-dollar AS



Ini tanggapannya luar biasa sekali, dan yang paling mendukung, paling support program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya.

itu. Politik bebas aktif makin jelas berbentuk pragmatis daripada paranoia terhadap kompetisi.

Dua langkah cerdas di lawatan dua negara pertama yang sedang bersaing sengit itu memudahkan orkestrasi pada kunjungan di negara berikutnya. Di KTT G20 Brasil, di samping turut memanfaatkan tema utama dalam menciptakan dunia yang adil dan berkesinambungan, delegasi RI juga memperoleh kesepakatan investasi multilateral sebesar Rp44 triliun.

Di KTT APEC yang diikuti 22 negara itu, delegasi berhasil mengamankan 70 persen keberlangsungan ekspor ke negara-negara APEC. Selanjutnya, di Inggris mendapat komitmen Rp135 triliun, dari UEA mendapat jaminan hubungan baik seperti yang terjadi selama ini.

“Semoga politik luar negeri bebas aktif ini segera direkonstruksi lebih jelas dengan rencana aksi yang lebih operasional dan strategis,” imbuhnya.

Tiru Jokowi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai langkah blusukan Gibran tidak jauh beda, bahkan mirip dengan ayahnya, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Ini kan mirip Jokowi banget gitu untuk menunjukkan keberpihakan dan pekerjaannya adalah sesuatu yang tampak bersentuhan langsung dengan rakyat,” kata Adi, Kamis, 12 Desember 2024.

Adi berpandangan gaya blusukan Gibran dilakukan untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa bekerja sebagai RI 2.

“Kalau kita melihat style politik wapres yang sekarang kan cuma kelihatan bisanya blusukan, ya untuk menunjukan bisa bekerja, untuk menunjukan keberpihakannya kepada rakyat. Hanya dengan cara itu wapres itu menunjukkan kinerja dan persepsi publik bahwa wapres dekat dengan rakyat,” terang Adi.

Menurutnya, seharusnya Gibran tidak hanya bisa melakukan blusukan. Melainkan harus sekaligus memberikan solusi dari setiap kunjungan yang dilakukan. Sebab, menjadi percuma bila Gibran hanya blusukan tetapi permasalahan tak kunjung terselesaikan.

“Ya kalau cuma berkunjung dari satu tempat ke tempat lain nggak ada solusi ya sama halnya publik berharap mending nggak usah berkunjung. Yang selanjutnya memang publik juga melihat lalu apa fungsinya Lapor Mas Wapres kalau blusukannya masih kenceng gitu lho,” kata Adi.

Akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, juga menyoroti gaya blusukan Gibran yang mirip dengan sang ayah, Jokowi.

Salah satu yang disoroti Rocky adalah momen Gibran meninggalkan Akademi Militer Magelang terlebih dahulu dan meninggalkan Prabowo. Tanpa ada momen urgent dan semacamnya, Gibran rupanya meninggalkan Akmil terlebih dahulu lantaran blusukan ke Pasar.

Gibran diketahui membagikan sembako kepada masyarakat sekitar Magelang, dan blusukan ke Pasar Gotong Royong wilayah Tidar Selatan, Kecama-

tan Magelang.

“Bukannya wakil presiden harus terlibat secara total di dalam pembekalan Menteri-menteri, karena beliau juga punya potensi untuk menggantikan presiden bila presiden berhalangan. Jadi kurikulum pembekalan itu juga harus dipahami secara detil, bahkan oleh wakil presiden,” Ujar Rocky dikutip dari kanal youtube Rocky Gerung Official, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurut Rocky, kemungkinan besar

oleh banyak orang.

“Jadi memang ada kamera yang melekat pada Wakil Presiden untuk memungkinkan setiap saat wakil presiden bisa mengeksploitasi suasana supaya dia diingat terus. Nah, ini kita anggap kok bisa ya pencitraan itu diwariskan, DNA-nya kok sama ya, antara Wakil Presiden dengan mantan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Rocky juga menyoroti blusukan Gibran ke lokasi banjir di Kebon Pala, Jakarta



aktivitas yang dilakukan di Akmil belum dikuasai oleh Gibran secara keseluruhan, sehingga ia merasa bosan berada di Lokasi. Belum lagi dengan isu-isu setumpuk mulai dari Fufufafa, hingga dinasti politik yang terus mengerubungi pikirannya, membuat dirinya ingin melampiaskannya dengan kegiatan yang lain.

Rocky sontak mengatakan bahwa hal ini membuktikan jika memang ada keinginan besar yang melekat dalam diri Gibran agar dirinya bisa tetap diingat

Timur, yang membawa sembako dengan logo Istana Wakil Presiden. Rocky menilai langkah Gibran sebagai strategi pencitraan untuk Pilpres 2029 yang meniru gaya politik Jokowi. Menurutnya, membagi-bagikan sembako bukanlah tugas seorang Wakil Presiden, melainkan tugas pemimpin lokal seperti Ketua RT.

“Tugas Wapres itu memantau pembangunan dan kinerja menteri, bukan turun langsung membagi-bagikan sembako. Kalau begini, apa bedanya dengan Ketua RT?” ujar Rocky. •



OPTIMISTIS PERTAHANKAN SWASEMBADA PANGAN

Sumatera Selatan optimistis mempertahankan swasembada pangan. Melalui Optimalisasi Lahan Sawah (Opla) dan Cetak Sawah 2024-2025, Sumsel siap mendukung peningkatan swasembada dan lumbung pangan nasional. Apalagi, saat ini Sumsel masuk daerah penghasil pangan terbesar kelima di Indonesia.

Pj Gubernur Elen Setiadi menyambut Opla dan cetak sawah sebagai salah satu cara mendukung majunya sektor pertanian di Sumsel. Dimana dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi Sumsel terus mengalami peningkatan bahkan saat ini masuk 5 besar nasional sebagai daerah lumbung pangan nasional bahkan terbesar di Pulau Sumatera.

"Suatu kerohanian bagi Sumsel yang mempunyai potensi besar bidang pertanian. Hal ini menjadi perhatian kami bahwa produksi berbasis pertanian dapat meningkat jika dikelola dengan baik dan membuat daerah Sumsel kian maju," katanya saat

menggelar rapat bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia (RI) Sudaryono

Elen menilai Opla dan cetak sawah memberikan dua manfaat sekaligus bagi Sumsel. Antara lain untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan juga untuk aspek pencegahan kebakaran hutan.

"Alhamdulillah beberapa bulan terakhir inflasi pada komoditas beras dapat diatasi, dimana harus diperlukan hilirisasi agar kedepan tidak menjadi persoalan inflasi," imbuhnya.

Elen mengajak semua pemangku kepentingan berkomitmen dalam mewujudkan Sumsel sebagai lumbung pangan sekaligus penyumbang

pangan nasional melalui berbagai terobosan dalam meningkatkan produksi padi dan mensejahterakan masyarakat.

"Untuk dapat tercapainya sasaran produksi ini, dibutuhkan upaya konkrit seperti pembaharuan data lahan baku sawah dan pengembangan lahan pasang surut tanah mineral dan rawa lebak tanah mineral di Provinsi Sumatera melalui kegiatan optimasi lahan rawa dan cetak sawah rakyat (CSR)," tandasnya.

Sementara itu Wamentan Sudaryono mengungkapkan kunjungan kerjanya ke Sumsel untuk melakukan kick off optimalisasi lahan sawah dan cetak Sawah di Provinsi Sumsel yang ditar-

get 106.000 hektar untuk lahan rawa dan untuk cetak sawah baru seluas 150.000 hektare.

"Semua unsur harus terlibat, kita meyakini bahwa Sumsel ini bisa menjadi lumbung pangan nomor 1 di Indonesia jika dilihat potensi yang sangat besar," ujarnya.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi, Suwandi, mengatakan sebanyak 250 peserta yang hadir dalam rapat peningkatan swasembada pangan sekaligus sebagai evaluasi opla sebelumnya.

"Semua bergerak untuk mendukung program ini. Kami meyakini bahwa ini akan berhasil jika melihat produksi sebelumnya pada kondisi el nino Sumsel tetap stabil," ucapnya.

Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Husnain laporan target cetak sawah di Sumsel meliputi 350.00 hektare sedangkan potensi lahan yang dimiliki 409.977 hektare tersebar di 17 Kab/ Kota.

"Lokasi Cetak Sawah di Sumsel ada 5 kabupaten diantaranya Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir dengan total luasan 150.000 Hektare," pungkasnya.

Pastikan Stok Pangan Aman Saat Nataru

Pj Gubernur Elen Setiadi juga memastikan ketersediaan stok pangan di Sumsel aman menjelang momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Untuk memastikan stok pangan di Sumsel dalam keadaan aman pihaknya menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan di Sumsel, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder.

Dalam rakor tersebut, Elen Setiadi menyampaikan bahwa perlu mitigasi untuk kebutuhan pangan jangka panjang dalam mengantisipasi terjadinya inflasi di akhir tahun yang dipicu oleh komoditi beras, minyak goreng, ayam dan telur.

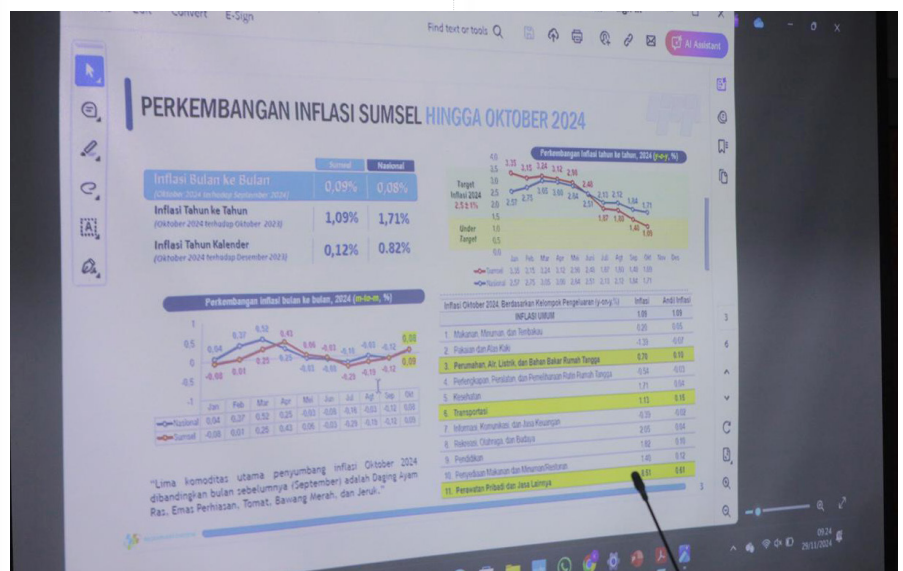
"Hari ini kita perlu menghitung stok dan kebutuhan. Pastikan selalu untuk menghitung antara stok yang ada dan kebutuhan masyarakat, sehingga

bisa diketahui berapa banyak pangan yang dibutuhkan. Penyebab inflasi yang terjadi di bulan Januari 2024 atau tren pada bulan Desember 2023 bisa menjadi acuan, sehingga kita bisa antisipasi jika terjadi kenaikan harga pangan”, katanya.

Dimana berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Sumsel, beras medi-

ediaan BBM dan listrik di Sumsel tergolong aman.

Begitu juga dengan antisipasi dampak musim penghujan ini perlu diwaspadai mengingat BMKG Sumsel mempredisikan puncak hujan di Sumsel diperkirakan akan terjadi selama bulan November, Desember dan Januari, dengan kemungkinan ada



um mengalami kenaikan harga, jenis beras premium berada pada harga Rp. 14.149/ kg dan HET Rp. 14.900/ kg.

"Sedangkanantisipasi kelangkaan minyak curah. Pemprov Sumsel akan mengadakan gerakan pasar murah pada tanggal 4 Desember 2024 mendatang," jelasnya.

Selain memastikan ketersediaan pangan, Elen juga memastikan ketersediaan BBM dan kesiagaan listrik di Sumsel, di mana hingga saat ini kes-

potensi banjir, yang dapat ditanggulangi dengan pembersihan drainase dan pompa air.

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto menjelaskan sampai bulan Oktober capaian inflasi year on year di Sumsel sebesar 1,09 %, di bawah angka nasional 1,71 %. Inflasi year to date sebesar 0,12%, sementara angka nasional 0,82%.

"Inflasi di Sumsel sudah diupayakan untuk terus kita kendalikan setiap bulannya," ujar Wahyu. ●

Calender of Event 2025

TINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN

Sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Sumatera Selatan tahun depan, Penjabat Gubernur Elen Setiadi meluncurkan Calender Of Event 2025.

Calender Of Event 2025 merupakan kesempatan untuk meningkatkan seni dan kebudayaan serta terus menggali potensi pariwisata yang ada di Sumsel sehingga dapat dikenal baik dalam negeri hingga mancanegara.

"Pariwisata adalah multiplier efeknya paling tinggi, pariwisata lah yang paling

dikembangkan. Oleh karena itu para kepala daerah Kabupaten/kota harus benar-benar melaksanakan event yang memiliki dampak ekonomi dengan baik.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto, merinci sampai saat ini Provinsi Sumsel memiliki 1.072 buah

Kemudian wisata Air Terjun Temam Lubuk Linggau, Danau Ulak Lia Muba dan Danau Shuji di Kabupaten Muara Enim.

"Untuk event sendiri, Sumsel memiliki 2 event nasional yang masuk dalam karisma Event Nusantara Kemenparekraf RI yaitu Festival Sriwijaya dan Festival Bidar Tradisional dan tahun



banyak nilai tambah ekonomi secara langsung kepada masyarakat misalnya festival jazz kita adakan disitu ada Hotel yang penuh, ada mobil yang dipakai sehingga ekonomi secara langsung meningkat," ungkapnya.

Menurut Elen Setiadi, selain Sumber Daya Alam (SDA) yang digali potensinya, bidang pariwisata juga harus

daya tarik wisata yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

Setidaknya ada 7 daerah yang menjadi destinasi wisata unggulan yaitu kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) Kota Palembang, Danau Ranau di Kabupaten OKU Selatan, Goa Putri di Kabupaten OKU, Gunung Dempo di Kota Pagar Alam.

2025 ini ada sebanyak 271 event dimana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 194 event," paparnya.

Dalam launching Calender Of Event Tahun 2025 dimeriahkan dengan penampilan artis ibukota salah satunya Ifan Seventeen.

"Bahkan toko-toko SRC juga menye-

diadakan wadah bagi produk UMKM di sekitar mereka. Hal ini tak lain agar SRC dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia,” tandasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel, Dra. Hj. Neng Muhaiba, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Ir. H. Amiruddin, Direktur PT SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, Komisaris Indonesia Financial Group (IFG), Nasrudin, Kepala Urusan External PT. HM Sampoerna Tbk, Arief Triastika, Tias Gatra

Optimis Tingkatkan Pariwisata dan Perekonomian Sumsel

Salah satu upaya untuk meningkatkan pariwisata ini adalah dengan memperbanyak kegiatan yang bersifat hiburan. Salah satunya kegiatan Festival Jazz Internasional Suara Musi 2024 yang diadakan Pemkot Palembang dan dipusatkan di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang.

Pj Gubernur Elen Setiadi berharap adanya event seperti ini dapat memberikan dampak luas terutama bagi perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang dan Sumsel.

Ia mengatakan latar belakang Sungai Musi dan Jembatan Ampera yang megah, serta penyelenggaraan festival musik bertaraf internasional ini menjadi sarana promosi pariwisata yang efektif dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Karena itulah kami Pemprov mendukung sepenuhnya event-event baik skala nasional maupun internasional seperti Festival Jazz Suara Musi 2024,” ujarnya saat menghadiri festival jazz.

Festival itu juga dikatakannya merupakan momentum bersejarah bagi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang.

Sebab, untuk pertama kalinya, Palembang menjadi tuan rumah bagi festival jazz internasional yang menghadirkan musisi-musisi ternama dari berbagai negara, seperti Belanda, Amerika Seri-

kat, Kuba, Australia, Jepang, Singapura, dan tentunya musisi kita, dari Indonesia.

“Musik jazz memiliki daya tarik universal yang mampu menjembatani perbedaan budaya dan bahasa. Melalui musik jazz, kita dapat membangun harmoni dan mempererat persaudaraan antar bangsa. Festival Jazz Internasional Suara Musi ini juga bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi juga memiliki dampak positif bagi perekonomian dan sosial budaya masyarakat Sumatera Selatan,” papar Elen.

Sementara itu Pj Walikota Palembang yang baru Dr. Cheka Virgowan-syah mengatakan salah satu targetnya memimpin Kota Palembang adalah meningkatkan Indeks Kebahagiaan warga Kota Palembang yang juga merupakan kampung halamannya.

“Salah satu cara membuat warga bahagia adalah dengan membuat mereka senang. Makanya Saya ber-

terimakasih sekali kepada Pj Walikota sebelumnya yang telah menginisiasi Festival malam ini sehingga malam ini masyarakat Kota Palembang merasakan kebahagiaan,” ujarnya.

Menurut Cheka ia juga akan berkomitmen meneruskan penyelenggaraan event-event serupa di pinggir Sungai Musi agar para tamu yang datang bisa langsung melihat keindahan Sungai Musi.

“Ini akan kita upayakan karena selain menarik pengunjung yang datang ke sini, akan berdampak juga pada UMKM, dan lainnya sehingga PDRB bisa meningkat,” papar Cheka.

Adapun Festival Jazz tersebut dibuka dengan pertunjukan Teatrikal Musi Dalam Lintasan History. Dilanjutkan dengan Penyerahan Road Map Musi dan DED BKB dilanjutkan dengan penampilan Musisi Jazz ternama tanah air di antaranya Imaniar, Fariz RM dan penyanyi muda Marion Jola. ●



PENJABAT GUBERNUR TERBAIK KEDUA DI INDONESIA

Enam bulan memimpin Sumatera Selatan, Elen Setiadi menjadi Penjabat Gubernur terbaik kedua se-Indonesia yang diumumkan langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

"Setelah kita evaluasi, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menjadi salah satu penjabat gubernur kepala daerah terbaik," ujar Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Dari data yang ditampilkan, terdapat lima kepala daerah yang termasuk dalam kategori atau predikat baik. Di antaranya terbaik I Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh dengan nilai 85 (baik), terbaik II Pj Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi dengan nilai 84 (baik).

Terbaik III Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dengan 83 (baik) di urutan ke IV ada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dengan nilai 81,60 (baik) dan terbaik V Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dengan nilai 80,68 (baik).

Lima kepala daerah tersebut dengan nilai 80 keatas masuk dalam kategori atau predikat baik. Sedangkan urutan ke enam sampai urutan 23 masuk kategori cukup dengan range nilai 79-74.

Sebelumnya saat evaluasi saat melakukan kegiatan Evaluasi Kinerja Penjabat Gubernur Sumsel, di Gedung Inspektorat (Irjen) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/09/2024), Elen mengungkapkan bahwa evaluator memberikan catatan positif atas kinerjanya menjadi Pj Gubernur Sumsel sejak akhir Juni 2024.

Bahkan menurut Elen Setiadi, paparan 10 indikatornya juga mendapatkan kesan positif dari evaluator atau penilai.

"Alhamdulillah para evaluator memberikan catatan positif dan apresiasi, tinggal kita sampaikan beberapa data yang masih diperlukan mereka tetapi beberapa teknis sudah kita lakukan



dan mereka apresiasi kemajuan yang ada di Sumsel,” ujarnya.

Selain lima Kepala Daerah yang mendapatkan predikat baik, dalam pengarahan tersebut juga disebutkan lima Pj Gubernur dengan predikat CUKUP di antaranya, yaitu di urutan ke VI Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dengan nilai 79,69 (cukup)

Urutan VII Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dengan nilai 79,09 (cukup), urutan VIII Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dengan nilai 78,25 (cukup). Sementara urutan IX Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin dengan nilai 78,25 (cukup) dan posisi ke X Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dengan nilai 77,81 dengan kategori cukup.

Dapat Pujian dari Presiden Prabowo

Sementara Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara terang-terangan memuji program pengendalian inflasi yang dilakukan Elen Setiadi. Pujian tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 diselenggarakan Kemendagri secara virtual.

“Tadi juga dari Provinsi Sumatera Selatan ya, bagus itu langkah langkahnya yang mereka ambil (Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel). Nanti Saya minta print out dari langkah-langkah yang mereka ambil. Saya kira gerakan serentak itu benar dan saya kira ini sesuatu yang baik dan sesuai arah besar kita gerakan tanam serentak,” ujar Presiden Prabowo menanggapi paparan singkat Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Selain mengapresiasi langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Sumsel, Presiden Prabowo juga memberikan beberapa arahan dalam Rakor tersebut.

Prabowo mengingatkan agar semua Kementerian dan Lembaga juga pemerinta daerah fokus pada pengendalian inflasi dan peningkatan produksi. Serta menekankan pentingnya mewujudkan swasembada pangan

nasional.

“Swasembada pangan dalam arti yang luas dalam arti yang menyeluruh. artinya kita swasembada secara nasional iya. Tapi kita juga harus swasembada secara besar kita juga harus swasembada secara kabupaten bahkan di tiap kecamatan. ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita dari dulu. Kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Jadi inilah strategi besar kita apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau sedang itu nanti tergantung upaya kita,” jelas Presiden Prabowo.

Sementara itu Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam paparan singkatnya menjelaskan bahwa selain

Goes to School dan Office. Operasi pasar murah (OPM) Serentak secara rutin yang bersinergi dengan BUMN/ BUMD, swasta, perbankan, TNI, Polri, (Subsidi harga ongkos dan lainnya).

Selain itu bekerjasama dengan Bulog Kanwil Sumsel dan Koperasi di 17 Kabupaten/Kota sebagai Penyaluran/Distribusi Beras Program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan Komoditi Pangan Lainnya. Peningkat Peran, Bulog dalam penyediaan beras untuk ASN di Sumsel (Kerjasama Provinsi dan Kab/Kota dengan Bulog).

“Kita juga memantau harga dan stok, melakukan dukungan penyediaan pangan oleh Polda Sumsel dan Kodam



dapat mengendalikan inflasi, Provinsi Sumsel juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengendalikan inflasi, Pemprov Sumsel menurutnya melakukan berbagai langkah melalui Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel. Gerakan ini menitikberatkan pada penguatan pasokan dan distribusi bahan pangan.

Penguatan tersebut dilakukan dengan Gerakan Tanam (Gertam) Cabai dan Bawang Merah Serentak se-Sumsel di 45 titik di 17 kabupaten/kota. Perjanjian Kerjasama (PKS) Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kerjasama dengan daerah penghasil. Penguatan Ketersediaan Pasokan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)

II Sriwijaya dengan pemanfaatan lahan Polda dan Kodam II Sriwijaya. Melakukan peningkatan lahan sawah serta sidak pasar dan gudang,” jelasnya.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian. Dalam kesempatan itu Mendagri Tito Karnavian juga mengatakan, selain membahas perkembangan inflasi daerah, rapat tersebut membahas arahan kebijakan Upah Minimum tahun 2025.

Dimana sebelumnya sudah dilakukan Ratas dengan Presiden agar difollow up oleh para kepala daerah sesuai dengan aturan daerah masing-masing untuk keperluan keseimbangan antara pengusaha dan para buruh. •

BERSINERGI DUKUNG PERCEPATAN KETAHANAN PANGAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama TNI dan Polri bersinergi melakukan program percepatan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni launching Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan Serentak se-Indonesia di lahan produktif ketahanan pangan Komplek Pakri Palembang yang dihadiri langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi.

Launching ini dilakukan serentak se-Indonesia oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Peluncuran atau launching Gugus Tugas Polri ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Gugus Tugas

Polri ini nantinya akan melaksanakan sejumlah program berkaitan dengan pangan yang mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Usai mengikuti video conference dan menanam bibit jagung, cabai, terong, melon dan semangka ditanam di lahan tersebut.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan Sumsel sepakat mendukung percepatan ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah pusat.

"Kami di Sumsel juga bersepakat untuk mempercepat program ini di Sumsel. Beberapa hal yang kami sepakati adalah percepatan untuk ketahanan pangan dengan Program Lahan Sawah Rawa

dan ini sedang dipersiapkan oleh Dinas terkait untuk dikoordinasikan juga dengan Kementan," jelas Elen Setiadi didampingi Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi dan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, Danrem/044 Gapo Brigjen TNI Mohamad Thohir, serta Forkopimda lainnya dengan melakukan penanaman berbagai bibit di lahan produktif ketahanan pangan Komplek Pakri seluas 1500 meter persegi.

Dengan program itu Elen optimis Sumsel dapat semakin memperkuat percepatan ketahanan pangan dan meningkatkan lahan pangan yang sudah ada atau peningkatan oplah.

"Saat ini jumlahnya sedang dihitung



kembali tapi untuk lahan baru paling tidak sekitar 150 ribu hektare. Kita juga mengajak pihak swasta investasi di bidang sawah ini dan mengajak swasta membawa teknologi baru juga bekerja sama seperti di perkebunan ada namanya plasma ada inti dan konsep ini segerakan dalam waktu dekat,” jelas Elen Setiadi.

Sejauh ini kata Elen, Pemprov Sumsel sudah menyelesaikan tahap identifikasi dan telah menyediakan penyiapan beberapa lahan.

“Untuk akhir 2024 dengan program yang ada sudah mulai dijalankan. Insya Allah nanti awal Desember kita bersama Kapolda, Panglima dan Forkopimda akan melakukan pembukaan lahan sawah rawa itu,” tambah Elen.

Inisiasi Urban Farming

Upaya yang sama juga dilakukan Kodam II Sriwijaya dengan menginisiasi urban farming dalam rangka mendukung program pemerintah salah satunya ketahanan pangan dan makan siang bergizi.

Atas inisiasi ini Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi mengungkapkan sejumlah strategi telah dilakukan pihaknya untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal diantaranya melalui program khusus optimalisasi lahan sawah rawa.

“Sumatera Selatan begitu banyak anugerah alamnya. Semua upaya kita lakukan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan di provinsi yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” katanya saat meninjau langsung Kebun Ketahanan Pangan pendukung dapur sehat Kodam II/Sriwijaya berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Kalidoni Palembang.

Lebih lanjut Pj Gubernur Elen Setiadi mengapresiasi langkah Kodam II/ Sriwijaya membuat kebun ketahanan pangan dengan bentuk pertanian perkotaan/ urban farming. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan lokal

“Melalui program seperti ini kita yakin pertumbuhan ekonomi kita bisa diatas nasional,” ungkapnya.

Sementara Panglima Kodam (Pangdam)/ II Sriwijaya Mayjen TNI M.Naudi Nurdika, mengatakan Inisiasi Urban Farming Aspirasi merupakan akses sarana pompanisasi dan pipanisasi instalasi air bersih) dalam rangka mendukung pro-

gram pemerintah salah satunya ketahanan pangan dan makan siang bergizi.

“Kita membuat miniatur disini menyediakan, dan ini salah satu contoh supaya bisa menginspirasi juga baik untuk masyarakat maupun siapa saja. Harapannya masyarakat kecil bisa ikut andil mendukung program makan siang

bergizi tersebut,” tambahnya.

Untuk diketahui Kebun ketahanan pangan pendukung dapur sehat Kodam II/ Sriwijaya merupakan upaya TNI dalam mewujudkan makan siang bergizi yang secara bersama-sama, berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif. •





KINERJA ELEN SETIADI DIAPRESIASI DPR RI

Komisi VIII DPR memberikan apresiasi atas kinerja Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi.

Atas apresiasi tersebut Elen Setiadi menyampaikan ucapan selamat datang dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di Provinsi Sumatera Selatan.

Elen menjelaskan tentang potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang positif berada di kisaran 5% berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2024 mencapai 5,04%.

"Provinsi Sumatera Selatan terus

menunjukkan kemajuan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi besar dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, berada di kisaran 5% dan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2024 mencapai 5,04%," jelas Elen Setiadi.

Elen juga menambahkan Inflasi di Sumatera Selatan terkendali, di tingkat provinsi sebesar 0,73% (yoy), di bawah angka inflasi nasional sebesar 1,55% di bulan November 2024. Indeks pembangunan manusia (IPM), Provinsi Sumatera Selatan mencapai 73,84, atau

tumbuh dari 73,18 di tahun 2023.

"Kita masih dihadapkan pada tugas besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yang berada pada angka 10,97% di tingkat provinsi. Meski demikian, kita telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0,59% di tingkat provinsi pada tahun 2024," ujarnya.

"Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut sudah di bawah angka nasional yaitu 0,83%, Kita juga perlu terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran, yang saat ini sebesar 3,86% di tingkat

provinsi per-Agustus tahun 2024.” tambah Elen.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri selaku Ketua Tim Komisi VIII DPR RI menyampaikan tujuan dari kunjungannya bersama anggota ke Provinsi Sumsel.

Menurutnya Kunker ini sama seperti rapat DPR RI yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengajak para mitra untuk bersama membahas kondisi dan masalah-masalah di daerah.

“Ini merupakan Rapat DPR RI yang di pindah di provinsi, oleh karena itu kita mengajak mitra kita untuk duduk bersama untuk mengetahui kondisi lapangan, kondisi di daerah, jika ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan, langsung bisa diselesaikan dan menjadi bahan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga,” jelas Fikri.

Dalam kesempatan tersebut tampak hadir beberapa mitra yang menyampaikan kondisi dan masalah seperti Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel, BPBD Provinsi Sumsel, PPPA Provinsi Sumsel dan BAZNAS Provinsi Sumsel.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh para Anggota Komisi VIII DPR RI, Sekretariat Komisi VIII DPR RI, Tenaga Ahli DPR RI, para Pejabat Kementerian Agama RI, para Pejabat Kementerian Sosial RI, Kementerian PPPA RI, BAZNAS RI, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan para kepala OPD di Lingkungan Pemprov Sumsel.

Tinjau Simulasi Program Makan Bergizi Gratis

Secara terpisah, Pj Gubernur Elen Setiadi, ikut mendampingi Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda beserta rombongan tim saat meninjau simulasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 2 Palembang.

Elen mengungkapkan MBG merupakan program pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tinggal menyiapkan teknis pelaksanaannya. Sementara untuk pelibatan dengan kantin sekolah masih harus dicari bagaimana caranya (solusinya).

“Jika nantinya dilakukan oleh pemda



maka APBD harus direvisi. Mudah-mudahan MBG yang akan dilaksanakan secara masif pada Januari 2025 sama dengan yang disimulasikan seperti hari ini. Pada dasarnya pemprov Sumsel siap dan mendukung program ini,” kata Elen.

Sementara M. Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan kehadiran pihaknya untuk memastikan bagaimana pemerintah daerah bisa melaksanakan program MBG.

Ia berharap jika pada pelaksanaannya nanti tidak ditemukan kendala, karena itu Kepala Sekolah bisa melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Begitu pula seterusnya Kepala Dinas Pendidikan dapat melaporkan kepada Gubernur atau dilaporkan secara berjenjang.

“Kehadiran kami untuk memantau langsung pelaksanaan MBG inisiasi

oleh pemerintah. Pengawasan terhadap kebijakan ini penting untuk memastikan program berjalan lancar,” ujarnya.

Sebagai informasi, MBG selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia dan meningkatkan kehadiran anak sekolah, program itu juga dirancang untuk menjadi salah satu katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab pemerintah akan belanja triliunan rupiah per hari untuk membeli produk pertanian, memasak, hingga mendistribusikan makanan dan susu gratis.

Sejumlah siswa SMK Negeri 2 Palembang mengaku senang atas adanya program MBG ini karena sangat bermanfaat bagi siswa, dan uang saku yang diberikan orangtua bisa ditabung. ●



Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen

KUASAI 32 DAERAH DI JATENG

Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah resmi mengumumkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen meraih suara terbanyak di Pilkada 2024.

Bahkan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini menguasai suara di 32 kabupaten dan kota di Jateng. Sementara tiga daerah sisanya dimenangkan oleh Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

Berdasarkan rapat pleno terbuka di kantor KPU Jateng hasil perhitungan Paslon 01, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendapat

7.830.084 suara. Sedangkan Paslon nomor 02, Luthfi-Yasin memperoleh 11.390.191 suara.

"Paslon 01 angkanya 7.830.084 suara. Untuk paslon 02 angkanya 11.390.191 suara. Unggul untuk paslon nomor urut 02," kata Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono, Sabtu (7/12/2024).

Komisioner KPU Jateng, Akmaliah menyebut total suara sah yang diperoleh kedua Paslon sebanyak 19.260.275 suara. Sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 1.528.502 suara.

"Secara sementara partisipasi lebih tinggi daripada pelaksanaan Pilgub sebelumnya, 2018 lalu. Kalau dulu angkanya 67 koma sekian persen, hari ini kita melihat partisipasi Pilgub Jateng 2024 lebih tinggi daripada yang sebelumnya," ujar Handi.

Hasil dari rapat rekapitulasi suara itu dituangkan dalam surat keputusan KPU Jateng yang kemudian diserahkan kepada kedua saksi Paslon dan Bawaslu Jateng.

Ketua Bawaslu Jateng, M. Amin mengatakan proses rekapitulasi Pilkada di Jateng mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi berjalan baik. Rapat berjalan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan karena memang sudah dilaku-

kan berjenjang sebelumnya.

"Secara administrasi, proses rekapitulasi dapat diselesaikan secara berjenjang," kata Amin.

Setelah dinyatakan sebagai pasangan dengan suara terbanyak di Pilkada Jateng 2024, Ahmad Luthfi mengaku bersyukur atas dukungan masyarakat. Bahkan dirinya menyebut bahwa ini adalah kemenangan rakyat, bukan kemenangannya pribadi.

"Ini adalah kemenangan rakyat, bukan kemenangan saya pribadi," kata Ahmad Luthfi di acara Rapat Pimpinan Wilayah (RPW) Fatayat NU Jateng yang digelar di Riyadi Palace Hotel, Solo, pada Minggu (8/12/2024).

Setelah penetapan pemenang, Luthfi berkomitmen untuk merangkul semua pihak, termasuk pasangan lawan dalam Pilgub. Menurutnya, rekonsiliasi pasca kontestasi sangat penting, ka-

rena pembangunan Jateng membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

"Kami akan menyerap ide-ide baik dari pasangan lain yang dapat memberikan manfaat bagi Jawa Tengah. Setelah ini, kita akan berkolabo-



rasi untuk membangun provinsi ini bersama-sama,” ujar Luthfi.

Rasa syukur juga disampaikan Calon Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen atas kemenangan yang diraih, dengan perolehan suara mencapai 59,14%.

Menurutnya, hasil ini adalah buah dari kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah. Ia berharap, dengan kemenangan ini, Jawa Tengah bisa menjadi provinsi yang semakin tangguh di masa depan.

“Alhamdulillah, kami telah meraih kemenangan. Doakan kami dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,” ujar Taj Yasin dalam acara Tasyukuran Santri Gayeng Nusantara.

Pasangan ini juga langsung membentuk tim transisi pemerintahan untuk mengawal pemerintahan agar visi misi Luthfi-Yasin strategis dan langsung bisa diaplikasikan ke masyarakat tanpa



**Ngopeni pesantren,
ngopeni pekerja,
Ngopeni UMKM, Ngo-
peni nelayan dan
petani serta Ngopeni
dengan hati.**

kendala.

Selain itu, harus ada sinergi antara provinsi dan kabupaten kota.

“Kami bentuk tim peralihan, baik dari parpol pengusung, relawan, civitas akademika untuk membahas program,” ungkap Luthfi.

Luthfi juga meminta para jajaran DPR untuk berkolaborasi menjadikan Jateng lebih baik lagi.

“DPRD dari partai kita, untuk memberikan perubahan dari Gerindra, membangun Jateng ora ngene-ngene wae, ora ngono-ngono wae, itu-itu saja, sanggup?,” serunya.

“Kita ubah Jawa Tengah jadi Sarang Garuda mulai hari ini,” sambunya.

“Menjadi Jateng menuju lebih bagus.”

“Ibaratnya kapal ini baru berangkat dari pelabuhan, kita tidak tahu di laut sana banyak ombak, dan gelombang

yang harus kita hadapi secara bersama-sama,” ulasnya.

Dia menekankan, pemerintah harus linear.

Dia mengajak seluruh kepala daerah terpilih di kabupaten/kota untuk berkolaborasi dan berintegrasi untuk melaksanakan program pemerintah pusat, khususnya di Jawa Tengah.

“Kolaborasi, integrasi pemerintah

“Saya kira kami dari Gerindra memberikan masukan kepada Pak Luthfi, apapun pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah menjadi prioritas, apakah itu stunting apakah itu kemiskinan,” kata Sudaryono usai Apel Kemenangan Pilkada Jawa Tengah di Semarang, Minggu (8/12/2024)

Selama ini, sambung Sudaryono, Jawa Tengah sering diejek atau diolok-



pusat, daerah, hingga desa harus kita laksanakan semaksimal mungkin,” ucapnya.

Dirinya bersama Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin akan melakukan penetrasi peralihan.

Bahkan, DPD Partai Gerindra Sudaryono mendukung Gubernur Jateng terpilih, Ahmad Luthfi untuk melakukan akselerasi program-program pengentasan kemiskinan dan stunting. Sebab, di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan serius yang harus segera diselesaikan.

olok sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa. Oleh sebab itu pihaknya ingin Jawa Tengah berubah menjadi lebih baik di bawah Gubernur Ahmad Luthfi.

“Jadi harus ada akselerasi, itu yang kita inginkan,” ungkapnya.

Dia mengapresiasi komitmen Ahmad Luthfi yang ingin memperbaiki Jawa Tengah yang selama ini pembangunannya dinilai stagnan.

“Tadi Pak Luthfi nyebut ngene-ngene wae (gini-gini saja), kita enggak mau ngene ngene wae (gini-gini saja) terus, pengennya ada perubahan ke

• INFO PROFIL

arah yang lebih baik,” jelasnya.

Dalam momen ini, pihaknya meminta kepala daerah untuk menyukseskan program Presiden Prabowo di daerah. Dia menyebut sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang membutuhkan akselerasi di daerah.

“Visi pengentasan kemiskinan, visi ketahanan pangan, hilirasi, kemudian bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja, dan seterusnya. Saya kira itu harus kita kawal, apalagi kepala daerah

tar pukul 22.13 WIB, dengan nomor perkara 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Identitas pemohon tercatat atas nama Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi, dengan kuasa hukum mereka Roy Jansen Siagian. Sementara itu, KPUD Jawa Tengah menjadi pihak termohon.

Dalam gugatannya, Andika-Hendi mengarah pada dugaan pelanggaran serius selama proses pemilihan.

Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menyatakan adanya indikasi mobilisasi

jalan lebih baik.

Diketahui, dalam pencalonannya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin mengusung visi-misi Ngopeni dan Ngelakoni di Jawa Tengah. Dalam menjalankan visi-misi itu paslon ini telah merancang 6 misi dan 50 rencana aksi.

“Kami merancang 6 misi dan 50 rencana aksi yang kami tuangkan dalam 11 komitmen,” kata Luthfi.

Hal itu kata dia dituangkan dalam 11 komitmen. Di antaranya membuat program subsidi pangan murah, kes-



ahnya adalah kader kita,” tandasnya.

Namun, setelah KPU Jateng mengumumkan kemenangan untuk pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) resmi mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu 11 Desember 2024.

Andika-Hendi mendaftarkan gugatan secara daring melalui situs MK sek-

aparatur negara, termasuk keterlibatan kepala desa dan aparat penegak hukum, dalam mendukung pasangan Luthfi-Yasin.

Tim Andika-Hendi berharap MK dapat memberikan keadilan dalam gugatan terkait pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah.

Selain itu, Ronny juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses hukum ini agar demokrasi di Jawa Tengah dapat ber-

ehatan dan pendidikan gratis, serta 8 program Ngopeni.

“Ngopeni pesantren, ngopeni pekerja, Ngopeni UMKM, Ngopeni nelayan dan petani serta Ngopeni dengan hati,” jelas dia.

Semua itu bisa terlaksana kata dia lewat tata kelola pemerintah baik dan bersih. Serta ditambah kepemimpinan masyarakat yang kuat dan bisa menyelesaikan masalah.

“Ngopeni adalah memberikan pelay-

anan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana dicontohkan oleh presiden ke 7 yaitu bapak Joko Widodo yang mendukung kami,” lanjutnya.

Sementara, Ngelakoni kata dia adalah bisa menyelesaikan masalah masyarakat, ada di tengah masyarakat, dan selalu tahu penderitaan masyarakat. Hal itu kata dia menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Taj Yasin menambahkan, jika visi misinya itu dibuat



berdasarkan pengalamannya. Dimana dirinya sejak 2019 telah banyak membangun program yang memberikan layanan kepada masyarakat.

“Tentu kami berharap semoga kami bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah, menyejahterahkan masyarakat,” ulasnya.

Perlu diketahui Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoena diusung Partai Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sosok Ahmad Luthfi cukup dikenal di kalangan masyarakat, pria kelahiran Surabaya 22 November 1966 ini dilantik menjadi Kapolda Jawa Tengah pada 8 Mei 2020 silam. Kala itu Ahmad Luthfi menggantikan Irjen Rycko Amelza Dahniel yang didapuk menjadi Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Ahmad Luthfi pernah menyelesaikan pendidikan kepolisiannya di Sepa (Sekolah Perwira) pada 1989 dan Selapa (Sekolah Lanjutan Perwira) 2000, selanjutnya pada 2005 Ahmad Luthfi menyelesaikan pendidikan Sespim (Sekolah Staf dan Pimpinan).

Pada 2015 pula, dia menjabat sebagai Kapolresta Surakarta dan menyelesaikan Lemhannas PPRA56 (Lembaga

putra dari ulama Nahdlatul Ulama (NU) Almarhum KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

Pria yang akrab disapa Taj Yasin ini dikenal sebagai mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Dia menjadi wakil dari Gubernur Jawa Tengah periode sebelumnya, Ganjar Pranowo.

Pria yang biasa disapa dengan panggilan Gus Yasin ini mulai berkiprah ke dunia politik dengan menjadi Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Sarang pada 2007-2009. Dia juga tercatat pernah menjadi Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah 2010-2012.

Alumnus Universitas Ahmad Kattaro ini bahkan pernah terpilih menjadi



Katahanan Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan) pada 2017 hingga menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2018.

Setelah itu, pada permulaan paruh kedua 2024, Ahmad Luthfi diangkat sebagai seorang Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.

Ahmad Luthfi juga telah mengundurkan diri dari jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Irjen Kemendag) karena mendaftar sebagai calon Gubernur Jateng.

Dengan rekam jejak yang solid dan pengalaman yang luas di bidang keamanan serta kepolisian, Irjen Pol Ahmad Luthfi dianggap sebagai sosok yang mampu membawa Jawa Tengah menuju masa depan yang lebih baik.

Sementara Taj Yasin Maimoen adalah seorang politisi asal Jateng yang lahir pada 2 Juli 1983. Dia merupakan

anggota DPRD Jawa Tengah Komisi E dari fraksi PPP untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. Karier politiknya pun terus berkembang dari waktu ke waktu.

Pada 2011, dia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah. Selanjutnya pada 2016, Gus Yasin menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP PPP 2016 dan setahun kemudian menjadi Ketua DPP PPP Jawa Tengah periode 2017-2022

Nama Gus Yasin semakin dikenal pada tingkat nasional setelah dipercaya menjadi tandem Ganjar Pranowo untuk Cawagub di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018. Kontestasi itu pun berhasil dimenangkan Ganjar-Taj Yasin.

Pada 11 Mei 2023, Gus Yasin mengundurkan diri dari Wakil Gubernur Jateng setelah resmi mendaftar menjadi anggota DPD Jawa Tengah. •

Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak

POSISI PETAHANA BELUM BISA DIGESER

Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dipastikan akan kembali memimpin Jawa Timur setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2024. Gubernur dan Wakil Gubernur petahana ini berhasil meraih lebih dari 12 juta suara. Jauh meninggalkan pasangan Luluk-Lukman dan Tri Rismaharini-Zahrul.

Itu artinya petahana di Jatim masih belum bisa digeser oleh orang baru. Bahkan Khofifah-Emil berhasil mendapatkan lebih dari 12 juta suara, jauh meninggalkan Pasangan Luluk-Lukman dan Tri Rismaharini-Zahrul.

Rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 tersebut berlangsung dari Minggu (8/12/2024) hingga Senin (9/12/2024) dihari di Hotel DoubleTree Surabaya.

"Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Timur tahun 2024 dengan perolehan sebagai berikut," ujar Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi saat membacakan hasil rekapitulasi.

Berikut hasil perolehan suara masing-masing Paslon Nomor Urut 1: Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim meraih 1.797.332 suara sah. Paslon Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memperoleh 12.192.165 suara sah.

Sedangkan, Paslon Nomor Urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) mengumpulkan

6.743.095 suara sah.

Dari total 32.081.667 DPT ditambah 2,5 persen surat suara cadangan, suara sah yang dihitung mencapai 20.732.592, sementara suara tidak sah tercatat sebanyak 1.204.610.

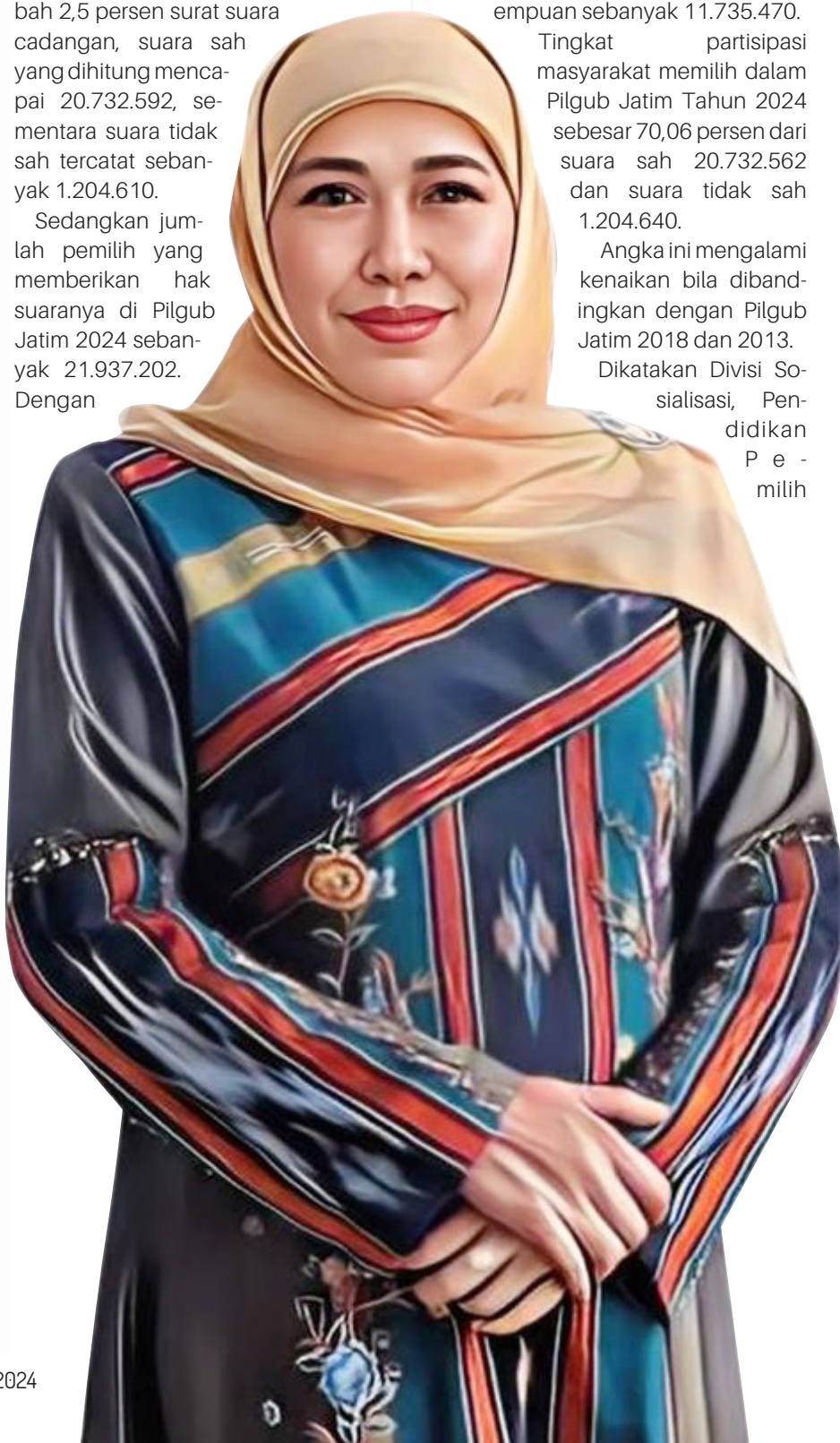
Sedangkan jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya di Pilgub Jatim 2024 sebanyak 21.937.202. Dengan

rincian pemilih laki-laki sebanyak 10.201.732. Sementara pemilih perempuan sebanyak 11.735.470.

Tingkat partisipasi masyarakat memilih dalam Pilgub Jatim Tahun 2024 sebesar 70,06 persen dari suara sah 20.732.562 dan suara tidak sah 1.204.640.

Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Pilgub Jatim 2018 dan 2013.

Dikatakan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih





dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Jatim, Nur Salam bahwa pada Pilgub Jatim Tahun 2024 tingkat partisipasi mencapai 70,06 persen.

Terdiri dari tingkat pemilih perempuan sebesar 73,87 persen dan pemilih laki-laki sebesar 66,13 persen. Sementara, pada Pilgub Jatim Tahun 2018 sebesar 67,39 persen dan pada Pilgub Jatim 2013 sebesar 59,34 persen.

"Dari hasil ini, terlihat dari pemilihan ke pemilihan, tingkat parmas di Jawa Timur terus mengalami kenaikan," kata Nur Salam.

Capaian kenaikan partisipasi ini merupakan peran serta seluruh pihak yang telah bersedia menggunakan hak pilih dalam pemilihan, dan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak konstitusinya dalam Pilgub Jatim tahun 2024.

Meski demikian, KPU Jatim kedepan terus berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan evaluasi-evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Ta-

hun 2024 dan menetapkan berbagai strategi serta inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sesuai.

Setelah dinyatakan menang Pilkada Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Menurutnya ini merupakan hasil dari kerja keras bersama banyak elemen strategis, termasuk tokoh agama, ulama, partai pengusung, serta relawan yang berperan penting.

"Kami sangat bersyukur atas proses panjang ini yang melibatkan banyak

pihak. Ini adalah kemenangan bagi masyarakat Jawa Timur," ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya milik pasangan Khofifah-Emil, tetapi merupakan kemenangan bersama seluruh masyarakat Jawa Timur.

"Semua elemen telah bergotongroyong dan mengantarkan kemenangan ini. Kemenangan pilkada ini adalah kemenangan masyarakat Jawa Timur,"ungkapnya.

Selain itu, Khofifah juga menyam-



• INFO PROFIL

paikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada, mulai dari KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur hingga petugas di tingkat bawah seperti KPPS dan Pantarlih.

"Kami berterima kasih atas kerja maksimal dan profesional dari semua pihak, sehingga proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," tambahnya.

Khofifah juga menekankan bahwa dengan selesainya rekapitulasi hasil Pilkada, maka proses demokrasi di Jawa Timur telah berakhir.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja sama dalam membangun Jawa Timur ke depannya.

"Sekarang waktunya untuk bersatu, mari kita berkolaborasi membangun Jawa Timur menjadi lebih baik," ujarnya.

Ia juga mengajak para pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 3 untuk berekonsiliasi dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan provinsi ini.

"Saya mengajak seluruh elemen yang terasosiasi dengan paslon no-

mor 1 dan nomor 3 untuk bersama-sama membangun Jawa Timur, mencapai prestasi yang lebih tinggi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas," kata Khofifah.

Khofifah berharap agar semua pihak dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita besar untuk menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara yang lebih maju dan berkembang.

"Mari kita bangun Jawa Timur bersama-sama, menjadi lebih maju dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat," jelas dia.



Khofifah-Emil membawa sembilan misi pada Pilkada Jatim. Salah satunya, Jatim Sejahtera, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan di desa maupun kota. Dengan cara memperkuat peran perempuan dalam program pemberdayaan dan memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan, seperti difabel serta para lanjut usia (lansia).

Selain itu, visi petahana tersebut adalah Jatim Kerja, yang menyangkut perluasan lapangan kerja melalui peningkatan kewirausahaan baru atau start-up, iklim investasi, dan sta-

bilitas ekonomi.

Kemudian, Jatim Cerdas, terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan untuk semua.

Selanjutnya, Jatim Sehat, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan untuk semua yang berkualitas, merata, dan mudah diakses, untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

"Pemprov sudah kirim perawat di semua desa di seluruh Jatim, semua desa, jadi semua ponkesdes didampingi oleh

perkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan anti korupsi. Selain itu, meningkatkan kesalehan warga berdasar nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

Jatim Agro, yakni meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan dan akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, dan daya dukung infrastruktur.

Selanjutnya, Jatim Harmoni, dengan mengembangkan nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, memajukan



perawat yang dikirim oleh Pemprov Jatim, seluruh Jatim," ujarnya.

Kelima, Jatim Akses, untuk menguatkan konektivitas antarwilayah, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, serta berkeadilan.

Lalu, Jatim Berkah Amanah, mem-

seni budaya, dan prestasi olahraga.

Terakhir, Jatim Lestari, menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau. •

Bobby Nasution-Surya

MENANTU JOKOWI LENGSERKAN INCUMBENT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024. Pasangan calon Muhammad Bobby Aff Nasution dan Surya berhasil mengungguli rival mereka, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.

Ketua KPU Sumut, Agus Arifin mengungkapkan kemenangan Paslon Bobby-Surya ditetapkan berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR.

"Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ditetapkan berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan," ungkap Agus Arifin, saat membacakan keputusan pada Senin (9/12/2024).

Menurut data resmi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Sumut 2024 berjumlah 10.771.496 orang yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.953.676 pemilih menggunakan hak suara mereka.

Rinciannya,
5.654.922
s u a r a

dinyatakan sah, sedangkan 298.754 suara tidak sah.

Hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan Bobby-Surya meraih 3.645.611 suara, unggul di 30 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

"Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Muhammad Bobby Aff Nasution-Surya mendapatkan suara sah sebanyak 3.645.611," jelas Agus.

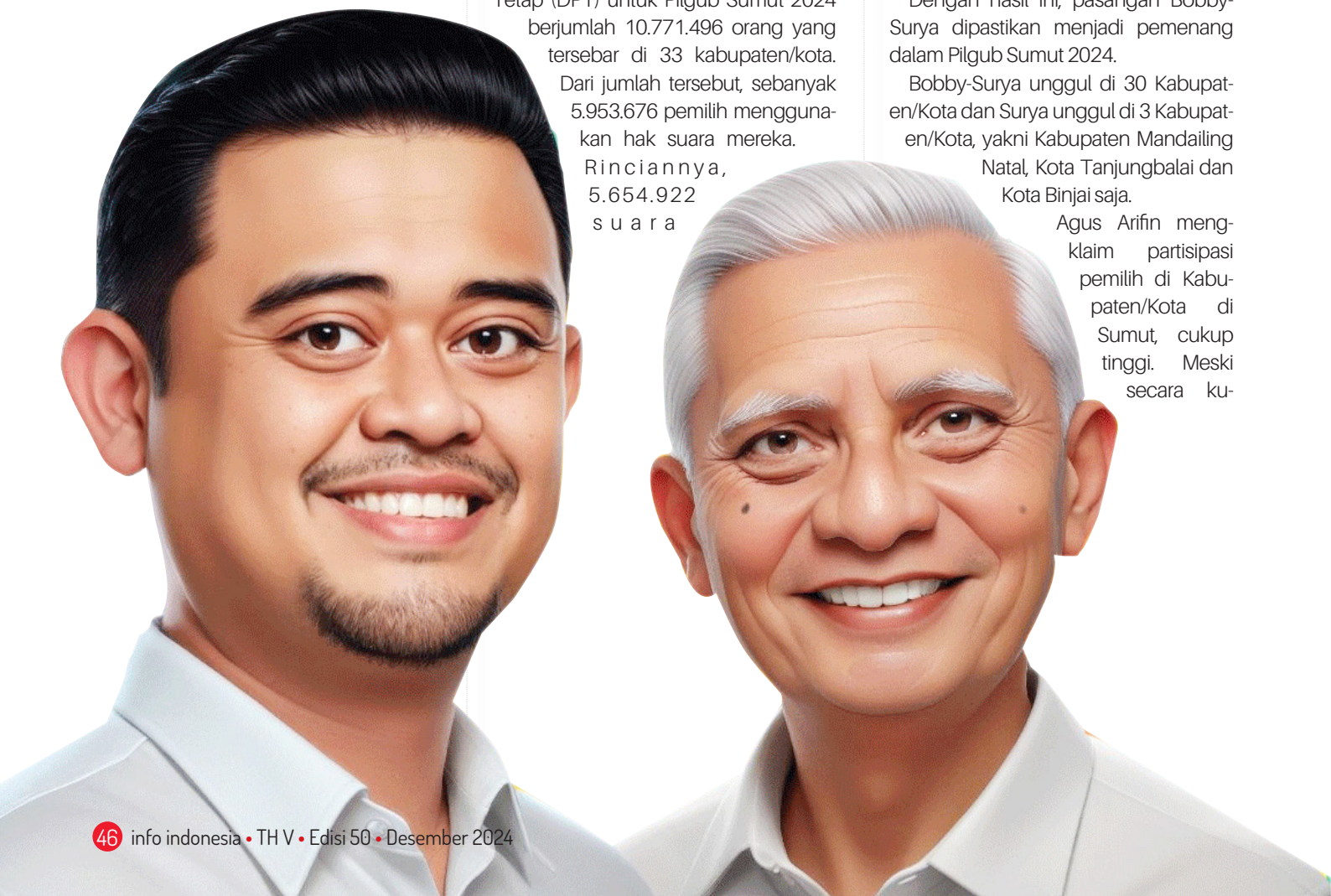
Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara, dengan dominasi di tiga kabupaten/kota.

"Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala mendapatkan suara sah sebanyak 2.009.311," tambahnya.

Dengan hasil ini, pasangan Bobby-Surya dipastikan menjadi pemenang dalam Pilgub Sumut 2024.

Bobby-Surya unggul di 30 Kabupaten/Kota dan Surya unggul di 3 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Mandailing Natal, Kota Tanjungbalai dan Kota Binjai saja.

Agus Arifin mengklaim partisipasi pemilih di Kabupaten/Kota di Sumut, cukup tinggi. Meski secara ku-



mulatif tingkat pemilih tidak menggunakan hak pilih sebesar 44,73 persen.

Sedangkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumut pada Pilgub Sumut 2024, berjumlah 10.771.496 jiwa.

"Kalau kita mencermati tingkat partisipasi setiap Kabupaten/Kota cukup tinggi ya. Tapi, ditingkat provinsi diakumulasi 55,27 persen. Tingkat kehadiran pemilih pada 27 November 2024 ini, karena ada banjir, terutama di DPT yang tinggi Medan, Deliserdang, termasuk Asahan dan ada juga Binjai," jelas Agus Arifin.

Sementara, Organisasi relawan Pelayanan Rakyat Horas Bobby Surya (PARHOBAS) menyampaikan terima kasih kepada warga Sumut yang telah memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bobby Afif Nasution -Surya dalam Pilkada Serentak 2024.

"Secara khusus izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Sumatera Utara yang sudah begitu luar biasa dan penuh semangat mendukung Bobby-Surya," kata Dewan Pembina PARHOBAS Ir Mandalasah Turnip, SH, kepada pers di Medan.

PARHOBAS sebagai salah satu kelompok relawan pemenangan Bobby-Surya, menurut Mandalasah, merespons dukungan dan kemenangan Bobby-Surya sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat agar visi, misi, dan program yang dilaksanakan gubernur dan wakil gubernur Sumut terpilih tersebut nanti bisa membawa pembangunan dan kesejahteraan warga ke arah lebih baik.

Ditambahkannya, keberhasilan Bobby-Surya memperoleh dukungan suara terbanyak di Pilkada serentak 2024 merupakan kemenangan bagi seluruh masyarakat Sumut.

Oleh karena itu, PARHOBAS yakin gubernur dan wakil gubernur Sumut terpilih siap tancap gas untuk merealisasikan janji kampanye mereka setelah resmi dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang.

Salah satunya, kata dia banyak pekerjaan rumah terkait infrastruktur jalan dan jembatan yang belum terlaksana dengan baik pada periode sebelumnya.

"Bobby-Surya yang sudah mengidentifikasi berbagai masalah warga Sumatera Utara akan langsung tancap gas merealisasikan "Kolaborasi Sumut Berkah," paparnya.

Tidak hanya itu, Mandalasah memastikan Bobby Nasution bakal memberikan pengaruh dan pengetahuan yang luas kepada jajarannya secara internal nantinya begitu dilantik menjadi Gubernur Sumut.

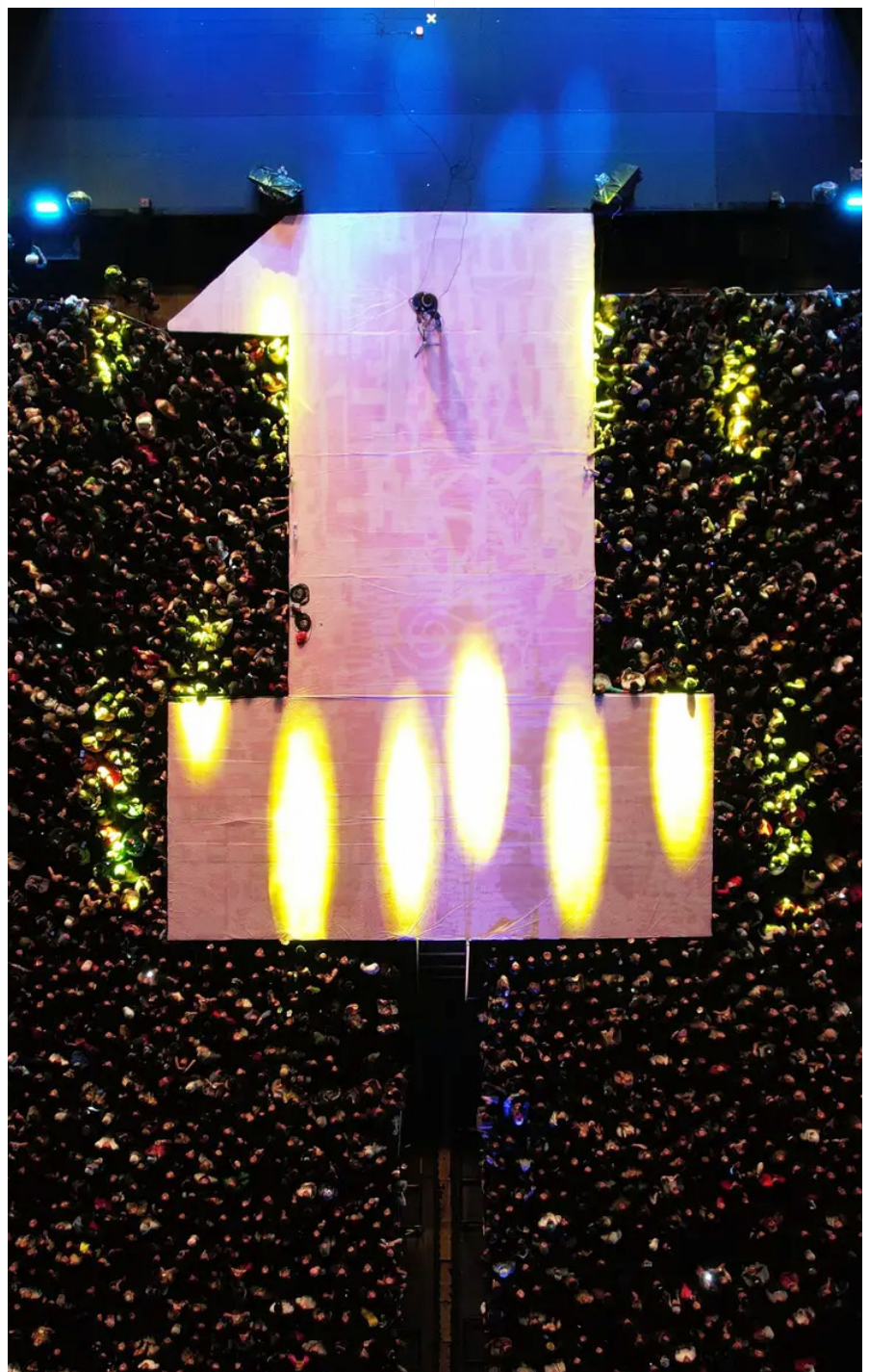
Sebab, menurutnya, apa yang akan dilakukan Bobby ke depannya harus bisa diserap dengan baik oleh birokrasi di seluruh jajaran Pemprov Sumut.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mengawal pemerintahan Bobby-Surya selama lima tahun ke-

pan agar senantiasa berjalan baik dan sesuai kepentingan rakyat.

Sementara, Partai Gerindra menyebut kemenangan Bobby-Surya merupakan kemenangan rakyat.

"Pertama kami menyampaikan syukur Alhamdulillah atas hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU Sumut itu. Kemenangan ini bukan semata kemenangan Bobby-Surya, bukan kemenangan Gerindra atau partai pendukung lain, ini adalah kemenangan rakyat Sumatera Utara," kata Ketua Gerindra Su-



• INFO PROFIL

mut Ade Jona Prasetyo.

Anggota Komisi XII DPR itu mengajak untuk menjaga proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Dia juga mengajak seluruh elemen untuk sama-sama mendukung pemerintahan yang baru nantinya.

Jona memastikan Partai Gerindra akan terus mengumpulkan aspirasi masyarakat Sumut untuk disampaikan kepada Gubernur Sumut. Dia yakin, Bobby-Surya akan mendengarkan aspirasi yang bertujuan untuk membangun Sumut.

tan.

"Kami keliling provinsi ini masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang mengeluh tentang pendidikan SMA, SMK. Para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini mere-sahkan," kata Bobby.

"Kami ingin memastikan kalau kami diberi amanah dalam 2 tahun masa kepemimpinan kami, masyarakat Sumut akan mendapatkan akses keseha-

kelola pemerintahan, mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik dan ramah lingkungan serta memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh.

Hasil Pilgub Sumut 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU Sumut tidak langsung bisa diterima, sejumlah isu dan kontroversial muncul. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan di beberapa kalangan dan kelompok.

Bahkan rival Bobby Nasution-Surya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Salaga mengajukan gugatan hasil Pilkada Sumut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Isu yang diangkat adalah adanya tuduhan keberpihakan kepala daerah yang dianggap memberikan dukungan kepada pasangan Bobby Nasution-Surya secara terang-terangan dan hal ini tidak mencerminkan pesta demokrasi yang adil dan jujur.

Bukan hanya itu, adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suara akibat bencana alam juga ikut menjadi sorotan serius. Bahkan, tercatat ada sejumlah laporan bahwa banyak warga yang tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mencatat adanya dugaan pelanggaran integritas oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang dituding memberikan lebih dari satu surat suara kepada pemilih.

Jelas saja, kondisi ini menunjukkan perlu adanya evaluasi yang lebih jauh dalam pelaksanaan Pilkada agar menjadi lebih baik.

Ketua Tim hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, mengatakan gugatan ini didasari atas adanya dugaan penyelenggaraan pilkada yang berat sebelah di Pilkada Sumut. Yance menyebut, adanya dugaan cawe-cawe yang dilakukan aparat sipil negara hingga aparat penegak hukum yang disebut "Parcok."

"Cawe-cawe ini menyakiti hati masyarakat Sumatera Utara," kata Yance di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

Yance menegaskan bahwa adanya gugatan ini bukan lagi prihal menang atau kalah dalam Pilkada. Namun, pengajuan gugatan dilakukan untuk mengembalikan muruah Pilkada agar terjaga secara adil dan berintegritas.



"Inshaallah Bobby-Surya akan menjalankan program-program untuk mensejahterakan rakyat. Gerindra akan hadir untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat di desa maupun kota," jelasnya.

Sebelumnya, dalam kampanyenya Bobby menjelaskan secara kependudukan, Sumatera Utara menempati posisi ke-4 terbesar. Namun dari jumlah penduduk yang banyak ini masyarakat masih sulit mendapatkan akses keseha-

tan menggunakan KTP Sumatera Utara. Tidak ada lagi sekolah yang tidak ada listriknya, akses internetnya tidak ada. Dan kami pastikan tidak ada lagi kutipan-kutipan untuk SMA dan SMK," tutur Bobby.

Sementara itu, untuk mewujudkan visi tersebut Bobby-Surya memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, meningkatkan kualitas tata

Terlebih, Pilkada seharusnya menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang berintegritas ternodai oleh adanya cawe-cawe dari pihak yang semestinya bersikap netral.

"Petitum kami, tolong MK diskualifikasi pasangan 01 (Bobby-Surya)" ujar Yance.

Tentu saja kondisi ini memiliki dampak yang luar biasa pada hasil Pilkada Sumut 2024 atas kemenangan pasangan Bobby-Surya.

Bobby-Surya memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

rah baru untuk menyelesaikan semua Pekerjaan Rumah (PR) yang sedang di hadapi Sumut, termasuk pengintegrasian semua elemen dalam pemerintahan demi Sumut yang lebih baik.

Akhirnya Cagub Sumut 2024 terpilih, Bobby Nasution memberikan tanggapan atas pengajuan gugatan Pilkada Sumut 2024 ke MK oleh rivalnya Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

"Ya mekanisme memang seperti itu, kita pasti ikutin mekanisme," kata Bobby Nasution di Medan, Rabu 11 Desember 2024.

Sedangkan untuk istilah Parcock yang dituduhkan pada dirinya merujuk kepada keterlibatan institusi Polri pada Pilkada serentak 2024.

Bobby Nasution menyebut tuduhan itu mestinya dibuktikan di ranah hukum.

Menurutnya, tak elok apabila hal tersebut dijawab lewat media sebab masyarakat akan membacanya.

"Itu tadi, sudah dilaporkan pembuktiannya di hukum. Kalau jawab di media, saya rasa enggak elok. Karena ini pasti dibaca masyarakat," ucapnya.

Pasalnya, jelas Bobby, dirinya sepakat



Keduanya harus secara cepat menyusun rencana dengan kerja nyata demi kesejahteraan dan mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi di Sumut.

Kondisi ini menjadi hal serius, karena semua harapan masyarakat Sumut ada di pundak Bobby-Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih, tentunya dengan menghadirkan pemerintahan yang adil dan transparan.

Bobby yang memiliki latar belakang keluarga mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat berfokus pada isu-isu mendesak seperti pemulihan dari dampak bencana, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik.

Masyarakat juga menantikan langkah-langkah konkret dari pemerintah dae-

Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Edy-Hasan itu sudah sesuai mekanisme. Sebab, pasca mengumumkan hasil Pilgub Sumut, KPU memang memberikan waktu selama 3 hari untuk melakukan gugatan ke MK.

"Mekanismenya kan seperti itu, setelah pengumuman kan 3 hari semua pslon diperbolehkan untuk melakukan gugatan, kita ikutin," ucapnya.

Bobby menilai jika semua pihak pasti ingin Pilkada berjalan dengan lancar. Masyarakat juga diharapkan dapat mengikuti tahapan dengan sebaik-baiknya.

"Yang pasti tentunya kita ingin semua tahapan ini bisa berjalan lancar, kita ingin semua masyarakat bisa ikutin tahapan ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

untuk memilih pemimpin yang tak mengajari masyarakat untuk berpolitik.

"Kita sepakat memilih pemimpin yang tidak mengajak dan mengajari masyarakat berpolitik," ucapnya.

Pasca diumumkan unggul oleh KPU, Bobby mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Termasuk KPU, Bawaslu, TNI/Polri yang telah melaksanakan tugasnya.

"Setelah pengumuman kemarin tentunya kami berterimakasih kepada masyarakat, seluruh penyelenggara, yang mengamankan TNI/Polri semuanya yang ikut mengamankan sejauh ini Sumatera Utara saya lihat adem ayem, mudah-mudahan sampai nanti penetapan setelah dari putusan MK ini bisa sampai pelantikan tadi," tutupnya. •

Herman Deru-Cik Ujang

KEMENANGAN TANPA GUGATAN KE MK

Hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Herman Deru-Cik Ujang meraih suara terbanyak dan memastikan keduanya memimpin Bumi Sriwijaya lima tahun ke depan.

Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan seluruh hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Sumsel 2024 dari 17 KPU kabupaten dan kota pada Sabtu 7 Desember 2024.

Hasil rekapitulasi suara tak mendapat koreksi dari Bawaslu Sumsel dan para saksi sehingga KPU Sumsel langsung menetapkan hasil perolehan suara.

Dari pleno itu pasangan calon nomor urut 01 Herman Deru-Cik Ujang meraih 2.220.437 suara. Kemudian, paslon 02 Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia 1.082.241 suara, dan paslon 03 Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati 999.141 suara.

Daftar pemilih tetap (DPT) Sumsel tercatat 6.382.739 orang dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.219.840 pemilih dan perempuan 3.162.899 pemilih.

Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat 4.595.661 orangnya. Rinciannya, laki-laki sebanyak 2.233.832 pemilih dan perempuan sebanyak 2.361.829 pemilih.

Sementara, jumlah pemilih pindah yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 5.902 dengan rincian laki-laki sebanyak 3.784 pemilih dan perempuan 2.118 pemilih.

"Untuk jumlah suara sah dan tidak sah pada Pilgub Sumsel 2024 sebanyak 4.623.856 suara. Dengan rincian, jumlah suara sebanyak 4.301.819 suara dan suara tidak sah 322.037 suara," ujarnya saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024.

Adapun surat suara yang diterima beserta cadangan sebanyak 2,5 persen jumlahnya sebanyak 6.547.195 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 4.623.856.

Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 3.676 surat suara. Sedangkan, sisa surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai dan cadangan sebanyak 1.919.663 surat suara.

Hingga Mahkamah Konstitusi (MK)

secara resmi menutup pintu bagi pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2024 pada Rabu 11 Desember 2024 pukul 23.59





WIB, tidak ada pihak yang mengajukan sengketa terkait Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) untuk wilayah Sumsel.

Keputusan ini menjadi final kemenangan pasangan Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih.

Langkah berikutnya, pasangan HDCU bergerak cepat. Bahkan sebelum pengumuman resmi KPU, mereka telah membentuk Tim Transisi yang dipimpin oleh mantan Sekda Sumsel, SA Supriyono.

Tim ini akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk me-

mastikan visi dan misi HDCU dapat diimplementasikan dengan lancar mulai tahun anggaran 2025.

"Tim transisi yang dipimpin Pak Supriyono akan segera berkoordinasi dengan jajaran Pemprov Sumsel untuk menyelaraskan program-program unggulan sesuai visi misi HDCU," ungkap Alfrenzi Panggarbesi, juru bicara HDCU dalam keterangan persnya di Posko Utama HDCU, Rumah Kayu Taman Kenten Palembang pada Rabu 11 Desember 2024.

Dengan tidak adanya gugatan ke MK, perjalanan politik pasangan Her-

man Deru-Cik Ujang menuju kursi kepemimpinan Sumsel semakin mantap.

HDCU, mendominasi perolehan suara dengan menguasai 15 dari 17 kabupaten/kota di Sumsel.

Namun, kemenangan mutlak ini sedikit terkikis di dua wilayah, Palembang dan Ogan Ilir (OI), yang menjadi basis kekuatan pasangan lain.

Di Palembang, pasangan nomor urut 02, Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia (ERA), berhasil unggul. Hal ini tak lepas dari rekam jejak Eddy Santana Putra sebagai mantan Wali Kota Palembang

Berikut adalah rincian perolehan suara HDCU, ERA, dan MATAHATI di setiap kabupaten/kota:

NO. KABUPATEN/KOTA	HDCU	ERA	MATAHATI
1. Banyuasin	181.446 suara	105.517 suara	108.197 suara
2. Lubuklinggau	58.305 suara	36.741 suara	28.633 suara
3. Pagar Alam	64.671 suara	10.784 suara	11.814 suara
4. Palembang	233.044 suara	338.576 suara	178.208 suara
5. Prabumulih	49.773 suara	30.618 suara	27.078 suara
6. Muara Enim	131.125 suara	68.744 suara	83.415 suara
7. Muba	139.518 suara	112.298 suara	77.753 suara
8. Mura	109.716 suara	63.085 suara	40.670 suara
9. Muratara	60.944 suara	20.644 suara	24.156 suara
10. OKI	241.901 suara	64.331 suara	98.410 suara
11. OKU	148.098 suara	25.057 suara	27.168 suara
12. OKU Timur	334.081 suara	24.870 suara	20.268 suara
13. PALI	58.772 suara	23.758 suara	22.588 suara
14. OKU Selatan	139.473 suara	37.963 suara	34.299 suara
15. Ogan Ilir	36.992 suara	24.846 suara	131.598 suara
16. Lahat	139.950 suara	51.179 suara	45.998 suara
17. Empat Lawang	92.628 suara	ERA: 43.230 suara	38.888 suara

• INFO PROFIL

periode 2003–2013.

Sementara itu, Ogan Ilir menjadi lumbung suara pasangan nomor urut 03, Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (Matahati), karena Mawardi adalah tokoh lokal yang pernah menjabat Bupati Ogan Ilir pada 2005–2015.

Alfrenzi Panggarbesi, menegaskan bahwa kemenangan pasangan nomor

mampu menguasai sebagian besar kabupaten/kota di Sumsel,” katanya.

Sesuai dengan visi dan misi pasangan Herman Deru-Cik Ujang untuk Sumsel maju untuk semua.

Visi yang diusung pasangan ini “Sumsel Maju untuk Semua,” yang mencerminkan komitmen mereka untuk memastikan pembangunan yang

lapisan masyarakat.

HDCU juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Mereka berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Dalam penjelasannya, Herman Deru menekankan bahwa pendidikan yang baik adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, sedangkan kesehatan adalah fondasi untuk produktivitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten dan kota adalah salah satu misi utama pasangan ini. HDCU berencana untuk melakukan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan akan meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses bagi masyarakat di berbagai daerah.

HDCU membawa tujuh misi yakni, Mewujudkan masyarakat Sumsel yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Memperkuat perekonomian lokal yang berkelanjutan, termasuk ketahanan pangan, energi, dan kedaulatan air.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas.

Memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat.

Mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Memperkuat seni, budaya, dan agama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis.

“Pembangunan di Sumsel tidak boleh terhenti. Ini adalah perjalanan panjang untuk mengatasi tantangan baru,” tegas Cik Ujang dalam debat tersebut.

Atas kemenangan ini, Herman Deru banyak mendapat ucapan selamat dari kolega maupun pendukungnya.

Salah satu ‘orang spesial’ yang berucap selamat pada Herman Deru yakni, Presiden RI ke 7 Jokowi.



urut 01 adalah hasil kerja keras sejak masa kampanye.

“Kami sudah yakin masyarakat puas dengan kinerja Herman Deru selama lima tahun terakhir,” kata Alfrenzi.

Meski unggul secara keseluruhan, HDCU mengalami kekalahan di Palembang dan OI. Namun, Alfrenzi menegaskan bahwa ini adalah kontestasi Pilgub, bukan Pilwako atau Pilpub.

“Pasangan yang menang harus

merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antar lembaga daerah untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan program-program pembangunan dapat dirasakan oleh semua

Jokowi mengucapkan selamat atas kemenangan Herman Deru melalui sambungan ponselnya.

Dalam panggilan telponnya bersama Jokowi, mantan Bupati OKU Timur 2 periode itu tengah berada di kediamannya bersama para pendukungnya. Ia juga sempat menyinggung kemenangan Bobby, menantu Jokowi sebagai Gubernur Sumatera Utara.

"Makasih pak, mas Bobby juga menang Pak Presiden," kata Herman Deru sambil tersenyum.

"Bapak dimana pak? Di solo pak. Makasih pak. Tadi mas Kaesang juga telpon," kata Herman Deru lagi.

"Makasih banyak pak bimbingannya pak, nggih pak presiden, matur nuwun pak presiden," sahut Deru lagi.

Tak lupa Herman Deru menyampaikan salam dari Jokowi untuk seluruh pendukung Herman Deru yang hadir di kediamannya itu.

"Salam dari Pak Jokowi," kata Herman Deru sambil melambai ke pendukungnya.

Para pendukungnya menyambut dengan teriakan. "Wooo, menyala Pak Jokowi," kata mereka.

Sebelumnya diberitakan Mantan Gubernur Sumsel periode 2018 - 2023, Herman Deru berkunjung ke kediaman Presiden RI ke 7 Jokowi, Selasa 5 November 2024.

Ia datang sendirian, tanpa ditemani pasangannya calon wakil gubernur Sumsel Cik Ujang. Ia diterima Jokowi di kediamannya Banjarsari, Surakarta, Solo, Jawa Tengah.

Dijumpai se usai pertemuan, Herman Deru mengaku kedatangannya di kediaman Jokowi untuk meminta doa dan restu karena maju di Pilkada Sumatera Selatan.

Dia juga mengatakan, telah menerima sejumlah arahan dari Jokowi. Salah satunya untuk tidak merubah sikap dan tidak berlebihan.

"Jangan pernah merubah sikap kata beliau, seperti biasa saja. Jangan berlebihan sampai merubah kondisi yang sudah baik ini," ucapnya kepada awak media.

Selain itu, kata Herman Deru, Jokowi berpesan mengenai konektivitas adalah hal penting.

Setelah mendapatkan pesan terse-

but Herman mengaku akan tetap konsekuen dan konsisten dengan arah yang pernah dipesankan oleh Jokowi.

Berbeda dengan Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar Butar menyebutkan Pilkada Sumsel 2024 sangat primitif, kemenangan ditentukan dengan barter.

"Pilkada Sumsel sangat primitif sekali kemenangan ditentukan dengan bar-

Kenapa bisa kalah dari nomor urut 1 Herman Deru dan Cik Ujang. Bahkan Mawaradi ada di urutan sesuai dengan nomornya urutan ketiga. Kalau saya melihatnya tidak masuk akal,"paparnya.

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) ini, memberikan pernyataan kemenangan dengan sistem politik yang sangat primitif sangat



ter. Seperti zaman dulu kasih beras dan barang kita dapat suara,"kata dia saat Podcast Bincang Politik di kantor info-sumsel.id, Jumat 6 Desember 2024.

Dia memberikan paparan pasangan nomor urut 3 Mawardi Yahya dan Anita Noeringhati atau MATAHATI kalah padahal didukung oleh koalisi besar, ada dua partai besar Golkar dan Gerindra.

"Golkar mesin politik yang sangat kuat dan Gerindra partai pemenang.

mendukung. Masyarakat Sumsel hanya menentukan kemenangan dengan cara transaksional.

"Ada unsur transaksional disini yang sangat kuat. Hal itu membuat kemenangan Herman Deru dan kekalahan Mawardi Yahya. Pastinya ada donatur politik disini untuk melancarkan transaksional dengan pola barter sesuatu untuk mendapatkan suara,"pungkasnya. ●

A Sobri Fadilah

INDONESIA BISA SWASEMBADA KARENA KITA PUNYA SEMUA

Indonesia akan menjadi bangsa yang besar di bidang pertanian pada 2045. Misi mewujudkan Indonesia Emas dan swasembada pangan ini melibatkan semua komponen bangsa, mulai dari masyarakat perkotaan hingga perdesaan.



Demikian pandangan Kiagus Ahmad Sobri Fadilah, pakar dan pemerhati pertanian serta pangan Indonesia terkait kemampuan Indonesia mewujudkan swasembada pangan.

Untuk mewujudkan swasembada pangan ini butuh keterlibatan semua pihak mulai dari pejabat, kepala daerah, hingga petani. Sehingga cita-cita bangsa yang ingin diwujudkan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai swasembada bisa terwujud.

Menurutnya tekad swasembada pangan ini harus dimulai dari seka-
rang
ka-

rena bila melihat jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 280 juta jiwa maka kebutuhan pangan terus bertambah dan berkembang pula.

Sehingga tahun 2045 diproyeksi jumlah penduduk Indonesia mencapai 320 juta. Tentu hal ini membutuhkan pangan yang cukup besar. Sehingga peran Kementerian Pertanian dan stakeholder lainnya sangat besar.

"Saat ini Indonesia masih impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tentu hal ini yang harus kita perbaiki dengan melibatkan semua. Pemerintah, pabrik pupuk, stakeholder lainnya serta para petaninya," ujar Sobri, anggota DPRD Kota Palembang periode 2019 - 2024.

Untuk mencapai swasembada pangan ini menurutnya perlu program yang terencana, melibatkan semua pihak dan kerja keras untuk mencapai satu tujuan. Dengan potensi yang dimiliki seharusnya Indonesia bisa melakukannya.

"Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang agraris. Luas wilayahnya sangat luas, bahkan lebih luas dari semua negara tetangga di Asia Tenggara. Bandingkan saja dengan benchmarking negara tetangga, kita unggul," ucapnya.

Namun faktanya pertanian Indonesia masih kalah dengan Thailand dan Vietnam. Selain swasembada mereka juga bisa ekspor ke Indonesia.

"Padahal kita ini tidak ada kalah-kalahnya dengan negara tetangga. Luas wilayah, potensi alam, jumlah penduduk, semua kita unggul. Artinya apa, kita perlu perhatian dan arahan dalam swasembada pangan ini," ujarnya.

Anak Muda Bangsa Harus Bangga Jadi Petani

Untuk itu pemerintah harus fokus pada swasembada pangan. Ada beberapa trigger yang harus diperhatikan dalam swasembada pangan ini. Antara lain pemerintah, dengan memberikan fasilitas bantuan subsidi ke petani.

Kedua, lembaga penyedia sarana dan prasarana seperti pabrik pupuk, alat pertanian yang dapat mendukung penuh petani dalam meningkatkan produksi.

Ketiga, petani. Faktor penting dari swasembada pangan ini adalah petani sendiri. Tanpa mereka program swasembada pangan tidak akan berjalan.

"Fenomena saat ini, para petani dilakukan orang-orang tua saja, jarang ada anak muda. Yang muda lebih suka ke kota dan bekerja di sektor formal. Padahal di tempat dia sendiri ada potensi yang besar bila dikelola dengan benar. Nah itulah masalahnya," ucap mantan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang ini

Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah karena bertani belum menjadi suatu kebanggaan bagi anak muda di Indonesia.

Kondisi ini jauh berbeda di negara-negara Eropa dan Amerika, justru petani dianggap profesi yang bergengsi karena punya lahan luas, dilakukan dengan peralatan canggih. Bahkan pada malam hari mereka bisa berdansa meski sehari bekerja di ladang.

"Kalau di Indonesia, jangankan mau berdansa, mau makan besok saja masih mikir. Hal ini tentu ada sesuatu yang salah dan perlu dipikirkan konsepnya. Sehingga bertani ini bisa menyentuh anak muda dan bisa menjadi kebanggaan," ujarnya.

Namun yang perlu diketahui bahwa pertanian di Indonesia merupakan hasil warisan dari orangtua sebelumnya sehingga konsep yang dilakukan secara manual dan membutuhkan tenaga yang besar. Hal ini tentu kurang disukai anak muda.

Sehingga perlu dukungan pemerintah dengan menyediakan alat pertanian canggih agar bisa membantu petani di ladang atau lahan. Kemudian perluasan wilayah pertanian juga perlu dilakukan karena selama ini lahannya hanya dari orangtua sehingga semakin lama makin sempit.

Selain itu pemerintah juga memahami kondisi petani dan lahan-lahan yang digarap. Selama ini pemerintah menetapkan target produksi tanpa memberikan solusi saat petani gagal panen dan mengalami masalah.

"Sehingga perlu sentuhan langsung dari pemerintah mulai dari peningkatan



SDM, penggunaan Alsintan serta pembinaan kepada petani. Kalau mereka sudah tersentuh hatinya maka pemerintah tidak sulit lagi mencari petani petani muda. Cukup satu menjadi contoh maka yang lain akan mengikuti,” ungkapnya.

Untuk itu perlu adanya usaha pemer-

Sehingga akan tertanam di benak mereka bahwa menjadi petani itu bisa sejahtera dan mendapat dukungan pemerintah. Hal ini bisa membangkitkan anak muda untuk mencintai pertanian.

“Selama ini saya melihat belum dilakukan, walaupun ada hanya sektoral saja. Bahkan banyak anak petani ini lebih

Saat ini lanjut Sobri, pemerintah sedang menyiapkan 14 juta hektar lahan pertanian kosong untuk dimanfaatkan guna mendukung program swasembada pangan. Lahan 14 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia ini nantinya bisa dipetakan untuk apa saja, sesuai dengan kondisi. Ada yang nantinya untuk lahan sawah, jagung, kedelai, lahan perkebunan, dan lainnya.

“Dari hasil pemetaan itu bisa diketahui kalau lahan ini cocok untuk pertanian maka dilakukan pembinaan khusus pertanian. Bagi lahan di dataran tinggi akan dilakukan pembinaan sesuai kondisi lahannya. Sehingga para petani tahu tanaman apa yang cocok,” ujarnya.

Kemudian juga dipikirkan pemasaraannya, pengolahannya sehingga hasil pertanian ini bisa terintegrasi mulai dari sumbernya hingga pabrik.

Namun ada permasalahan yang harus dituntaskan lebih dahulu salah satunya penyaluran pupuk bersubsidi. Hingga kini permasalahan distribusi pupuk ini belum juga tuntas.

Menurut Sobri pembinaan pertanian di Indonesia ini sudah baik. Mulai dari pembinaan dari tenaga penyuluh, ada tim verifikasi dan validasi. Namun dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan sepenuh hati dan tanggung jawab, harus punya jiwa patriot untuk berjuang membangun swasembada pertanian.

“Kalau semua orang ini punya jiwa patriot seperti yang disampaikan presiden sama maka cita cita membangun swasembada pangan ini akan lebih mudah,” jelasnya.

Terkait soal pendistribusian pupuk, secara dasar tidak ada masalah karena PT Pupuk Indonesia punya tujuh pabrik pupuk yang penyebarannya ke seluruh nusantara.

Termasuk di Sumatera Selatan yang diproduksi PT Pusri Palembang. Bila dilihat skup daerah, penyaluran pupuk di Sumsel tidak ada masalah karena



intah membangkitkan semangat anak muda untuk bertani. Kalau mereka sibuk mencari kerja di perusahaan, jadi pegawai negeri atau pegawai kantor maka swasembada pangan sulit dicapai kalau anak mudanya tidak mau.

Caranya antara lain mengenalkan dunia pertanian sejak dini kepada anak-anak mulai dari SMP dikenalkan dengan ekonomi pertanian, ilmu pertanian secara teknis, memberikan testimoni dari petani petani sukses.

memilih menjadi TKI atau TKW karena dianggap lebih sejahtera. Padahal kalau kita tahu, yah susah juga,” katanya.

Memaksimalkan Lahan Kosong

Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama khususnya pemerintah karena punya kewenangan, aturan, mekanisme serta dana. Pemerintah juga butuh orang-orang yang tepat agar program swasembada pangan ini bisa berjalan sesuai target.



distribusinya bisa dijangkau ke seluruh wilayah.

Namun terkadang ada di tingkat petani. Dari hasil penelusurannya, terkadang pupuk subsidi sudah tersedia namun petani tidak mampu menebusnya karena tidak punya modal. Ada juga yang tidak bisa menebus karena ketidakcocokan data.

“Kendala lainnya yaitu iklim. Kondisi klimatologi saat ini sulit ditebak sementara petani kita menjalankan sesuai tradisi saja, bulan ini tanam, bulan selanjutnya tanam. Namun sekarang tidak bisa lagi karena sudah berubah, nah ini butuh mitigasi juga dari BMKG,” terangnya.

Distribusi pupuk PT Pusri Palembang justru ada di luar Sumsel akibat terjadinya pendangkalan atau sedimentasi Sungai Musi. Dimana kapasitas kapal hanya mampu mengangkut 5000 hingga 10 ribu ton saja, lebih dari itu terancam kandas.

Artinya pendangkalan Sungai Musi ini juga menjadi pemikiran bersama karena menjadi salah satu urat nadi ekonomi Sumatera Selatan. Sungai Musi bukan hanya digunakan untuk angkutan pupuk tapi distribusi batubara, olahan karet, sawit dan lainnya menggunakan jalur air ini.

“Sehingga perlu kolaborasi dari se-

luruh perusahaan di Sumatera Selatan yang menggunakan jalur air Sungai Musi untuk bersama-sama mengatasi pendangkalan ini,” ujarnya.

Bila ada upaya pengerukan maka akan meningkatkan produksi yang berimbas pada tercapai 6 T yakni Tepat Tempat, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Jenis, Tepat Harga, dan Tepat Mutu akan tercapai.

Hal ini juga berimbas pada program swasembada pangan. Kalau penyaluran pupuk terbatas akibat terhambatnya distribusi karena pendangkalan Sungai Musi, hal itu tentu menimbulkan masalah.

Sementara Sumatera Selatan sendiri punya potensi pertanian yang cukup besar bahkan masuk dalam lima provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia.

Sumsel juga punya kesediaan lahan yang bisa di ekstensifikasi untuk perluasan sehingga punya potensi untuk meningkatkan hasil pertanian. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan tidur agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Sekarang kita menunggu dukungan pemerintah mulai dari penyediaan bibit, penyediaan penyuluh serta dukungan pupuk yang cukup. Saya yakin kita mampu swasembada pangan,” tegasnya. ●

Profil Kemas A Sobri Fadilah SP, MM

Lahir ; Palembang, 16 Oktober 1972

Pendidikan : Magister Manajemen (bidang pemasaran) Universitas Tridini-
nanti Palembang (2015)

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (1998)

Organisasi : Sekretaris MPD PAN Palembang (- sekarang)

Bendahara Nahdlatul Ulama Kota Palembang (2017 - 2022)

Mustasyar Nahdlatul Ulama Kota Palembang (2022 - 2027)

Dewan Pengurus Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo
Wikramo (2023 - 2027)

Pekerjaan : Area Sales Manager PT Tiga Raksa Satria Tbk (2001 - 2008)

Owner PT Karya Mitra Sukses, distributor fast moving consumer goods
Sumatera Selatan (2008 - 2020)

Anggota DPRD Kota Palembang (2019 - 2024)

FITRIANA

JANGAN SUKA PILIH-PILIH SEMUA ADA REZEKINYA

Hidup harus dinikmati. Salah satu caranya dengan banyak berbuat baik dan tidak pilih-pilih teman. Setiap teman ada rezekinya, meski ada juga yang membawa keburukan. Namun hal itulah yang membuat seseorang diuji tingkat ketulusannya.

Demikian falsafah hidup Fitriana, seorang wanita pengusaha dan desainer yang banyak bergerak di bidang UMKM dan kegiatan sosial. Memberikan yang terbaik kepada keluarga, masyarakat, saudara dan teman-teman membutuhkan menjadi lumbung amal dan ibadah baginya di akhirat nanti.

Sebagai pengusaha, kes-

ibukan wanita yang biasa disapa Pingky saat ini adalah mengurus bisnis mulai dari butik, koperasi, kontraktor, supplier di beberapa perusahaan BUMN seperti Pusri dan Pertamina dan UMKM.

Kemudian di tahun 2025 ini ada akan membuka kafe dengan konsep tempat nongkrong yang asyik bagi semua kalangan.

"Konsepnya tempat nongkrong keluarga. Makanannya juga macam-macam dari yang tradisional seperti pempek sampai makanan luar negeri juga nanti ada. Sekarang lagi merancang tempat dulu. Insya Allah tahun 2025 ini sudah kita buka," kata Pingky membuka pembicaraannya.

Wanita yang dikenal super aktif, dan dekat dengan semua kalangan ini memang dikenal banyak memiliki usaha. Selain sebagai kontraktor dan mengelola butik, ia juga membuka usaha untuk membantu permodalan bagi pedagang pasar dan bentuk koperasi.

Usaha koperasi yang dirintisnya ini sekarang sudah berjalan mandiri untuk membantu modal pedagang di Pasar Kenten, Pasar Lembang dan b e -

BIODATA FITRIANA SH

Lahir	: Palembang, 15 Februari 1979
Pekerjaan	: Pengusaha
Suami	: Jonroni Maruli Asi Hasibuan
Anak	: Queen Oilregnent Hasibuan Qilten Fisukman Qilchentwo Fisukman

berapa tempat lainnya.

“Untuk pengembaliannya lebih kecil dari yang lain bahkan kadang macet, kadang lancar tapi karena memang banyak persaingan namun bagi saya yang penting bisa membantu pedagang dulu. Kalau usahanya lancar mereka juga tentu rutin membayar,” ucap pemilik Butik PingkyQQQ ini.

Terus Cari Tantangan Baru

Sukses dibidang usaha membuat Pingky mencoba mencari tantangan baru yakni terjun ke dunia politik. Meski sadar dengan resiko yang akan dialaminya namun sebagai wanita tangguh hal tersebut menjadi tantangannya untuk menjalani.

Diakuinya, ibu tiga orang anak ini menilai, dunia politik memang terlihat indah di permukaan namun banyak proses dan intrik untuk mencapai. Mereka yang tidak kuat dalam tekanan persaingan maka bisa fatal akibatnya.

Setelah terjun langsung ke dunia politik maka banyak sekali menemukan intrik dan kekisruhan untuk memperebutkan dan meraih ambisi masing-masing. Dimana dalam berpolitik tersebut tidak bisa bermain polos, main dengan hati.

“Namun yah sudahlah, saya selesaikan saja dulu sambil belajar. Mungkin politik bukan dunia saya. Tapi banyak pelajaran di dunia politik yang sudah saya selami. Mungkin kemarin saya ingin menjadi anggota dewan, ingin mencalonkan diri jadi walikota. Ternyata saya belum bisa. Memang dunia politik itu kejam,” katanya sambil tertawa.

Uniknya meski secara finansial sudah banyak yang dikeluarkan namun Pingky tetap terlihat tenang, happy bahkan tetap memberikan bantuan-bantuan kepada beberapa calon kepala daerah secara sukarela yang ingin berkontestasi di Pilkada.

Bukan itu saja, ia bahkan ikut terjun langsung mensosialisasikan ke masyarakat dengan menggunakan dananya sendiri.

Meski dia sendiri gagal namun Pingky tetap membantu mereka yang ingin terjun di politik dan bantuan yang diberikan juga tidak tanggung-tanggung.

“Kalau bisa yah bantu, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Semampunya saya saja sebetulnya,” jelasnya.



Dibalik kesibukannya mengelola bisnis, Pingky juga rupanya aktif di berbagai organisasi diantaranya di Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Bahkan saat ini mengetuai LIRA Sumsel.

Kemudian aktif di Ormas Rampas Setia 08 sebagai Bendahara Umum yang merupakan Ormas bentukan Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden RI. Kalau ditanya soal keuntungan secara

• INFO PROFIL

finansial, tidak ada. Bahkan Pingky lebih banyak mengeluarkan dana sendiri untuk melakukan berbagai kegiatan.

"Keuntungan yang saya terima hanyalah bisa melakukan kegiatan sosial dan bersosialisasi dengan masyarakat. Yang namanya dunia sosial, dunia politik bukan tempat kita mencari uang. Kalau mau mencari uang yah berbisnis," ujar ibu tiga anak ini.

di Polres OKU Timur. Sehingga terkait soal kesuksesan yang diraihinya karena dibantu sang suami sebagai anggota Polri, Pingky membantah.

Ia menegaskan, sebelum menikah dengan suaminya sekarang, dia telah banyak menggeluti dunia bisnis. Bahkan secara finansial dia memang juga sudah tercukupi.

Untuk diketahui, orangtua Pingky ada-

harus disiplin dan punya tatahannya sendiri. Untuk keluarga itu beda. Jadi kita tidak mengandalkan suami, dan otak bisnis juga harus jalan.

"Jadi misalnya, ada satu handphone. Bagaimana caranya kita puter bisa menghasilkan 10 handphone.

Bagi dia penghasilan suami difokuskan untuk kebutuhan hidup anak, keluarga atau memang fokus untuk rumah tangga. Tidak bisa diganggu gugat karena itu menjadi kebutuhan pokoknya.

Sehingga jika mau lebih maka dialah yang berinisiatif dengan melakukan berbagai bisnis yang digelutinya. Makanya saat dia tampil dengan pakaian modis, glamour serta terkesan mewah, Pingky terasa tidak ada beban.

"Alhamdulillah dapat suami yang bertanggung jawab dengan keluarga. Tapi sebelum menikah, sejak dulu penampilan saya memang seperti sekarang. Bahkan kepada pejabat-pejabat Polda Sumsel waktu akan menikah, saya katakan kalau penampilan saya memang seperti inilah. Jadi bukan karena istri polisi yah," tegas mantan model ini.

Soal penampilan yang terkesan glamour hal itu baginya lumrah. Sebagai pebisnis tentu dia juga harus meyakinkan klien. Salah satunya dengan memberikan penampilan yang baik. Apalagi sejak muda dia sudah menyukai dunia fashion.

Terkadang dengan penampilan yang terkesan mewah dan glamour ini, orang banyak yang salah menilai. Namun nyatanya Pingky jauh dari kesan negatif, bahkan ia terkenal sebagai sosok yang merangkul semua orang, semua kalangan tanpa memandang status sosial.

Bahkan dia tidak segan membantu teman-temannya yang kesulitan. Sehingga kesan awal yang terlihat negatif langsung pecah seketika saat bertemu langsung dengannya.

"Kalau dilihat sepiantas mungkin saya ini kesannya sombong atau suka pilih-pilih dalam berteman. Itu salah, saya tidak seperti itu dalam berteman siapa saja yang temani," ucapnya.

Yakin Semua Ada Rezekinya

Ia mengungkapkan, meski secara materi dia cukup namun bukan berarti harus pilih-pilih dalam bersosialisasi. Termasuk saat pergi berbelanja ke pasar,



Berkegiatan sosial ini menjadi salah satu hobinya. Sehingga meski banyak dana yang dikeluarkannya namun ia merasa bahagia karena bisa berbuat untuk masyarakat.

Disiplin dan Mandiri

Untuk diketahui suami Pingky merupakan pejabat Polri sebagai Kabag SDM

lah seorang pejabat di TNI dan sempat menjadi anggota DPRD di Kabupaten Muara Enim. Meski sejak kecil sudah tercukupi secara ekonomi namun dia bukanlah seorang anak yang manja. Bahkan sejak kecil sudah mandiri.

"Kalau soal mandiri, saya sudah mandiri sejak dulu. Jadi konsep mandiri bagi saya itu adalah keras, maksudnya kita

ia lebih suka tampil sederhana dan bisa menyapa dengan semua orang di sekitarnya.

"Jujur, aku termasuk orang yang beruntung karena orangtuaku adalah pejabat di TNI dan Polri. Bahkan papa sempat menjadi Ketua Dewan di Kabupaten Muara Enim tapi kami dididik untuk tidak berlaku sombong, disiplin dan berteman dengan siapapun karena semua membawa rezeki. Didikan inilah yang masih terus melekat pada diri saya," ujarnya.

Sehingga dengan didikan itu pula ia tidak memilih dalam berteman, mulai kalangan atas hingga kalangan bawah. Bagi dia semua pertemanan itu ada manfaatnya dan punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing.

Dalam pertemanan tersebut terkadang kebaikannya ini sering dimanfaatkan orang untuk mencari keuntungan pribadi. Namun hal itu tidak masalah baginya, karena setiap ia yakin setiap rezeki yang hilang itu akan diganti bila ikhlas dan ridho.

Sebaliknya orangnya selama ini memanfaatkannya akan malu sendiri dan menutup rezeki bagi dirinya.

"Memang betul terkadang ada yang pura-pura baik ternyata hanya memanfaatkan pertemanan dengan saya. Tapi lihatlah saya masih tetap saja happy dan bertahan seperti sekarang. Kalau berteman mau enaknya saja banyak itu. Sakitnya (dimanfaatkan) hanya sesaat saja bagi saya, karena sisanya biar Allah Subhana Wata'ala yang mengaturnya," ujar istri dari Jonroni Maruli Asi Hasibuan ini.

Hebatnya, Pingky tidak merasa dendam dengan orang suka memanfaatkannya tersebut. Sebab untuk apa baginya dendam karena merekalah yang harus malu.

"Bahkan saya sebetulnya sudah tahu

kalau dimanfaatkan tapi teruslah tidak apa sampai akhirnya dia malu sendiri. Kalau dia tidak ada malunya juga, saya baru mundur dan malas berteman dengannya lagi," ungkapny.

Meski banyak yang memanfaatkan kebaikannya hingga akhirnya melakukan penipuan namun hingga kini, Pingky tidak pernah menuntut mereka. Baginya sederhana, kalau bukan rezekinya untuk apa kejar dan tetap yakin ada penggantinya.

"Saya tidak pernah menuntut mereka

"Ternyata terkadang teman-teman lama kita hadir dan datang saat kita susah. Nah itulah teman kita yang sejati. Kalau saat kita senang, pasti banyak yang berteman dengan kita. Tipu menipu di bidang bisnis, bidang politik kalau dikumpulin banyak juga. Tapi biarlah, Tuhan itukan tidak tidur jadi kita serahkan saja pada yang Maha Kuasa," katanya.

Bagi Pingky, rezeki yang utama itu adalah sehat. Setelah itu teruslah berpikir positif, dan hal itulah yang membuatnya kuat dan diberikan kelancaran rezeki.

"Sebetulnya prinsip berteman itu bagi saya sederhana saja yakni bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak berbisnis dengan saling menguntungkan, dan saling mendukung. Tapi saya paling suka berteman dengan orang suka diajak mencari uang, kalau cuma ngomong aja mending saya tidur. Malas saya," ujarnya sambil tertawa.

Pendidikan Tetap Penting

Rencana ke depan selain akan membuka sebuah kafe, ia juga akan mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk membuat pelatihan menjahit. Sebagai seorang desainer, dia akan merangkul semua kalangan untuk berbisnis di bidang fashion.

"Jadi saya akan menggandeng Disnaker untuk menggelar pelatihan menjahit dan nantinya bisa bersinergi dengan kita sebagai desainer. Sehingga pelatihan yang mereka jalani bisa langsung bermanfaat.

Itu rencana saya," ungkap Pingky.

Kemudian meski sibuk dalam bisnis dan berbagai kegiatan sosial namun Pingky tidak lupa dengan pendidikannya. Meski sudah menyandang gelar Sarjana Hukum namun saat ini sedang kuliah di bidang ekonomi dan berlanjut hingga Strata 2 (S2).

"Bagaimanapun pendidikan itu tetap penting bagi saya. Jadi kalau soal mencari ilmu, saya tetap semangat walaupun sibuk. Bahkan setelah wisuda ini, aku lanjut ke S2 mumpung masih bisa punya kesempatan. ●



meski sudah menipu. Bahkan saya ini malah yang dituntut mereka mengapa tidak berteman lagi karena mereka tahu tidak bisa memanfaatkan saya lagi. Terkadang lucu juga, saya yang dirugikan tapi malah saya yang dituntut. Tapi sudahlah aku tidak mau ambil pusing," ujarnya.

Meski kecewa namun ia tetap berpikir positif karena dia yakin, masih banyak orang yang mendukungnya. Buktinya meski banyak dirugikan namun rezeki yang didapatnya juga semakin bertambah.



PRAMONO TAKLUKAN PRABOWO-JOKOWI

Pramono Anung dan Rano Karno resmi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Dua kader PDIP ini mampu mengalahkan kandidat yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus serta di-endorse langsung Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta yang telah dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta, Pramono-Rano mendapatkan 2.183.239 suara. Sementara, jagoan IM Plus, Ridwan Kamil-Suswono, hanya meraup 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara sertifikasi rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ 2024 saya nyatakan sah," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, dalam rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Desember 2024.

Menurut hasil penghitungan suara, Pramono-Rano meraup 7.456 suara di Kepulauan Seribu. Sementara, RK-Suswono alias RIDO meraih 6.578 suara dan Dharma-Kun meraih 653 suara.

Lalu, di Jakarta Barat Pramono-Rano unggul dengan perolehan 500.738 suara. RIDO meraih 386.880 suara dan Dharma-Kun 109.457 suara.

Kemudian di Jakarta Selatan, Pramono-Rano memimpin den-



gan 491.017 suara, unggul atas RIDO yang meraih 375.391 suara dan Dharma-Kun 90.294 suara.

Keunggulan Pramono-Rano juga tercatat di Jakarta Timur dengan meraup 635.170 suara, disusul RIDO 535.613 suara, dan Dharma-Kun 136.935 suara.

Di Jakarta Utara, Pramono-Rano juga memimpin dengan 328.486 suara, RIDO 261.463 suara, dan Dharma-Kun 77.026 suara.

Terakhir di Jakarta Pusat, Pramono-Rano memimpin dengan 220.372 suara. Disusul RIDO dengan 152.235 suara dan Dharma-Kun 44.865 suara.

Setelah pengumuman rekapitulasi suara, KPU DKI Jakarta membuat surat ketetapan hasil Pilkada DKI Jakarta di mana Pramono Anung dan Rano Karno meraih suara sah sebanyak 2.183.239.

Merujuk regulasi, KPU menyebut angka itu membuat Pramono-Rano menang satu putaran. Pasal 10 ayat 2 UU 2/2024 menyatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Pengamat pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai, selisih suara antara pasangan Pramono-Rano dan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 cukup signifikan. RK-Suswono yang diusung KIM Plus dengan dukungan Joko Widodo dan Prabowo Subianto memperoleh 39,4 persen atau setara 1.718.160 suara.

Namun, Titi mencatat, selisih suara Pramono-Rano untuk mencapai syarat kemenangan satu putaran sebenarnya cukup tipis. "Ini berbeda dengan

laporkan sebesar 57,52 persen. Angka ini jauh menurun dibandingkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mencapai sekitar 77,8 persen. Titi pun mengaitkan penurunan ini dengan meningkatnya apatisisme pemilih.

"Fenomena seperti ajakan 'coblos semua' atau gerakan gercos menunjukkan bahwa tidak semua pemilih merasa terwakili oleh pilihan kandidat

melek politik dan digital dibandingkan daerah lain. Dia juga menyoroti bahwa Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat itu, dianggap kurang mengakar di Jakarta.

"Publik masih melihat Ridwan sebagai figur yang lebih mewakili Jawa Barat," ujarnya.

Hal ini diperparah oleh fakta, baik Ridwan Kamil maupun Suswono, men-



yang ada," ujarnya.

Titi juga menyoroti perbedaan dengan Pilkada 2017 yang lebih banyak dipengaruhi oleh politik identitas. Meski mendapatkan dukungan hampir dari seluruh partai, perolehan suara RK-Suswono yang hanya mencapai 39,4 persen menunjukkan bahwa pengaruh dukungan tersebut tidak signifikan terhadap pemilih.

"Pemilih Jakarta cenderung otonom, memiliki kesadaran politik yang tinggi, dan berani menentukan pilihannya sendiri," tambah Titi.

Titi juga menilai, warga Jakarta lebih

coblos di Jawa Barat pada hari pemungutan suara. Ridwan memegang KTP Bandung, sementara Suswono memiliki KTP Bogor.

"Sentimen ini semakin menguat pada hari pemilihan, menciptakan jarak antara kandidat dan pemilih Jakarta," tegas Titi.

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyatakan, sejumlah blunder turut berkontribusi pada kekalahan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada 2024.

Menurut Firman, meskipun terjadi

• INFO PILKADA DKI

penurunan antusiasme pemilih, hal ini tidak serta-merta membuat mereka mudah terpengaruh oleh ajakan Jokowi dan Prabowo untuk mendukung pasangan tersebut. Ridwan Kamil dinilai terlalu mengandalkan dukungan partai politik yang akhirnya mengabaikan pentingnya memahami karakter masyarakat setempat.

"Meskipun ada PKS, itu tidak menjamin keberhasilan," ujar Firman.

Firman juga menilai, meskipun Ridwan Kamil-Suswono diusung oleh KIM Plus, beberapa partai dalam koalisi tersebut tidak sepenuhnya solid. Bahkan terkesan mematikan mesin partai, beralih dukungan, mendua, atau hanya setengah hati dalam memperjuangkan kemenangan RIDO.

Firman mencontohkan, Partai Nas-Dem memiliki kekecewaan terhadap Ridwan Kamil karena bergabung dengan Partai Golkar setelah didukung di Bandung. Di sisi lain, PKB dinilai lebih condong mendukung Anies Baswedan.

"Ibarat kesebelasan, tidak bisa hanya mengandalkan satu partai," tambah Firman.

Selain itu, komentar-komentar Ridwan Kamil yang dianggap seksis, seperti ucapannya tentang janda, turut menurunkan simpati masyarakat. Ucapan bernada seksis semacam itu sulit diterima, terutama di Jakarta yang memiliki tingkat pendidikan dan kompleksitas sosial yang tinggi.

"(Ridwan Kamil) mendapat pelajaran berharga dari pengalaman ini. Dia perlu belajar lebih banyak untuk menarik simpati masyarakat Jakarta yang beragam. Tidak cukup hanya mengandalkan popularitasnya di daerah lain," ujar Firman.

Analisis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai ini adalah blunder terbesar RK-Suswono.

"Semestinya mereka bisa masuk Jakarta, pindah, dan bersama-sama sebagai warga Jakarta. Menurut saya itu tamparan telak bagi Ridwan Kamil," ujar Hendri.

Hendri juga menilai RK-Suswono memaksakan diri untuk menjadi orang Jakarta. "Mereka terlalu pura-pura Jakarta," sambungnya.

Dia mencontohkan bagaimana Ridwan Kamil yang sudah terkenal sebagai pendukung klub sepakbola Persib alias bobotoh kemudian pura-pura suka Jakmania, yang merupakan pendukung Persija.

Hendsat melihat bahwa meskipun mendapatkan dukungan resmi dari Jokowi dan Prabowo, tetapi Ridwan Kamil dan Suswono tidak mampu memanfaatkan momentum tersebut secara maksimal.

Meski demikian, Hendsat menyatakan bahwa dukungan Jokowi dan Prabowo tidak cukup untuk mengatasi tantangan politik yang lebih kompleks di Jakarta. Pasalnya, Pilkada Jakarta sangat dinamis, dengan isu-isu lokal yang sangat khas, seperti kemacetan, perumahan, dan ketidaksetaraan sosial.

"Meskipun Ridwan Kamil memiliki track record yang baik di Jawa Barat, tetapi Jakarta membutuhkan solusi



Dalam pidato kampanye dan berbagai kegiatan politik, Jokowi menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan pasangan ini untuk memimpin Jakarta. Presiden ke-7 yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan menyebutkan bahwa Ridwan Kamil memiliki pengalaman pemerintahan yang mumpuni dan visi yang jelas untuk ibu kota.

yang lebih konkret dan terukur untuk masalah-masalah tersebut," katanya, Selasa, 10 Desember 2024.

Selain itu, strategi kampanye Ridwan Kamil dan Suswono dianggap kurang mampu menjangkau segmen pemilih muda dan masyarakat urban Jakarta yang makin menginginkan perubahan dalam cara pengelolaan kota. Menurutnya, banyak pemilih merasa bahwa

mereka membutuhkan pemimpin yang lebih berani dalam mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh ibu kota.

Kehadiran Jokowi, kata Hendsat, sebenarnya justru memiliki dampak signifikan dalam beberapa kesempatan. Mengingat, beberapa kali blunder dilakukan oleh RIDO justru terselamatkan oleh cawe-cawe mantan wali kota Solo itu.

"Kalau di Jakarta, bila tidak didorong Jokowi malah akan lebih jelek lagi suara perolehan RK, tetapi memang di Jakarta tidak terlalu besar karena dikenal sebagai kota yang rasional dan kemudian Jokowi lebih redup bila di Jakarta dibandingkan Jawa Tengah," ungkap Hendsat.

Sementara itu, CEO, Founder, sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangsi Syarwi Chaniago, berpendapat, endorse tokoh akan berbeda pengaruhnya di masing-masing daerah.

Dia mengamini bahwa untuk Ridwan Kamil-Suswono justru keok dari PDIP. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di mana calon gubernur dan wakil gubernur yang di-endorse langsung Prabowo Subianto dan Joko Widodo tidak berhasil menang versi hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei.

Pangsi melihat bahwa intervensi dari

Jokowi justru setengah-setengah untuk mendukung RIDO di Jakarta. Berbeda untuk wilayah lainnya yang langsung menemui masyarakat untuk memberikan interaksi yang lebih persuasif. Sementara Jakarta, Jokowi hanya bertemu dengan RIDO dan relawan, sehingga dampak signifikan itu tak terasa hasilnya.

"Kalau di DKI, Jokowi hanya endorse biasa hanya bertemu dengan tim sukses dan relawan. Sementara di

etnis Jawa yang dominan dan signifikan, sehingga pemilih menjadi lebih rasional.

Selain itu, Pangsi menyebut, RIDO keok di Jakarta juga karena partai pendukung yang banyak mematikan mesinnya. Meskipun memiliki partai koalisi yang gemuk (grand coalition), tetapi menjadi bumerang besar saat mereka mematikan mesin.

"Sementara partai pengusung Pram-Rano hanya 1 partai, tetapi



Jawa Tengah, Jokowi langsung turun ke grass root dengan menyapa, menyalami, dan bertatap muka, kontak mata langsung sama akar rumput ini," ujar Pangsi.

Pangsi menambahkan, Jakarta adalah provinsi yang sangat kompleks dan multikultural dengan banyak etnis. Sementara di Jawa Tengah hanya ada

mesinnya bekerja sangat masif dan terukur. Endorse Anies Baswedan dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) juga sangat dominan dan signifikan pengaruhnya di Jakarta. Isu juga sangat pengaruh, RK banyak melakukan blunder yang pro-kontra soal isu janda, banyak program yang enggak populis," kata Pangsi. •



MENANG TANPA GUGATAN CEGAH KEGADUHAN

Pilkada DKI Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan Pramono-Rano memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.

Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDIP itu terjadi setelah RK-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan RK-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?

Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan

permohonan sengketa Pilkada ke MK. Dengan gugatan itu, tentu saja diharapkan MK membuka peluang Pilkada Jakarta 2024 tidak selesai satu putaran.

Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan RK-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama. Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.

Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang. Namun, RK-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017.

Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu



diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Akhirnya kami putuskan terima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan KPU. Kami ucapkan selamat kepada Pramono-Rano yang akan memimpin Jakarta lima tahun ke depan," ujar Kang Emil di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat (13/12/2024) pagi.

Bagi Emil, keputusan itu adalah sikap terbaik. Tidak hanya bagi pasangan RIDO, tetapi juga bagi warga Jakarta, bangsa, dan negara. Kontestasi yang berpuncak pada 27 November lalu juga dinilai bisa jadi contoh politik santun, berkompetisi secara sehat, dan tegaknya demokrasi sebagai pembelajaran bagi generasi muda.

Menurut Emil, Jakarta ke depan akan selalu jadi episentrum politik di Indonesia. Maka, pihak-pihak yang berkontestasi harus elegan dan tidak boleh ada lagi politik yang transaksional.

"Mudah-mudahan Pramono-Rano bisa amanah, memenuhi aspirasi warga Jakarta. Hampir 40 persen suara dukun-



gan kepada Rido, yang tentu sangat besar, harus diperhatikan juga untuk membangun Jakarta lima tahun ke depan," tutur Emil.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, pihaknya sudah berikhtiar untuk mengerjakan dengan cara baik, bermartabat, dan teladan dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal itu menjadi pengalaman berharga. Apalagi, warga Jakarta berkenan membuka pintu rumah untuk diskusi, menyampaikan keluhan kesah, dan aspirasi

membangun Jakarta ke depan.

"Jika proses dicerai (dengan) hal-hal yang kurang baik, biasanya perjalanan ke depan akan kurang baik. Setelah ini, Rido akan rehat sejenak karena tensi kontestasi yang tinggi kemarin. Rido kembali ke keluarga masing-masing, tetapi bagi kami tidak ada kata akhir pengabdian bagi bangsa dan negara," ucap Emil.

Suswono mengamini pernyataan Emil. Politisi Partai Keadilan Sejahtera



(PKS) ini mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono-Rano yang mengguguli Rido dan Dharma-Kun.

"Mudah-mudahan harapan warga Jakarta bisa diwujudkan, termasuk aspirasi Rido yang sejalan dengan apa yang akan dilakukan Pramono-Rano," ujar Suswono.

Dia berharap apa yang dijanjikan dan disampaikan Pramono-Rano dapat terlaksana. Misalnya, hal baik dari gubernur sebelumnya akan dilanjutkan, diteruskan, bahkan ditingkatkan.

"Warga Jakarta bisa merasakan manfaat besar kepemimpinan lima tahun ke depan," kata Suswono.

Juru bicara Tim Pemenangan Pramono-Rano, Chico Hakim, mengatakan, tak

kan Pilkada ini dengan satu putaran. Kami mengucapkan terima kasih juga pada para paslon dan tim yang telah berkontestasi dengan kami," katanya.

Chico mengatakan, Pilkada DKI Jakarta kali ini berjalan kondusif, kompetisi berjalan sehat, tanpa riak-riak yang berarti, tanpa ada bermusuhan dan gesekan di masyarakat.

"Tentunya berterima kasih pada penyelenggara di KPU dan Bawaslu yang kami lihat dan rasakan, dan begitu juga masyarakat bisa melihat dan merasakan mereka sangat profesional dan bersikap netral dalam mengelola Pemilu atau Pilkada ini," katanya.

Bukan Musuh Bersama

Di sisi lain, kepemimpinan Pramono-Rano di Jakarta nanti dibayangi kekuatan partai pengusung RK-Suswono yang mendominasi DPRD DKI Jakarta. Meski Pramono-Rano diusung PDIP dan Hanura, namun hanya PDIP yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta.

PDIP tercatat memiliki 15 kursi di Kebon Sirih. Sedangkan, 91 kursi lainnya dikuasai KIM Plus. Rinciannya, PKS 18 kursi, Partai Gerindra 14 kursi, Partai Nas-Dem 10 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, Partai Demokrat 9 kursi, PSI 8 kursi, PPP 1 kursi, dan Perindo 1 kursi.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, berpendapat, relasi antara Pramono-Rano dengan DPRD akan berjalan baik meski mereka kini tak didukung mayoritas fraksi.

Menurutnya, hal itu tak lepas dari sosok Pramono yang dikenal luwes dan mampu berhubungan baik dengan seluruh pihak. Ia berpendapat sosok Pramono yang luwes inilah kemu-

dian membuat hubungan antara eksekutif dengan legislatif cenderung aman.

Agung mengatakan hal itu juga akan sangat bergantung dengan komunikasi Pramono dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti sebenarnya akan baik-baik saja dan itu pernah terjadi ketika Anies me-



Pilkada DKI Jakarta kali ini berjalan kondusif, kompetisi berjalan sehat, tanpa riak-riak yang berarti, tanpa ada bermusuhan dan gesekan di masyarakat.

adanya gugatan ke MK memantapkan kemenangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta.

"Ini adalah kemenangan bagi demokrasi dan kemenangan bagi warga Jakarta, baik itu yang memilih maupun tidak memilih Mas Pram dan Bang Doel. Hakikat sebuah pesta demokrasi yaitu adalah pesta untuk semua. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa dalam setiap kontestasi Pemilu," kata Chico, Kamis, 12 Desember 2024.

Chico mengatakan pihaknya sangat bangga dan bersyukur dengan kemenangan di Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, pasangan Pramono-Rano awalnya tidak diperhitungkan dalam kontestasi.

"Perjuangan kami tidaklah mudah, dimulai dari survei nol sekian persen bagi Mas Pram di bulan Juli, yang kemudian terus merangkak naik dan memenang-





nantang melawan Ahok akhirnya dengan sendirinya dinamika politik di Ibu Kota cair," kata Agung.

Menurutnya, kemenangan Pramono ini juga membuktikan bahwa ia merupakan tokoh yang memiliki sedikit musuh. "Ketika dia terpilih di Jakarta, dia mampu membuktikan kalau dia bisa eksis hidup di mana pun, di eksekutif, di legislatif, di kompetisi elektoral ketat sekalipun seperti itu," ucapnya.



Prabowo juga sangat membutuhkan stabilitas politik agar programnya bisa berjalan dengan baik.

Kalaupun ada dinamika, Agung berpendapat Pramono mampu mengatasinya karena dapat berkomunikasi sangat baik dengan seluruh pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.

"Tidak sampai pada satu tatanan ekstrem, bersengketa hebat," ujarnya.

Pakar komunikasi politik Universitas

Brawijaya, Verdy Firmantoro, juga berpendapat tak akan ada perseteruan yang berarti antara Pramono-Rano dengan DPRD DKI Jakarta. Sebab, Pramono memiliki rekam jejak yang sangat mumpuni dalam hal membangun relasi dengan berbagai pihak.

Meskipun, dalam hal tertentu bisa saja DPRD mengambil posisi yang kritis terhadap Pemprov DKI Jakarta di bawah Pramono-Rano. Namun, hal itu sebagai bagian check and balances belaka.

"Karena meskipun mereka tidak di-sung koalisi besar yang sekarang memihak RIDO. Tapi istilahnya kalau kita lihat atmosfer politiknya, Pram dan Doel tidak jadi musuh bersama. Jadi relatif tidak ke

sana," kata Verdy.

Verdy menduga ada peran Prabowo dan elite Gerindra dalam batalnya gugatan RIDO ke MK. Ia berpendapat langkah itu diambil guna menjaga stabilitas politik nasional ke depan.

Verdy menyebut di awal kepemimpinannya, Prabowo juga sangat membutuhkan stabilitas politik agar programnya bisa berjalan dengan baik.

"Menurut saya tidak jadi ke MK ini salah satunya kontribusi Presiden Prabowo. Istilahnya ya sudah kalau kita kalah ya sudah, jangan terlalu dibawa polarisasi lebih panjang lagi karena masih banyak agenda ke depan yang harus dikuatkan," pungkasnya. •



MASYARAKAT SUMSEL BELUM SIAP DIPIMPIN PEREMPUAN

Pertarungan politik lima tahunan yang sengit dan melelahkan mencuatkan fakta baru di Pilkada Sumsel 2024.

Faktanya bahwa, masyarakat Sumsel terkesan belum siap dipimpin oleh sosok perempuan sebagai kepala daerahnya.

Terbukti calon pemimpin perempuan banyak yang tumbang di arena politik Pilkada Sumsel 2024.

Hal itu bisa dilihat mulai dari gelanggang pertempuran di Pilgub Sumsel, Pilbup dan

Pilwalkot Palembang.

Kekalahan itu sudah mulai terlihat dari hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Sumsel data Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan data web KPU Sumsel.

Di panggung Pilkada Sumsel 2024 pemilihan kepala daerah Pilgub Sumsel dua pasangan pria lebih unggul telak yakni kontestan nomor urut 1 pasangan Herman Deru dan Cik Ujang (HDCU) memperoleh suara terbanyak, yakni 2.220.437 suara sah (51,62%).

Sedangkan dua kontestan lainnya berisikan calon wakil gubernur notabene kepala daerah perempuan keok.

Seperti kontestan nomor urut 2 pasangan Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia (ERA) meraih 1.082.241 suara (25,16%)

Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Mawardi Yahya dan RA Anita Noringhati (MATAHATI) yang mendapatkan 999.141 suara (23,23%).

Diketahui Riezky Aprilia menjadi pendamping Eddy Santana Putra (ESP) diusung tunggal oleh PDI Perjuangan.

Moncong putih memanfaatkan Putusan MK sehingga bisa mengusungkan calonya sendiri sempat membuat panggung politik di Pilgub Sumsel 2024 heboh.

Namun disisi lain publik Sumsel happy karena calon pilihan lain di luar calon petahana mantan Gubernur Sumsel Herman Deru dan mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya.

Menariknya, sosok Riezky Aprilia selaku politisi perempuan andalan partai berlogo banteng ini, memulai karirnya sebagai Financial Konsultan Astra CMG Life di Bandung pada tahun 2002 sampai 2003.

Pernah menjadi jurnalis sebagai staf Ardan Radio Main Works di Bandung tahun 2003 sampai 2004. Selanjutnya dia merambah ke dunia bisnis menjadi Owner Willa Ravi Housing Bandung, Owner Fabi Housing Bandung, Owner Kamo Housing Jakarta dan Owner



Green Hill Mua Thai Sport Camp Jakarta.

Karir politik Riezky Aprilia dimulainya saat mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Dia mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Saa itu juga Riezky mencempulungkan diri di dunia politik dan menjadi kader PDI Perjuangan dan duduk di Komisi IV DPR RI.

Dia pun akhirnya dipercaya oleh Moncong Putih untuk menjadi kader yang maju di panggung mega pertarungan Pilgub Sumsel melawan kontestan lainnya.

Sosok perempuan lain adalah Hj RA Anita Noeringhati yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) sejak 2019 yang dikenal sebagai Singa Betina Parlemen Bumi Sriwijaya.

Perempuan tegas yang lahir dan besar di Klaten dan Yogyakarta Jawa Tengah ini, sebelum masuk ke parlemen menjadi anggota DPRD Sumsel pada tahun 2009 adalah seorang Advokat yang cukup dikenal oleh masyarakat kota Palembang.

Anita selalu memberikan penjelasan bahwa politik itu bukan hanya dunia milik kaum laki-laki, namun perempuan juga mampu duduk di kursi parlemen DPRD Sumsel.

Anita merupakan anggota DPRD Sumsel dari Partai Golkar, dikenal karena memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hal kesetaraan dan kemandirian.

Ibu Aryuda Perdana Kusuma dan Ardhia Putri Kusuma merupakan sosok yang tegas.

RA Anita Noeringhati berharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada generasi perempuan. Ia ingin membuktikan bahwa kaum hawa memiliki potensi yang besar dalam dunia politik dan mampu menjalankan amanah dengan baik. Perempuan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah, bahkan melebihi ekspektasi.

Anita Noeringhati resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



• INFO PILKADA SUMSEL

(Unissula) Semarang setelah dikukuhkan oleh rektor Prof Dr Gunarto SH MHum dalam sidang senat terbuka di Auditorium Unissula Semarang, September 2023.

Anita berhasil menempuh studi doktoral tepat waktu, selama lima semester. Ia mampu meyakinkan penguji dan mempertahankan disertasinya yang

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, wanita berhijab ini sempat mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) untuk perwakilan Sumsel menuju Senayan, namun nasib belum berpihak dan dirinya gagal.

Berkat kerja keras dan kerja nyata yang ditunjukkan oleh dirinya selama ini berbuah manis, dirinya dipercaya oleh



berjudul "Rekonstruksi Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Perda Anggaran (Studi Analisis Hukum Berbasis Keadilan APBD Sumatera Selatan)".

Karya ini semakin menasbihkan ia sebagai ahli di bidang hukum yang sudah ia tekuni sejak menjadi advokat dari tahun 1993.

masyarakat dan partai untuk mendampingi mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, bertarung pada Pilkada Pilgub Sumsel 2024 sebagai Wakil Gubernur Sumsel.

Dipilihnya Anita untuk mendampingi Mawardi Yahya sebagai Cawagub Sumsel banyak menyita perhatian masyarakat Sumsel, karena sebelumnya

ya, Mawardi Yahya telah mendeklarasikan diri maju di Pilgub Sumsel 2024 yang akan datang berpasangan dengan mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo.

Sedangkan hal itu juga terjadi di Pilkada Muba pemilihan Pibup Musi Banyuasin calon kepala daerah perempuan tersungkur kalak telak dari dua pasangan pria.

Pasangan Mohammad Toha-Rohman unggul atas pesaing mereka dalam Pilkada 2024, Lucianty-Syaparuddin. Toha-Rohman memperoleh 215.515 suara. Sementara Lucianty-Syaparuddin memperoleh 130.774 suara

Kondisi miris pun terjadi di Pilkada Palembang pemilihan Pilwako 2024 cukup juga mengejutkan.

Kontestan nomor urut 1 pasangan duo Srikandi Fitrianti Agustinda dan Nandriani (Fitri Nandri) di prediksi bisa menang juga berefek kekalahan telak.

BLACKPINK julukan kepada Fitri Nandri duo pasangan Srikandi itu malahan berada di urutan ketiga dari dua kontestan pria menjadi lawannya RDPS dan Yudha-Bahar.

Diketahui dari hitungan tersebut paslon nomor urut 2, Ratu Dewa-Prima Salam (RD-PS) memperoleh 352.696 suara atau 46,52 persen dari suara sah.

Sementara paslon nomor urut 3, Yudha-Bahar memperoleh 229.895 suara atau 30,32 persen dan paslon nomor urut 1, Fitrianti-Nandriani memperoleh 175.495 suara atau 23,14 persen.

Padahal diketahui Politikus partai Nas-Dem Fitrianti Agustinda atau akrab disapa Finda merupakan mantan Wawako dua periode 2016-2018, 2018-2023. Dia juga menjadi perempuan pertama di Palembang mencalonkan diri sebagai calon Wako di Pilwako Palembang 2024.

Finda menjadi wawako mendampingi Harnojoyo dua periode 2016-2018, 2018-2023, awal karirnya Fitrianti Agustinda dilantik sebagai Wakil Wali Kota Palembang sisa masa jabatan tahun 2013-2018 menggantikan Wawako Palembang sebelumnya Harnojoyo yang naik menjadi Wako Palembang di Graha Bina Praja, Palembang, Sumatera Selatan, dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pada Rabu 31

Agustus 2016.

Wanita lulusan fakultas Hukum itu sepanjang sejarah Finda adalah wawako perempuan pertama di Palembang.

Bahkan perempuan kelahiran 5 Agustus 1976 ini, selama menjadi wawako dua periode sangat aktif melakukan kerja di luar kantor. Dia menjalankan kerjanya dengan melakukan kunjungan bahkan di hari weekend-nya hari Sabtu dan Minggu.

Finda setiap hari rajin berkunjung ke rumaharganya untuk melihat kondisi kesehatan dan ekonomi warga Palembang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Finda fokus kepada kesehatan karena sakit itu harus mengeluarkan kocek yang besar dinilai warga miskin tidak akan bisa sehat. Dia tidak mau warganya yang miskin mengalami kondisi itu dan mensosialisasikan berobat gratis.

Berobat gratis menggunakan Kartu Indonesia Sehat atau KIS banyak tidak diketahui oleh warga dan indikasi pembuatannya juga cenderung dibuat ribet oleh kelurahan dan kecamatan.

Finda turun kejalan agar pihak kelurahan dan kecamatan mengeluarkan KIS tanpa mempersulit apa lagi harus meminta uang kepada warga. Setiap kali Finda datang juga membawa Tim Kesehatan dari Puskesmas di setiap wilayah yang dikunjunginya.

Finda juga membawakan sembako dan uang agar warga miskin saat harus mendapatkan perawatan bisa tenang bisa makan dan memiliki uang pegangan. Amplop yang diberikan Finda itu sendiri kepada warga miskin setiap hari ditemuinya itu dari uang pribadinya.

Dikenal tegas dan pemberani, istri dari Dedi Sipriyanto itu juga konsisten dalam bertindak. Finda

pun menjadi salah satu pejabat daerah di Palembang mengayomi masyarakat tanpa membedakan status. Sebelum terpilih menjadi Wawako Palembang, aktif sebagai Anggota DPRD kota.

Sementara, Nandriani Octarina maju di Pilkada 2024 atas rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelum terjun ke dunia politik, Nandriani dikenal sebagai pengusaha muda. Nandriani merupakan Direktur PT Anugrah Muda Berkarya.

Perusahaan yang Nandriani kelola merupakan sektor usaha yang bergerak dibidang jual beli batubara di Jambi. Perusahaannya itu berdiri sejak 22 Juni 2022.

Maju bersama Fitri, Nandriani menjanjikan sejumlah program kerja dan prioritas utama mereka adalah membuat ekonomi masyarakat membaik. Kemudian persoalan banjir dan pengentasan kemiskinan juga jadi upaya Duo Srikan-di julukan Fitri-Nandriani, untuk kemajuan Bumi Sriwijaya.

Menurut dia program kerja tidak akan berjalan lancar dan optimal tanpa dukungan semua elemen, termasuk masyarakat.

"Perbaikan Palembang jadi ben-tuk perempuan-

judan Fitri-Nandriani mensejahterakan warga. Kami mengabdikan untuk Palembang, dengan slogan yang kami utamakan, perut terisi, kantong terisi dan anak bisa sekolah," timpalnya.

Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) Tarech Rasyid memberikan pujian kepada kaum perempuan yang terlihat mulai terdepan di dunia politik pada Pilkada 2024.

Hal itu dinilai maraknya kaum perempuan di Sumsel sangat aktif ikut terlibat di Pilkada Serentak 2024 yakni, mulai dari Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot.

Kendati banyak kaum perempuan yang gugur saat pertarungan melawan pria di panggung politik berdasarkan hasil hitung cepat (belum ada keputusan resmi KPU).

"Kalau saya melihatnya buka soal menang atau kalah. Tetapi Pilkada Serentak kali ini, perempuan di Sumsel mulai terlihat lebih terdepan di dunia politik (tidak ragu-ragu untuk maju sebagai kepala daerah melawan pria),"kata dia saat Podcast Bincang Politik di kantor infosumsel. ID Jalan Puncak Sekuning Palembang Jumat 6 Desember 2024.

Mantan Rektor Universitas IBA ini, menilai feminisme mulai kental di politik dan perjuangan kaum perempuan tidak mau tertinggal di dunia politik cukup berhasil. Dia menyebutkan contoh keberhasilan perempuan terbukti mendapatkan kuota 30 persen di parlemen.

"Lalu diperkuat dengan undang-undang untuk menjadi dasarnya. Dari sana saja sudah cukup kemenangan kaum perempuan eksistensi mereka diperkuat,"ucapnya.

Dia menegaskan perempuan di Sumsel sangat berkualitas dan tidak usah diragukan. Dia mencontohkan sosok perempuan Sumsel ada Ratu Sinuhun, merupakan penulis Kitab Simbur Cahaya.

Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumsel dengan ajaran Islam pada 1636-1642 M.

"Contohnya perempuan di Sumsel itu berkualitas dan cerdas Ratu Sinuhun. Perempuan di Sumsel yang menuliskan undang-undang. Politisi perempuan di Sumsel titisan Ratu Sinuhun,"pungkasnya. ●



PARADIGMA BARU TRANSMIGRASI

Kementerian Transmigrasi akan menjalankan visi besar dan paradigma baru transmigrasi yang diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya sebagai salah satu instrumen vital dalam pembangunan perekonomian nasional.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengatakan, saat ini masih banyak potensi sumber daya alam Indonesia yang belum dikelola secara optimal dan sebagian besar berada di luar Jawa dan Bali.

Selain itu, adanya tantangan mengenai kebutuhan membangun ketahanan pangan, air, dan energi. Adanya bonus demografi di mana banyaknya jumlah angkatan kerja usia produktif belum di - erap

lapangan kerja. Sehingga transmigrasi bisa menjadi instrumen vital dalam pembangunan nasional.

"Melalui pendekatan terintegrasi dan modern tersebut, transmigrasi akan kembali membuktikan relevansinya sebagai instrumen vital pembangunan nasional," kata Iftitah pada Hari Bhakti Transmigrasi ke-74 di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Untuk bisa sejahtera dan merata, Indonesia perlu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya bergantung pada cadangan sumber daya mineral yang terus berkurang. Kekayaan hutan tropis Indonesia juga tidak bisa terus-menerus dibiarkan tergerus akibat pendekatan industri yang ekstraktif.

"Di tengah ancaman krisis pangan, air dan energi global, perubahan demografi, dan dinamika geopolitik, urgensi reformulasi program transmigrasi menjadi semakin nyata," kata Iftitah.

Menurut dia, paradigma baru transmigrasi ke depan adalah strategi pembangunan kewilayahan komprehensif yang mengintegrasikan tiga dimensi vital, yakni pengembangan sumber daya manusia unggul, produktivitas berbasis teknologi, dan penguatan ketahanan nasional.

Untuk dimensi pertama difokuskan pada pengembangan SDM melalui program Transmigrasi Patriot. Yang utama tentu pembangunan karakter dan budaya kerja unggul agar transmigran lebih produktif melalui pelatihan dan pendidikan dasar ke-disiplinan. Hal ini dilakukan melalui hilirisasi SDM, di

Menteri Transmigrasi,
Iftitah Sulaiman Suryanagara

mana generasi muda terpilih penerima beasiswa S2 dan S3 di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), akan menjadi akselerator pembangunan kawasan.

"Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup inovasi dan pembangunan. Dengan demikian, transmigrasi menjadi program yang dijalankan dengan ilmu dan keterampilan berbasis sains," ucapnya.

Iftitah mencontohkan penerapan sains dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekosistem transmigrasi di kawasan transmigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, teknologi digunakan untuk memecah dan mengubah lahan batu menjadi lahan subur untuk kepentingan perkebunan.

Menurut dia, di tengah ancaman krisis pangan, air dan energi global, perubahan demografi, serta dinamika geopolitik, urgensi reformulasi program transmigrasi menjadi semakin nyata. Begitu pada kawasan sentra produksi pangan di lima provinsi strategis yang jadi model percontohan karena mengintegrasikan teknologi modern guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Kelak, program ini memungkinkan pengembangan Kawasan Transmigrasi Tematik seperti Kawasan Transmigrasi Maritim, Pariwisata, Peternakan dan lain-lain sesuai potensi masing-masing," ucap Iftitah.

Pada aspek ketahanan nasional, transmigran diintegrasikan dalam program Komponen Cadangan (Komcad) untuk menjadi garda terdepan ketahanan pangan, energi, dan air. Di perbatasan, seperti Entikong, Kalimantan Barat, kehadiran kawasan transmigrasi terbukti menjadi benteng kedaulatan.

Karena itu, Iftitah menekankan implementasi program transmigrasi membutuhkan orkestrasi presisi lintas sektor dengan berpayung pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Sehingga, Kementerian Transmigrasi fokus pada penyiapan SDM dan lahan, sementara pembangunan infrastruktur dikoordinasikan melalui Inpres kepada kement-

rian atau lembaga terkait.

Iftitah menambahkan berdasarkan hasil pendataan dan digitalisasi data, dari 3,1 juta hektare Hak Pengelolaan Lahan di 167 kabupaten membuka peluang bagi kolaborasi strategis, baik dengan badan-badan usaha, perguruan tinggi, ataupun pemerintah daerah melalui Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan demikian, kawasan transmigrasi berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bertransmigrasi secara mandiri. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan langkah awal berfokus pada 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.

terutama generasi muda," kata AHY.

Dia menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini tak hanya akan mendistribusikan manusia, tetapi juga kapasitas dan keahlian mereka. Upaya ini dilakukan menimbang masih adanya kesenjangan antar provinsi, antar Pulau Jawa dengan non Pulau Jawa, serta antara kota dan pedesaan.

Pihaknya mengharapkan transmigrasi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang diiringi dengan kesetaraan, pemerataan, dan keberlanjutan untuk masyarakat.

"Ini bagian terpenting dari paradigma baru yang telah ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi kita. Saya berharap kita da-



Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

"Upaya ini semua dengan kepemimpinan dan manajemen yang tepat, akuntabel, membuka peluang bagi Kementerian Transmigrasi untuk memberi nilai tambah dan kontribusi melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup inovasi dan pembangunan," ujar Iftitah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, paradigma baru transmigrasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi tidak hanya melihat angka (atau) statistik semata. Kuantitas tentu penting, kadang-kadang memang penting, tetapi kita ingin meningkatkan kualitas hidup. Jadi, pada dasarnya kita ingin meningkatkan kapasitas modal manusia kita,

pat membangun kolaborasi yang baik, sinergi, karena Kementerian Transmigrasi tidak dapat bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama erat dengan kementerian lain di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tetapi juga dengan pemerintah daerah, dengan lembaga akademis, dengan media dan semua elemen masyarakat sipil," ungkap AHY.

Melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, lanjutnya, berbagai bentuk gesekan di tengah masyarakat diharapkan pula dapat dicegah.

"Kita bisa membangun persatuan yang kuat, dan para transmigran harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ekosistem yang baru, dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus selalu hadir untuk mendukung keberhasilan program transmigrasi," ujar dia. ●

DESA CERDAS UNTUK KAWAL DANA DESA

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki program Desa Cerdas. Diharapkan, transformasi suatu desa menjadi Desa Cerdas dapat berkontribusi mengawal dana desanya agar benar-benar dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

"Kita kembangkan lagi (kontribusi Desa Cerdas) melalui pengawasan dana desa. Jadi semakin cerdas suatu desa itu, semakin bisa dipertanggungjawabkan (dana desa)," kata Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, saat membuka Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Serang, Banten, Selasa, 10 Desember 2024.

Sebelumnya, Yandri memang telah mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan optimalisasi pengawasan dana desa agar tepat sasaran melalui digitalisasi atau bantuan teknologi. Menurutnya, pengawasan secara manual terkendala keterbatasan sumber daya manusia, mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265 desa.

Langkah itu sejalan pula dengan keberadaan Program Desa Cerdas atau yang disebut pula dengan nama Desa Digital. Desa Cerdas berkaitan erat dengan Internet of Things (IoT), yakni perangkat-perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi untuk memudahkan aktivitas manusia.

Konsep desa cerdas mengacu pada penerapan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengoptimalkan

layanan publik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu 2020-2024 atau masa berlakunya Program Desa Cerdas, baru terdapat sekitar 14.000 desa

yang menggunakan dana desanya untuk program digitalisasi. Dengan demikian, pada 2025 diharapkan seluruh desa di Indonesia dapat benar-benar mempergunakan dana desanya un-



tuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan keberadaan Desa Digital.

Hal itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025 yang telah mengatur bahwa penggunaan dana desa, di antaranya diprioritaskan untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan keberadaan desa digital. Desa digital merupakan nomenklatur yang setara dengan Desa Cerdas sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 55 Tahun 2024.

Yandri pun mengingatkan jajaran Kemendes PDT, Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, hingga pendamping desa untuk mengawal seluruh desa di Indonesia mampu bertransformasi menjadi Desa Cerdas.

"Saya kira itu kebutuhan yang wajib kita kawal terus karena zaman sekarang sebenarnya bukan zaman yang ketinggalan lagi, ini zaman maju (dalam pemanfaatan teknologi digital)," kata Yandri.

Menurut Yandri, kolaborasi merupakan aspek yang bernilai penting untuk dilakukan dalam mewujudkan target seluruh desa di Indonesia mampu bertransformasi menjadi Desa Cerdas.

Dia pun menilai Desa Cerdas memiliki beragam manfaat, seperti membawa desa mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik.

"Mau lihat BPJS, mau bayar pajak, kemudian ada informasi desa, itu bagus sekali," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT, Ivanovich Agusta, menjelaskan, pelaksanaan Workshop Exit Strategy (WES) Desa Cerdas bernilai strategis bagi desa dalam menjalankan misi membangun Indonesia dari desa.

Sebelumnya, Ivan telah menyampaikan bahwa Workshop Exit Strategy Desa Cerdas bertujuan memastikan keberlanjutannya program Desa Cerdas dalam memberi kontribusi bagi percepatan digitalisasi di desa-desa di seluruh Indonesia.

"Exit strategy" dalam konteks Program Desa Cerdas merujuk pada ren-

cana atau strategi usai berakhirnya keterlibatan pihak pendukung. "Exit strategy" bertujuan untuk memastikan bahwa desa dapat mengelola dan melanjutkan program secara mandiri setelah dukungan eksternal berakhir atau berganti dengan menggunakan anggaran lainnya, seperti APBN.

Ivan mengungkapkan, program Desa Cerdas merupakan sumbangsih dari desa untuk mewujudkan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama terkait dengan digitalisasi.

Diketahui dalam misi Astacita-nya,

damping Desa Cerdas yang disebut sebagai kader digital di masing-masing desa.

Setelah itu, ribuan kader digital tersebut memperoleh pelatihan sebelum mereka melakukan praktik di lapangan. Para kader digital memiliki sejumlah tugas, seperti mengembangkan ruang digital desa, memberikan literasi digital kepada masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat dalam menyusun perencanaan kegiatan desa cerdas yang inklusif dan partisipatif mengacu pilar desa cerdas.

"Dan yang terakhir, di Desa Cerdas dilakukan monitoring, evaluasi, dan



Prabowo-Gibran menjadikan digitalisasi sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Akselerasi digitalisasi dilakukan di berbagai sektor kehidupan dengan tujuan, di antaranya untuk memperluas akses teknologi digital bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Ivan menuturkan, dalam kurun waktu 2020-2024, telah terdapat 3.000 Desa Cerdas atau desa yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas hidup warganya.

Terhadap 3.000 desa cerdas itu, Kemendes PDT dan para pihak terkait lainnya melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya adalah pemilihan pen-

publikasi. Disamping itu, sejak tahun lalu juga diserahkan pada seluruh desa digital, desa cerdas di 3.000 desa cerdas, seperangkat komputer dan kemudian pendanaan untuk pemberdayaan," kata Ivan.

Ke depannya, ia menyampaikan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan digitalisasi di desa terdapat pada penentuan prioritas penggunaan dana desa pada 2025 yang di antaranya digunakan untuk teknologi informasi untuk penetapan desa digital.

"Jadi harapannya, ketika nanti undang-undang ini diterapkan, paling tidak 3.000 Desa Cerdas yang sudah bekerja sama sampai saat ini itu bisa menjalankan dengan lebih cepat," ujar Ivan. ●

BERDAYAKAN MASYARAKAT LEWAT KAMPUNG NELAYAN SEJAHTERA

Kementerian Sosial mengembangkan program Kampung Nelayan Sejahtera di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk 93 kepala keluarga atau 259 jiwa yang terdampak parah akibat banjir rob.

sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu tersebut dan ditargetkan sudah dapat diselesaikan pada Januari 2025.

"Dengan mengucap Bismillah, semoga pembangunan kampung nelayan korban rob di Eretan Kulon Indramayu ini berjalan lancar," kata

dan Habitat for Humanity Indonesia. Total bantuan untuk pembangunan kampung sejahtera itu sebesar Rp16,1 miliar.

"Saya di sini mewakili bapak Menteri Sosial untuk peletakan batu pertama di lokasi pemindahan warga Eretan Kulon Indramayu yang terkena banjir rob," kata Agus Jabo.

Menurut Agus Jabo, pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu bukan hanya berkaitan pembangunan fisik, melainkan juga terdapat



Pada program tersebut, mereka akan direlokasi ke tempat baru yang nantinya akan dibangun menjadi Kampung Nelayan Sejahtera. Di atas lahan seluas 1,6 hektar tersebut, setiap KK akan dibangun rumah bertipe 36 dengan luas tanah 60 meter persegi.

Di dalam Kampung Nelayan Sejahtera tersebut juga dibangun fasilitas umum seperti community center, sarana ibadah, taman ramah anak dan lansia, sentra kerajinan dan UMKM,

Agus Jabo ketika meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera, Indramayu, Kamis, 5 Desember 2024.

Pada momen tersebut, Agus Jabo turut menyerahkan secara simbolis bantuan pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu kepada empat orang penerima manfaat. Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),

unsur pemberdayaan yang dilakukan Kemensos agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri.

Selain peletakan batu pertama, Agus Jabo juga melakukan penanaman pohon di lokasi yang nantinya akan menjadi Taman Perdamaian Forum Keserasian Sosial di Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu itu.

"Jadi kita menanam dua pohon, yang pertama pohon mangga yaitu simbol ciri khas masyarakat Indramayu. Yang kedua pohon kelapa gad-

ing sebagai simbol kebermanfaatan karena di situ ada kulitnya, patoknya, kelapanya, airnya yang bisa dimanfaatkan,” ucap Agus Jabo seraya mengatakan dengan penanaman kedua pohon itu menjadi simbol harapan kebermanfaatan bagi masyarakat Indramayu.

“Bismillah, untuk masyarakat Indramayu umumnya, dan masyarakat Eretan Kulon khususnya, dengan membaca Bismillah, pembangunan ini untuk kesejahteraan masyarakat Indramayu,” kata Agus Jabo.

Selain itu, Agus Jabo juga menyerahkan bantuan kearifan lokal sebesar Rp50 juta kepada kelompok Kencana Wulung, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu. Kelompok tersebut bergerak dalam

dan BUMN untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa mandiri, termasuk memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

“Yang tidak bekerja formal, pemerintah mendukung usahanya. Masyarakat harus berdaya dan mandiri,” kata Agus.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, mengatakan program Kampung Nelayan Sejahtera turut berupaya memberdayakan masyarakat.

“Bukan hanya rumah dan fasilitas tetapi untuk mendukung kemandirian ekonomi, kami memberikan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran,” kata Mira.

Menurutnya, saat ini masyarakat yang akan direlokasi telah dilatih

dan keselamatan bagi para nelayan dan keluarganya.

“Pembangunan rumah dibangun 93 unit, rumah dengan tipe 36, luas tanah 60 m dengan dua kamar,” katanya.

Ia berharap pemda dapat melakukan pemantauan di lapangan. Keluarga penerima manfaat juga dapat membantu percepatan proses pembangunan.

“Saat sudah terbangun, bapak ibu bisa segera pindah,” katanya.

Terkait hal ini, Kepala Kelompok Masyarakat (Pokmas) Nelayan, Wanto (41), bersyukur Kemensos memberikan bantuan tersebut. Apalagi selain rumah, juga dibangun fasilitas umum lainnya.

“Alhamdulillah kami ucapkan ter-



seni pentas sandiwara, ketoprak, dan wayang dengan memberdayakan 25 orang anak-anak dan remaja, yang mana sebagiannya merupakan anak-anak nelayan penerima program Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu.

Agus Jabo menambahkan, pembangunan rumah untuk keluarga rentan menjadi prioritas kerja Kemensos. Ia menuturkan pemerintah bersinergi dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, swasta,

pemberdayaan pengolahan ikan seperti kerupuk ikan, bakso, dimsum, hingga usaha bengkel las.

“Jadi pemberdayaan ini dilakukan setelah melalui asesmen berkaitan peminatan warga agar tepat sasaran. Kami harap pemberdayaan ini dapat berkelanjutan dan mampu menyangga ekonomi masyarakat,” ucap Mira.

Mira mengatakan masyarakat yang akan direlokasi sebelumnya tinggal di sisi pantai. Ia berharap kampung ini akan memberikan jaminan keamanan

ima kasih, sangat dibutuhkan bagi kami karena disana sering banjir,” katanya.

Adapun bantuan pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera berupa Rumah Sejahtera Terpadu (RST), taman ramah anak dan lansia, sarana olahraga, masjid, balai warga serbaguna, gerai UMKM, sentra kerajinan, jalan dan drainase, toilet umum, bantuan isi rumah, kearifan lokal, bantuan pemberdayaan, dan paket sembako. ●

APBD HABIS DIPAKAI RAPAT BUKAN BUAT RAKYAT

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyinggung anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan penggunaan anggaran lebih besar untuk rapat hingga studi banding. Di hadapan para kepala daerah, Tito memaparkan grafik pendapatan dan belanja daerah.

"Kemudian yang sebelah kanan sekali, ini kalau kita mau paksa-paksa juga membuat program dia udah nggak bisa. Karena warna biru-nya (belanja) udah terlalu dominan. Transfer pusatnya itu sudah dominan, PAD-nya kecil, pendapatan lokalnya kecil," kata Tito di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penghargaan APBD Award 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Desember 2024.

"Jadi kita kasih lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya makan bergizi, membuat perumahan di daerah itu bagi rakyat miskin yang nggak punya, (anggaran lagi) dia. Dia memang uangnya nggak ada, mau digencet juga gimana nggak ada," lanjutnya.

Tito juga
me-

nyebut ada penggunaan anggaran program yang tidak efektif. Sebagai contoh, ada daerah yang menganggarkan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari total anggaran itu, hanya Rp2 miliar yang disalurkan ke masyarakat, selebihnya dipakai studi banding yang malah lebih besar.

"Anggaran Rp 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding dan lain-lain Rp 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak-anak di bawah 2 tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi yang stunting itu Rp2 miliar yang masuk ke perut itu. Yang lainnya studi banding," tegas Tito.

Meski begitu, Tito tak merinci nama daerah yang dimaksudnya. Namun, dia meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri dan semua pihak untuk mengawasi belanja yang tak efisien, termasuk anggaran perjalanan dinas. Dia menyebut baru-baru ini anggaran perjalanan dinas kementerian/ lembaga sudah dikurangi hingga separuhnya.

"Dan sudah dikunci. Untuk kementerian/ lembaga sudah dikunci oleh beliau. Kemarin sore jam 17.00 saya diskusi dengan Menkeu itu untuk perjalanan dinas dikurangi separuh K/L," tuturnya.

Lebih lanjut,

Tito juga menyinggung soal kegiatan rapat dalam rangka penguatan yang kerap dilakukan pemerintah daerah. Ia meminta Pemda untuk mengubah mindset untuk tidak lagi melakukan kegiatan pemborosan.

"Kapan kuat-kuatnya ini barang. Ini tolong rekan-rekan kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda, sama BPKAD. Ini utamanya di Bappeda sama BKAD. Jujur-jujur. Tolong lah mindset-nya beru-



bah. Karena kasihan rakyat," ujar Tito.

Tito juga menegaskan akan "memelototi" pertumbuhan ekonomi di daerah setiap pekannya mulai awal 2025 untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Nantinya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar rapat koordinasi mingguan khusus pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan

nangani inflasi.

Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi daerah menjadi agregat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden menargetkan 8 persen (pertumbuhan ekonomi nasional), sebetulnya sangat bisa di samping program-program lain, kalau semua daerah bergerak untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing," katanya.

Selain itu, Tito mengatakan bahwa

perusahaan dan hampir separuhnya "berdarah". Akhirnya, kerugian itu pun berdampak pada PAD yang kurang optimal.

"Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel," ungkap Tito.

Dia pun mengaku sudah mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan. Karena jika ope-



selalu terpantau.

"Mana yang bergerak, mana yang tidak. Yang nggak bergerak, ya nanti kita akan datang. Yang bergerak, ya kita kasih reward," kata Tito.

Mendagri meminta para kepala daerah untuk mengubah pola pikirnya agar membuat pendapatan daerah lebih banyak dan belanja yang lebih efisien. Jika kebijakan anggaran banyak diarahkan untuk kegiatan Masyarakat, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah. Jika setiap daerah bergerak untuk membuat keuangan lebih efisien, maka pertumbuhan ekonomi daerah bakal meningkat dan bisa me-

PAD bisa hidup jika sektor swasta di daerah tersebut juga hidup. Maka, dia pun mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mempermudah izin usaha swasta.

"Hidupkan. Berikan kemudahan perizinan. Berikan lahan kepada mereka dan lain-lain kemudahan. Jangan dibalik-balik, seperti yang di Maluku, orang mau membangun minimarket, dipalakin dari awal," katanya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia merugi karena maraknya "ordal" atau orang dalam yang bekerja tak profesional. Saat ini, BUMD di Indonesia berjumlah 1.057

rasionalnya diteruskan, maka kerugian yang dialami BUMD harus ditambal oleh APBD.

"Nah, ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi," ungkap Mantan Kapolri itu.

Dia mengatakan, BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD. Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan. ●



KELAS MENENGAH MAKIN SUSAH

2025 diperkirakan akan menjadi tahun penuh gejolak bagi kelas menengah di Indonesia. Alasannya karena pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru yang akan mulai diberlakukan, dari kenaikan pajak hingga penghapusan sejumlah subsidi.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan, kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, memiliki potensi besar menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya

kelompok kelas menengah yang sering kali tidak termasuk penerima bantuan langsung.

Mat Nur, sapaan Achmad Nur Hidayat, menyatakan, salah satu kebijakan yang akan berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2025, dari 11 persen menjadi 12 persen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyelaraskan tarif pajak Indonesia dengan standar internasional. Namun, dampaknya akan langsung terasa pada harga barang dan jasa, yang otomatis naik," ungkap Mat Nur, Selasa, 17 Desember 2024.

Kenaikan ini diperkirakan akan paling berdampak pada kelas menengah yang tidak mendapatkan subsidi, teta-

pi tetap terpaksa mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari.

"Apalagi, kenaikan upah UMP hanya 6,5 persen, yang diperdiksi tidak akan mampu mencukupi kenaikan inflasi dan kenaikan harga akibat PPN 12 persen tersebut. Bahkan, dengan PPN 12 persen tersebut, Indonesia termasuk negara penghisap pajak terbesar di ASEAN setelah Filipina. Beruntung mereka yang berdomisili di Vietnam, Malaysia, Singapore dan Thailand tidak mengalami kenaikan sebesar Indonesia," ungkapnya.

Dengan daya beli masyarakat yang sudah melemah akibat inflasi dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan PPN ini berpotensi memperburuk situasi ekonomi rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli kelas menengah telah menurun sekitar 5 persen pada 2024 akibat



tekanan inflasi.

Kebijakan lainnya yang juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kenaikan Tarif Listrik Non-Subsidi, seperti yang sudah disiratkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya untuk pelanggan non-subsidi.

“Penyesuaian ini bertujuan menutupi kenaikan biaya produksi listrik akibat harga energi global yang terus meningkat. Dampaknya jelas rumah tangga kelas menengah yang menjadi pelanggan golongan non-subsidi akan menghadapi kenaikan biaya listrik bulanan,” kata Mat Nur.

Ia menyatakan tarif listrik merupakan komponen penting dalam pengeluaran rumah tangga. Menurut laporan Kementerian ESDM, rumah tangga kelas menengah rata-rata menghabiskan 10 persen dari pendapatannya untuk membayar listrik. Jika tarif listrik naik, pengeluaran ini diperkirakan akan meningkat menjadi 12-15 persen dari pendapatan.

“Kebijakan lainnya adalah wacana penghapusan Subsidi BBM dan LPG. Diberitakan, mulai 2025, pemerintah berencana mengubah skema subsidi BBM dan LPG. Subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang dinilai berhak berdasarkan data yang tercatat di sistem pemerintah,” ujarnya.

Skema ini, dinyatakan bertujuan untuk meningkatkan akurasi penyaluran subsidi, tetapi efek sampingnya adalah kenaikan harga BBM dan LPG bagi kelompok yang tidak memenuhi kriteria subsidi, termasuk kelas menengah.

Kenaikan harga BBM akan memicu efek domino pada biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya meningkatkan harga kebutuhan pokok. Sebagai contoh, kenaikan harga BBM sebesar 10 persen dapat mendorong kenaikan harga barang sebesar 3-5 persen.

“Dampaknya sangat terasa, terutama bagi masyarakat perkotaan yang sangat bergantung pada transportasi berbasis BBM,” ujarnya lagi.

Iuran BPJS Kesehatan pun dinyatakan akan mengalami penyesuaian iuran pada 2025. Pemerintah mengklaim kenaikan ini diperlukan untuk

meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Namun, kelas menengah yang umumnya tidak menerima subsidi kesehatan akan merasakan beban tambahan ini. Dalam skema baru, peserta mandiri golongan kelas menengah diperkirakan harus membayar iuran yang lebih tinggi hingga 20 persen.

“Ini akan menjadi tantangan baru, mengingat banyak rumah tangga ke-

las menengah sudah kesulitan mengatur anggaran untuk kebutuhan pokok lainnya,” kata Mat Nur.

Pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) pun yang dinyatakan akan dinaikkan, dari saat ini sebesar 2,2 persen dari nilai pembangunan akan naik menjadi 2,4 persen seiring kenaikan tarif PPN.

“Kebijakan ini akan memengaruhi



Menteri Keuangan, Sri Mulyani

masyarakat yang merencanakan pembangunan rumah atau renovasi besar. Akibatnya, biaya properti semakin mahal, yang dapat menurunkan minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor ini,” tuturnya.

Jika sudah ditetapkan, Mat Nur mempertanyakan apa yang bisa dilakukan oleh kelompok kelas menengah. Ia menyatakan kelas menengah akan terjebak di antara kelompok bawah yang menerima bantuan so-

hasil Pemilu 2024 menyebabkan kelas menengah jauh lebih menderita daripada periode sebelumnya,” tuturnya.

Menurut sebuah survei dari Inventure Research dan Bisnis Indonesia pada 2024, hampir 49 persen rumah tangga kelas menengah melaporkan penurunan daya beli akibat inflasi dan kenaikan biaya hidup. Dengan kebijakan baru 2025, angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 60 persen, mempercepat penyusutan kelas me-

bantuan sosial bagi kelompok rentan di kelas menengah,” ungkap ekonom senior ini.

Di sisi lain, masyarakat kelas menengah perlu mulai melakukan penyesuaian untuk menghadapi 2025. Perencanaan keuangan yang matang, seperti mengurangi pengeluaran tidak penting dan mencari sumber pendapatan tambahan, menjadi langkah yang sangat diperlukan. Selain itu, masyarakat juga dapat memperkuat literasi keuangan untuk lebih memahami dampak kebijakan ekonomi dan mengelola risiko finansial dengan lebih baik.

“Tahun 2025 akan menjadi tahun penuh tantangan bagi kelas menengah Indonesia. Karena kebijakan baru pemerintah, yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi anggaran cenderung memberikan dampak yang tidak seimbang pada kelompok ini. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah mitigasi, kelas menengah yang selama ini menjadi pilar perekonomian nasional bisa terancam menyusut lebih jauh. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri dengan bijak, sementara pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Pengamat perpajakan dari Universitas Surabaya (Ubaya), Nobertus Purnomolastu, menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen akan memberikan dampak signifikan bagi konsumen dan produsen. Ketimbang menaikkan PPN menjadi 12 persen, menurutnya pemerintah lebih baik meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

“Apabila permintaan atau demand menurun akibat kenaikan PPN menjadi 12 persen, dampaknya akan merambat ke berbagai sektor, termasuk pajak penghasilan (PPh),” kata Nobertus.

Nobertus menyarankan agar pemerintah lebih fokus meningkatkan rasio pajak yang saat ini masih tergolong rendah, yakni sekitar 9-10 persen.

“Dari segi ekonomi, harga barang pasti naik, dan ini otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat. PPN kita akan jadi salah satu yang paling tinggi di Asia, tetapi tax ratio-nya malah ren-



Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago



Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan

sial dan kelompok atas yang memiliki sumber daya lebih besar untuk menghadapi kenaikan biaya hidup.

“Kelas menengah dipaksa menanggung beban penuh dari kebijakan pemerintah tanpa kompensasi yang memadai. Padahal, pemerintahan baru Prabowo-Gibran memimpin belum 100 hari dan Wakil Rakyat DPR juga baru berganti siklus, namun kebaruan

nengah di Indonesia.

“Pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola dampak kebijakan ekonomi terhadap kelas menengah. Transparansi dan komunikasi yang baik mengenai alasan di balik kebijakan serta upaya untuk meringankan dampaknya harus menjadi prioritas. Harapannya pemerintah bisa memperluas akses program subsidi atau

dah,” ungkap Nobertus.

Ia menilai, kenaikan PPN menjadi 12 persen bersifat regresif, karena beban pajak ini secara tidak langsung akan sama dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah maupun tinggi. Menurutnya, keadilan perpajakan seharusnya lebih diutamakan melalui pajak penghasilan.

“Bagi orang yang penghasilannya lebih besar, maka bayar pajaknya juga lebih besar. Bukan dengan cara menaikkan PPN menjadi 12 persen,” kata Nobertus.

Keuangan Seret

Seumlah pengamat ekonomi menyebut Pemerintahan Prabowo Subianto tak bisa menutupi jika keuangan negara sedang seret. Sehingga, bisa dipastikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pusing tujuh keliling.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menyebut, pemerintahan Prabowo-Gibran terkesan ngotot untuk mengerek naik PPN menjadi 12 persen sebagai pertanda negara kurang uang untuk membiayai program pemerintah.

“Itu tanda-tanda negara kurang uang. Kalau lagi bicara sumber uang, berarti negara, pemerintah kurang uang, berarti. Ya pajak (digenjot), cari sumber-sumber pajak,” kata Andrinof di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

Menurut Andrinof, langkah mengerek pajak atau menambah utang dengan jor-joran menerbitkan Surat Utang Negara, terpaksa dilakukan lantaran penerimaan negara tidak maksimal. Padahal, pemerintah bisa menemukan cara lain ketimbang menetapkan PPN 12 persen per 1 Januari 2025 yang banyak dikritik masyarakat.

Misalnya, mengoptimalkan penerimaan negara dari hasil pengolahan sumber daya alam (SDA). “Bukan enggak ada sumber lain, ada yang menjadi haknya negara itu ada, tapi enggak ada diambil. Ya, itu contohnya bagi hasil sumber daya alam. Itu contoh nyata,” kata Andrinof.

Sementara, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, tegas menyebut keuangan negara saat ini sangat terbatas. Hal itu tercermin dari

pemangkasan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Sebelumnya, pengusaha Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa program MBG berlangsung dua kali, yakni pagi dan siang, lalu diubah menjadi sekali dalam sehari.

“Namun, langkah ini, saya pikir cukup realistis. Berbagai penyesuaian di program MBG ini, patut diapresiasi. Menunjukkan betapa seriusnya Prabowo dalam mewujudkan janji kampanye,” terang Anthony.

Langkah Prabowo ini, menurut Anthony, seratus delapan puluh derajat ketimbang era Jokowi yang secara



Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat



Pengamat perpajakan dari Universitas Surabaya (Ubaya), Nobertus Purnomolastu

“Selain itu, jumlah penerima manfaat dikurangi menjadi hanya 40 persen dari rencana 82 juta orang. Dan terakhir, anggaran per porsi turun dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per orang,” paparnya.

Dengan penyesuaian ini, anggaran untuk program MBG bisa ditekan dari perkiraan Rp450 triliun menjadi Rp71 triliun pada 2025. Atau setara 2 persen dari total APBN 2025 yang mencapai Rp3.600 triliun. Atau sekitar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

sadar memilih untuk tidak memenuhi janji kampanye. “Bahkan, banyak kebijakan Jokowi bertolak belakang dengan janjinya,” ungkapnya.

Misalnya, janji pemberantasan korupsi, tapi faktanya KPK malah dilemahkan, dengan melanggar independensi KPK yang diatur dalam TAP MPR. “Jokowi secara brutal menggunakan institusi hukum sebagai alat kriminalisasi lawan politik di satu sisi, atau untuk melindungi para koruptor di lain sisi,” imbuhnya. •



KEPALA DAERAH DIPILIH DPRD

Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis, 12 Desember 2024.

Prabowo mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, hingga India yang dinilainya lebih efisien karena DPRD yang melakukan pemilihan kepala daerahnya.

Menurut Prabowo, nantinya, anggaran negara untuk Pilkada dapat dialihkan untuk keperluan lainnya.

Dalam pidatonya itu, Prabowo juga menyoroti biaya politik yang dikeluarkan para kontestan di gelaran Pilkada. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Ia lalu bertanya pada para elit politik yang hadir dalam acara itu.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun

dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.

Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum yang ada di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, bagaimana?" tanya Prabowo.

Dia pun meminta para politisi untuk tidak terlalu mendengarkan saran-saran konsultan asing yang biasanya salah satu contohnya menyarankan agar penyelenggaraan pilkada dilakukan berbulan-bulan.

Prabowo kemudian menyampaikan, sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju, dirinya membebaskan seluruh partai untuk mencalonkan kandidat kepala daerah masing-masing.

Menurut Prabowo meskipun ada menang dan kalah, namun tidak men-

jadi masalah. Yang terpenting, seluruh pemimpin dapat memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah tengah mengkaji perubahan mekanisme Pilkada. Wacana perubahan mekanisme Pilkada sudah berlangsung sejak zaman pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Usulan tersebut merupakan ide yang telah lama dibahas oleh para ketua umum partai politik.

"Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa," kata Supratman di Istana Merdeka Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Supratman beranggapan mekanisme Pilkada melalui DPRD bukan kemunduran demokrasi. Dia memandang sistem demokrasi tidak han-

DPRD.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat partisipasi pemilihan atau masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 berada di bawah 70 persen. Capaian ini lebih rendah dari tingkat keterlibatan masyarakat saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

"Teman-teman bisa saksikan sendiri betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian terjadinya inefisiensi," ujar Supratman.

Meski begitu, pemerintah belum mengambil keputusan apapun. Dia mengatakan perubahan mekanisme pilkada harus melalui telaah dari pihak DPR dan pemerintah agar ada pandangan yang lebih komprehensif.

"Sehingga nanti dalam pembahasan undang-undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan," kata

dari proporsional terbuka menjadi tertutup, KPU tak ikut berpendapat. Pada akhirnya, KPU mengikuti aturan yang ada.

Afif pun menyoroti revisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2025 DPR. Dia berpandangan, hal ini dapat menjadi waktu yang pas untuk membahas segala evaluasi dalam proses pemilihan.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamuddin, sepakat dengan usulan Prabowo, namun untuk tingkat gubernur. Sedangkan, pilkada tingkat kabupaten/kota menurutnya masih perlu dilaksanakan secara langsung.

Sultan menilai pemilihan gubernur menjadi tidak relevan mengingat posisi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.



Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum yang ada di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, bagaimana.

ya menyoal prosedur pemilihan umum secara langsung.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan pemilihan langsung cenderung menimbulkan polemik dan gejolak di masyarakat. Selain itu, ia menganggap pemilihan langsung terlalu menghabiskan anggaran negara.

"Beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada parpol untuk melakukan kajian terkait hal itu. Dan saya pikir ini masih lama. Pilkada maupun pemilu kita masih di tahun 2029," ujar Supratman.

Supratman mengatakan tren meningkatnya angka golput pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu indikator pertimbangan alasan Prabowo membuka peluang mengembalikan Pilkada dipilih oleh



Supratman.

Sementara itu, Ketua KPU, Mochamad Afifuddin, tak mau mengomentari usulan tersebut dan akan mengikuti saja aturan yang berlaku.

"Kami sebagai penyelenggara, dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," kata Afifuddin di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Afif mengatakan, diskusi mengenai kepala daerah dipilih oleh DPRD bukanlah hal yang baru. Namun, KPU sebagai penyelenggara pemilihan menjalankan amanat undang-undang.

Ia mencontohkan, saat bergulir isu perubahan sistem pemilihan legislatif

"Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati," kata Sultan, Jumat, 13 Desember 2024.

Menurut Sultan, apa yang disampaikan Prabowo merupakan kekhawatiran banyak pihak dengan proses Pilkada yang dinilai semakin tidak efisien.

Sultan mengatakan pernah menyinggung isu ini dengan Prabowo dalam beberapa pertemuan. Ia juga berpandangan, Pilkada langsung tak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam Pilkada. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya partisipasi masyarakat di Pilkada 2024. ●

44 RIBU NAPI DAPAT AMNESTI

Pemerintah berencana untuk memberikan pengampunan atau amnesti hukuman kepada 44 ribu narapidana. Usulan tersebut merupakan hasil rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri yang menangani bidang hukum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan, angka 44 ribu itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Presiden Prabowo. Alasannya, lembaga pemasarakatan alias lapas saat ini semakin penuh.

"Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman di Istana Merdeka Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Pemerintah menargetkan penguangan kelebihan kapasitas di lembaga pemasarakatan secara nasional hingga 30 persen melalui program amnesti tersebut. Namun, kepastian amnesti terhadap 44 ribu narapidana itu juga harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah akan berdialog dengan DPR guna meningkatkan angka narapidana yang bakal diberikan penghapusan hukum. Meski begitu, Suprat-

man mengatakan pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada para pengedar dan bandar narkoba.

Amnesti juga bakal menyasar kepada pengguna narkoba yang kedapatan membawa narkoba dengan kadar di bawah 1 gram yang berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

"Kalau nanti ada perubahan surat edaran Mahkamah Agung (yang mengatur ketentuan sanksi narkoba) dari 1 gram menjadi maksimal 5 gram, itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi," ujar Supratman.

Selain para pecandu narkoba, narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti yakni tahanan kasus penghinaan terhadap presiden dan perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pengampunan juga akan diberikan terhadap warga binaan aktivis papua sejumlah 18 orang.

"Ini bagian dari upaya pemerintah melakukan upaya rekonsiliasi terha-





dap teman-teman di Papua," ujarnya.

Tak hanya itu, terpidana yang bakal menerima pengampunan hukum adalah warga binaan yang mengalami sakit berkepanjangan dan mengalami gangguan kejiwaan.

"Juga ada yang terkena penyakit berkepanjangan, termasuk HIV itu ada kurang lebih 1.000 orang," kata Supratman.

Rapat terbatas itu juga menyepakati usulan untuk meminta para tahanan yang mendapat amnesti bersedia mengikuti kegiatan produktif, seperti proyek swasembada pangan dan menjadi anggota komponen cadangan.

"Bagi yang umur produktif dan masih kuat," ujarnya.

Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, meminta Presiden Prabowo meniru Presiden BJ Habibie yang lebih fokus pada kasus politik di era lalu.

Habibie saat itu menggunakan Hak Amnesti kepada kelompok politik yang dipenjara Soeharto, seperti Sri Bintang Pamungkas, Xanana Gusmao, Budiman Sudjatmiko, Timsar Zubil, dan ratusan tahanan politik lainnya.

Syahganda menyayangkan rencana Menteri Hukum yang lebih berorientasi dan fokus pada tahanan kriminal, yang

merupakan sampah masyarakat.

Menurut Syahganda, Hak Amnesti, Abolisi dan Grasi yang dimiliki presiden harus diutamakan untuk kebutuhan menegakkan demokrasi dan HAM. Sampai saat ini berbagai kasus politik di era Joko Widodo masih menggantung.

"Dalam kasus makar misalnya, status



Ini bagian dari upaya pemerintah melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua.

hukum Mayjen (purn) Kivlan Zen, (alm) Brigjen (purn) Adityawarman, Brigjen Sofyan Jacob, (almh) Rachmawati Soekarnoputri, (alm) Lieus Sungkarisma, Eggi Sudjana, Hatta Taliwang, dan banyak lainnya belum SP3," katanya, Sabtu, 14 Desember 2024.

Selain itu, kasus Jumhur Hidayat, terkait kritik RUU Omnibus Law, be-

lum final di MA. Beberapa laporan kriminalisasi kepada Habib Rizieq, Rocky Gerung, dan lain sebagainya juga masih menggantung.

Syahganda yang juga menjadi koordinator Persaudaraan Tahanan Politik era Jokowi, meminta agar Prabowo memberikan Abolisi dan atau Amnesti kepada semua tahanan politik yang terjadi selama era Jokowi, baik yang masih dipenjara seperti Gus Nur dalam kasus ijazah palsu, maupun yang telah keluar penjara.

Orang-orang yang keluar penjara saat ini mengalami nasib buruk berupa kesulitan membuat SKCK (surat kelakuan baik), kehilangan mata pencaharian dan mengalami gangguan fisik.

Sebagian besar mereka, menurut Syahganda, merupakan pendukung garis keras Prabowo di era penangkapan itu, seperti Mayjen (purn) Sunarko, Laksamana Madya (purn) Sony, Zainuddin Arsyad, dan Eko Suryo Santjojo. Sepantasnyalah Prabowo memprioritaskan urusan kasus politik, bukan kriminal.

Syahganda juga berharap agar janji Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco, kepadanya beberapa waktu lalu, dipenuhi, yakni adanya kompensasi di luar rehabilitasi politik bagi semua korban. ●

GEJOLAK

Gunawan Effendi

Terbukti sudah dinamika politik dan ekonomi global sedang bergejolak. Faktor ketidakpastian bereskalasi dengan cepat. Rentetannya, sedikit-banyak, akan sampai ke dalam negeri.

Yang terbaru, pada dasarian (10 hari) pertama Desember 2024, gejolak paling mencolok terjadi di Suriah atau Syria --ada pula nama lainnya: Syam. Dari sisi geopolitik dan geostrategis begitulah Suriah sebagaimana banyak nama bagi negeri tempat bangsa-bangsa lain memiliki banyak kepentingan. Pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Posisinya yang terletak di sisi timur Laut Tengah (Mediterranean Sea), pertemuan tiga benua: Afrika, Asia, dan Eropa, membuatnya membuatnya demikian.

Di darat, Suriah berbatasan langsung dengan Turki di utara, Irak di timur juga tenggara, Yordania dan Israel di selatan, serta Lebanon di barat daya. Jadi, gejolak Suriah pada penghujung 2024 merupakan rentetan dari ketidakstabilan di kawasan itu. Paling tidak, situasi di Gaza yang juga terletak di timur Laut Tengah masih terkait erat dengan rentetan gejolak itu.

Nah, di dalam negerinya sendiri, Suriah memiliki gejolaknya sendiri. Para ahli geopolitik kerap mengambil momentum Arab Spring (musim semi Arab) 2010 sebagai titik awal gejolak kawasan itu.

Nah, di Suriah, pada Maret 2011, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Ba'ath menyebabkan protes skala besar dan unjuk rasa pro-demokrasi di berbagai wilayah Suriah, sebagai bagian dari protes Arab Spring yang lebih luas setelah bermula di Tunisia.

Di Suriah aneka protes umumnya ditindak dengan kekerasan oleh pasukan keamanan. Presiden Bashar al-Assad pun banyak mendapat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, setelah itu bukan musim semi demokrasi yang terjadi, melainkan rangkaian pemberontakan melalui pembentukan milisi perlawanan di seluruh negeri, kemudian memburuk hingga menjadi perang saudara besar-besaran pada 2012.

Nah, setelah 12 tahun gejolak, pada akhir 2024, akhirnya pasukan pemberontak berhasil mengepung ibu kota Damaskus. Sedangkan Presiden Bashar al-Assad

terbang ke Rusia untuk mencari perlindungan politik.

Persoalan di dalam negeri Suriah sekarang adalah bagaimana faksi-faksi perlawanan terhadap Assad itu dapat berkompromi secara politik. Pertanyaan ini sangat relevan karena latar belakang faksi-faksi itu beragam, termasuk pengaruh negara lain yang mendukungnya.

Sebagai contoh, Turki yang masih menghadapi masalah aspirasi etnis Kurdi ingin merdeka mendukung Syrian Democratic Forces (SDF) dalam gejolak domestik di Suriah. SDF Suriah yang dominan bertenis Kurdi mengurangi tekanan di wilayah Turki. Turki pun menampung banyak pengungsi etnis itu di wilayah perbatasannya dengan Suriah. Selain SDF, ada pula Syrian National Army dan Hayat Tahrir Al Sham, yang satu sama lain memiliki kepentingan berbeda.

Hayat Tahrir Al Sham inilah yang tampaknya menjadi faksi yang berhasil memasuki ibu kota Damaskus setelah beberapa hari sebelumnya merebut kota terbesar kedua Suriah:

Aleppo. Pada titik ini, kita baru bisa mengemukakan bahwa gejolak di Suriah belum akan berubah menjadi kondisi stabil yang damai dalam 100 hari setelah Bashar al-Assad meninggalkan Suriah. Terlebih lagi, negara-negara Adidaya

Rusia dan Amerika Serikat masih sibuk mengurus perang di Ukraina. Dinamika politik global di berbagai titik menunjukkan peningkatan eskalasi konflik.

Untuk Indonesia, dampaknya paling tidak, konflik di tataran global yang melibatkan banyak negara akan memicu prospek suram ekonomi. Arus barang di jalur perdagangan internasional akan terhambat oleh titik-titik api konflik bersenjata.

Maka fokus ketahanan atau resiliensi di dalam negeri amat sangat menjadi penting. Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas selaras dengan penyesuaian diri terhadap dinamika geopolitik global yang menunjukkan eskalasi konflik. Peningkatan ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas di dalam negeri bukan lagi hal yang perlu tawar-menawar. Lebih khusus lagi, residual sengketa Pilkada menjadi salah satu yang memerlukan perhatian dan antisipasi. ●





PPN 12 PERSEN

KENAIKAN PAJAK BERBALAS INSENTIF

Sudah saatnya melihat pungutan pajak sebagai dana yang akan kembali sebagai layanan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Demikian pula dengan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025.





Begitulah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan soal kenaikan PPN yang beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Konferensi Pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan pada Senin, 15 Desember 2025 itu Menko Airlangga mengemukakan, di samping kenaikan PPN, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek esensial yang menjadi perhatian Pemerintah melalui penerapan berbagai skema kebijakan dan program strategis.

“Bauran kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan Pemerintah dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong, serta diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang di antaranya dalam bentuk pemberian insentif di bidang ekonomi,” kata Pak Menko Airlangga.

Untuk itu, sambungnya, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah tetap selektif memungut PPN sehingga tak semua barang dan jasa langsung kena pajak secara pukol rata. Malah

sebaliknya ada produk barang dan jasa yang tak kena pungutan PPN, selain insentif (imbalan atau pemberian keringanan) berupa paket stimulus (dorongan atau rangsangan) untuk meningkatkan kesejahteraan.

Turut hadir acara itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Tampak pula Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

Airlangga mengemukakan, dengan proyeksi insentif PPN dibebaskan pada 2025 sebesar Rp265,6 triliun, Pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0 persen berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan,

jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

Pak Menko menyebutkan, sejalan dengan asas keadilan dan gotong royong, atas Barang dan Jasa Mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium (antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium), pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12 persen.

Insentif Bagi Rumah Tangga

Bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, stimulus yang diberikan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yakni minyakita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11 persen. Stimulus Bapokting tersebut cukup krusial untuk menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemenu-



han kebutuhan pokok. Secara khusus, stimulus untuk gula industri diharapkan dapat menopang industri pengolahan makanan-minuman yang memiliki kontribusi sebesar 36,3 persen terhadap total industri pengolahan.

Selain itu, Pemerintah juga merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama dua bulan (Januari-Februari 2025), dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen periode yang sama bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Desil adalah pengelompokan 1-10 berdasarkan statistik yang masing-masing berjumlah 10 persen. Desil 1 dan 2 berarti 20 persen kelompok paling rentan, rapuh, atau termiskin. Di atas Desil 1 dan 2, ada kelompok menengah-bawah hingga menengah-atas sebelum kelompok warga kelompok atas.

Nah, bagi masyarakat kelas menengah, kata Menko Airlangga, berbagai stimulus kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah untuk menjaga daya beli, dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku se-

belumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar, PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

Di samping itu, terdapat juga kebijakan

baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta/bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan tidak hanya manfaat tunai, tapi juga manfaat pelatihan dan akses informasi pekerjaan, serta Relaksasi/Diskon sebesar 50 persen atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)



kepada sektor industri padat karya.

Seiring dengan pemberlakuan PPN 12 persen, ternyata Pemerintah pun menyediakan berbagai insentif Bagi Dunia Usaha. Beragam insentif yang dirancang Pemerintah tidak hanya ditujukan untuk menyasar masyarakat umum, kata Airlangga, tapi juga berupa stimulus bagi dunia usaha. "Terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya yang merupakan backbone (tulang punggung) perekonomian nasional," ujarnya.

Insentif tersebut, sambungnya, antara lain berupa perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen sampai dengan 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama tujuh tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk UMKM dengan

gan Sri Mulyani menegaskan, insentif perpajakan yang diberikan Pemerintah berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp265,5 triliun. Nilai Rp265,5 triliun yang disebut Bu Menkeu dan sebelumnya oleh Pak Menko ternyata jauh lebih besar dari angka dua tahun sebelumnya..

"Tahun depan, Rp265,5 triliun untuk pembebasan PPN saja. Itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan dua tahun terakhir," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers.

Pada 2023, ujarnya, insentif PPN yang digelontorkan pemerintah tercatat sebesar Rp210,2 triliun. Sementara pada 2024 nilainya sebesar Rp231 triliun. Untuk tahun depan, kata menkeu Ani, insentif PPN yang diberikan menyasar

atas jasa angkutan umum senilai Rp23,4 triliun, tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding Rp7,4 triliun, dan tarif khusus jasa pengiriman paket Rp2,6 triliun.

Untuk jasa pendidikan dan kesehatan, proyeksi nilai pembebasan PPN mencapai Rp30,8 triliun. Sebesar Rp26 triliun merupakan pembebasan PPN untuk jasa pendidikan dan Rp4,3 triliun untuk jasa pelayanan kesehatan medis. PPN juga dibebaskan pada jasa keuangan dan asuransi, masing-masing senilai Rp19,1 triliun dan Rp8,7 triliun, sehingga total pembebasan PPN pada kelompok ini mencapai Rp27,9 triliun.

Insentif PPN untuk sektor otomotif dan properti diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun, dengan rincian Rp11,4 triliun untuk sektor otomotif dan Rp2,1 triliun untuk insentif PPN ditanggung pemerintah



omset dibawah Rp500 juta/tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut. Pemerintah juga menyiapkan Pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar lima persen.

"Sekali lagi kami sampaikan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan industri padat karya, dan menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, serta sekaligus dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Menko Airlangga.

Nah, lebih rinci lagi, Menteri Keuan-

kelompok bahan makanan hingga otomotif dan properti.

PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan diproyeksikan mencapai Rp77,1 triliun, dengan rincian senilai Rp50,5 triliun untuk barang kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas, dan lain-lain) serta Rp26,6 triliun untuk barang hasil perikanan dan kelautan.

Kemudian, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk UMKM yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Nilai insentif ini diproyeksikan sebesar Rp61,2 triliun. Pembebasan untuk sektor transportasi diperkirakan sebesar Rp34,4 triliun, yang dibebaskan

(DTP). Listrik dan air juga dibebaskan dari PPN, dengan nilai insentif ditaksir sebesar Rp14,1 triliun. PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA, senilai Rp12,1 triliun. Untuk air bersih, nilai pembebasan PPN mencapai Rp2 triliun.

Insentif PPN lainnya juga diberikan untuk kawasan bebas senilai Rp1,6 triliun serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial senilai Rp700 miliar. Fasilitas pembebasan PPN menjadi insentif perpajakan yang paling besar diberikan oleh Pemerintah, di mana insentif pajak penghasilan (PPh) diproyeksikan senilai Rp144,7 triliun dan jenis pajak lainnya sebesar Rp35,2 triliun.

Dengan demikian, nilai insentif perpajakan tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp445,5 triliun atau 1,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Proyeksi insentif PPN itu menyambung keputusan Pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025, sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meski begitu, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

Sebelumnya Bu Menkeu menegaskan pemerintah akan tetap konsisten menjalankan asas keadilan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan PPN ini. "Jadi pelaksanaan UU harus tetap menjaga asas keadilan. Ini tidak terkecuali bagi kita dalam menjalankan, meski tidak pernah sempurna, tapi kita terus berusaha keras untuk terus menyempurnakan," ungkap Bu Menkeu, Rabu, 11 Desember 2024.

Meskipun terjadi kenaikan tarif PPN, ada sejumlah barang dan jasa yang tetap dibebaskan dari pajak. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengenakan pajak, atau menetapkan tarif 0 persen, sebagai berikut:

Daftar barang dan jasa yang Bebas PPN

1. Barang pokok dan kebutuhan sehari-hari

Pemerintah memberikan pengecualian untuk barang-barang yang disebutkan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Tujuan dari pembebasan PPN pada barang pokok adalah untuk memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Yakni:

- Beras
- Daging
- Ikan
- Telur
- Sayur
- Susu segar
- Gula konsumsi

2. Jasa pendidikan

Pendidikan juga termasuk dalam sektor yang mendapatkan pengecualian PPN. Barang dan jasa yang berkaitan dengan pendidikan tidak dikenakan PPN guna memastikan akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Jasa kesehatan

Barang dan jasa yang terkait dengan sektor kesehatan juga dibebaskan dari PPN, dengan tujuan untuk mendukung sektor kesehatan dan meringankan biaya bagi masyarakat, termasuk vaksinasi.

4. Jasa transportasi umum

Transportasi umum adalah sektor

uransi. Bidang ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan finansial bagi masyarakat.

7. Rumah sederhana, pemakaian listrik dan air minum

Untuk memastikan biaya hidup masyarakat tetap terjangkau dan kesejahteraan terjaga, sektor energi dan perumahan, khususnya yang berkaitan



lain yang mendapatkan pengecualian PPN. Tujuannya adalah untuk memastikan transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

5. Jasa tenaga kerja

Beberapa layanan sosial dan jasa tenaga kerja yang diberikan oleh pemerintah juga dibebaskan dari PPN. Hal ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.

6. Jasa keuangan dan asuransi

Pemerintah memberikan pengecualian PPN pada bidang keuangan dan as-

dengan kebutuhan listrik air minum, dan rumah sederhana, akan dibebaskan dari PPN.

Tersirat pula barang yang terkena PPN 12 persen merupakan yang dianggap produk atau jasa mewah, yang umumnya dikonsumsi oleh mereka dengan kemampuan ekonomi lebih. Meski begitu, kenaikan PPN akan berdampak langsung dalam bentuk kenaikan harga-harga jual barang dan jasa yang terkena. Jadi, kita lihat dampak langsungnya mulai Januari 2025. ●



OMON-OMON JANJI KAMPANYE PRABOWO

Presiden Prabowo Subianto pernah berjanji tidak akan menaikkan pajak saat masih berkampanye di Pilpres 2024. Saat itu, Prabowo justru ingin membuat penerimaan pajak menjadi lebih baik dan efisien.

Namun, pernyataan itu hanya sekadar janji. Pemerintah justru kini akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen, mulai 1 Januari 2025.

"Pajak masalahnya adalah bagaimana kita efisien mengumpulkan pajak itu. Bukan naikin pajak itu. Jadi yang ingin kita bicara adalah bagaimana penerimaan itu lebih baik lebih efisien," kata Prabowo dalam acara diskusi 'Industri Keuangan dan Pasar Modal dalam Roadmap Menuju Indonesia Emas' di Grand Ballroom Ritz Carlton Ballroom Pacific Place, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Sebelum terpilih sebagai Presiden, Prabowo mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga. Pada 2023, tax ratio Indo-

nesia berada di level 10,21 persen. Padahal, di Kamboja, Vietnam, dan Thailand, tax ratio sudah mencapai 18 persen.

"Saya bertanya, apa bedanya kita dengan orang Thailand, Vietnam? Kan sama orang Asia. Kalo mereka bisa, kita juga pasti bisa," ungkap Prabowo saat itu.

Meski demikian, belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, lebih rendah dari Turki hingga Arab Saudi. Hal ini disampaikan Menkeu usai pemerintah mengumumkan secara resmi soal kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 dari sebelumnya sebesar 11 persen.

"Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah, kalau kita lihat baik di dalam ne-

gara-negara yang sama emerging atau dengan negara di region maupun dalam G20," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Desember 2024.

Bendahara negara itu membandingkan tarif PPN 12 persen dengan sejumlah negara berkembang seperti Turki dengan tarif PPN 20 persen dan rasio pajak 16,4 persen. Kemudian, PPN di Brasil dengan tarif 17 persen dan rasio pajak 24,67 persen. Lalu, PPN di Afrika Selatan dengan tarif 15 persen dan rasio pajak mencapai 21,4 persen, serta PPN di Arab Saudi sebesar 15 persen. Kemudian, PPN di Filipina 12 persen dengan rasio pajak 15,6 persen. Sedangkan, PPN Meksiko tarifnya 16 persen dengan rasio pajak sebesar 14,46 persen.

"India 18 persen PPN dengan tax ratio mereka di 17,3 persen. Jadi, Indonesia saat ini dengan (PPN) 11 persen tax ratio kita masih di 10,4 persen, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan. Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain. Tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia," terangnya.

Katanya Barang Mewah

Prabowo menyatakan bahwa tarif PPN 12 persen hanya untuk barang mewah. Namun apa yang diucapkannya itu berakhir jauh panggang dari api. Nyatanya, pernyataan Kepala Negara tersebut sekadar 'omon-omon' belaka.

Keputusan Prabowo menaikkan PPN menjadi 12 persen diambil usai menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12 persen untuk barang/jasa mewah saja.

"PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Menurutnya, pemerintah harus membantu rakyat kecil. Bahkan pengecualian PPN kepada masyarakat kecil sudah diterapkan sejak 2023. Pun ingin mengerek tarif PPN, hal ini hanya untuk barang mewah saja.

Dengan pengecualian ini, maka detail barang yang dikenakan bebas PPN 12 persen akan mengacu kepada Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum.

Demi Makan Gratis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui kenaikan PPN menjadi 12 persen salah satunya untuk mengimplementasikan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada Januari 2025.

Airlangga menilai dengan adanya peningkatan pendapatan negara di setor pajak, akan mendorong program Asta Cita dan prioritas Presiden Prabowo, baik di bidang pangan, energi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga MBG.

"Itu penting (kenaikan pajak) untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas bapak presiden, baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan,

dan kedaulatan energi. Di samping itu, penting juga untuk berbagai program infrastruktur pendidikan keehatan perlindungan sosial, dan juga program terkait dengan makan bergizi," kata Airlangga.

Namun, di tengah kenaikan pajak ini, pemerintah memberikan stimulus, yakni paket kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai insentif dan pengecualian.

Menurutnya, kebijakan perpajakan ini dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan, semangat gotong

masyarakat," jelas dia.

Tinjau Ulang

Presiden Prabowo disarankan segera mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (Perppu) untuk menganulir kenaikan PPN 12 persen yang terdapat dalam Pasal 7 UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing, menilai, kenaikan PPN 12 persen tidak berbanding



royong, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa paket kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, mendukung para pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor padat karya, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok.

Semua upaya ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

"Kebijakan perpajakan jg tadi sudah disampaikan menjunjung tinggi prinsip adil, gotong royong, dan kesejahteraan

lurus dengan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah saat ini. Realitas yang ada, daya beli masyarakat menurun, tingkat pengangguran juga masih tinggi seolah tidak terselesaikan dengan baik.

"Kondisi ini mencerminkan ada kepentingan yang memaksa. Ekonomi lemas, pengangguran di mana-mana. Maka Presiden berhak mengeluarkan Perppu (menganulir PPN 12 persen)," kata Fadli, Sabtu, 21 Desember 2024.

PPN 12 persen dipandang sebagai langkah frustrasi pemerintah yang se-

dang membutuhkan uang secara cepat di tengah utang menumpuk. Padahal alih-alih menaikkan pajak, pemerintah punya opsi lain yang tidak memberatkan masyarakat kecil.

"Jika negara sedang membutuhkan uang cepat, maka solusinya adalah rampas aset para koruptor yang merugikan negara miliaran hingga triliunan Rupiah," tegasnya.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta Prabowo membatalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen sebagai kado tahun baru 2025.

Diah menyebut, Kementerian Keuangan berencana naikan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025, argumentasinya karena perintah Pasal 7 UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan

Oleh karena itu, Diah mengaku mendukung Prabowo untuk membatalkan kenaikan pajak tersebut. "Menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 (a) menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan," kata dia.

Assessment monitoring system menurutnya bisa memastikan sistem perpajakan. Selain menjadi pendapatan utama negara, juga berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara.

"Terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk

Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024.

Risyad mengatakan, kenaikan PPN 12 persen tak tepat saat ini. Masyarakat sedang kesulitan ekonomi dan penambahan PPN hanya akan memberatkan. Dia juga mengingatkan kelas menengah sedang melemah. Sebagian kelas menengah turun status menjadi kelas bawah karena kondisi ekonomi saat ini.

Risyad dan kawan-kawan mendesak Prabowo untuk mencabut kenaikan PPN 12 persen dan mengingatkan pemerintah untuk tidak membalut kebijakan itu dengan istilah-istilah menyesatkan.

"Jangan bilang-bilang pakai khusus barang mewah doang. Saya tahu kita sadar itu upaya-upaya buat pembiasan, pengaburan, pengabu-abuan. Jangan dipelintir-pelintir. Batalin semuanya untuk PPN 12 persen," ujarnya.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menuntut Presiden Prabowo mengkaji ulang rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen. BEM SI menyinggung pidato Prabowo yang kerap kali bicara soal upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

"Jelas kami meminta pemerintah untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat," ucap Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, Jumat, 20 Desember 2024.

Menurut BEM SI, wacana kenaikan PPN 12 persen tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang belum merata. "Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik hingga 12 persen ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, lapangan pekerjaan yang tambah luas," ungkap Satria.

Meski kenaikan PPN disebut hanya berlaku pada sektor barang mewah, BEM SI yakin, hal itu tetap akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpotensi menurun.

Saat ini, Satria belum dapat memastikan berapa banyak kampus yang menolak rencana kenaikan PPN 12 persen. Menurutnya, hal itu masih dikaji.

"Kami sempat internalisasi perihal isu ini, namun kawan-kawan sedang mengkaji di setiap kampus. Kami sedang eksternalisasi untuk mencari mitra strategis dalam eskalasi isu ini," ujar Satria. ●



hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," kata Diah, Sabtu, 21 Desember 2024.

Diah mengingatkan, keputusan PPN 12 persen penting gunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga merupakan komitmen Presiden Prabowo pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024 dan seluruh anggota DPR pada pelantikan 1 Oktober 2024.

"Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula Pasal 7 ayat (3): Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen," kata dia.

pendapatan yang legal maupun ilegal; dan, memastikan seluruh transaksi keuangan dan non- keuangan wajib pajak, wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan," ujarnya.

Petisi Penolakan

Kelompok Bareng Warga mengantar petisi online yang telah ditandatangani sekitar 113 ribu orang menuntut Presiden Prabowo mencabut PPN 12 persen ke Istana.

Risyad Azharai, perwakilan Bareng Warga, mengatakan, inisiatif ini dimulai di internet. Bareng Warga hanya menyampaikan suara masyarakat yang dituangkan ke dalam petisi itu.

"Ini adalah tanda tangan yang dihimpun secara digital melalui petisi online oleh hampir 1113 ribu lebih dan akan terus bertambah, yaitu penolakan untuk PPN 12 persen," kata Risyad di Kantor

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786



**PRAMONO TAKLUKAN
PRABOWO-JOKOWI**